



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah wajib

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 /24338/ SETDA/BPKAD pada tanggal 15 Nopember 2023;

900 /3134/ DPRD

tentang Persetujuan Bersama antara Bupati Badung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

1

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

4

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah;	Rp. 9.591.122.648.719,00	
b. Belanja Daerah;	<u>Rp. 9.643.008.303.787,00</u>	
Total Defisit	(Rp. 51.885.655.068,00)	
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp. 101.885.655.068,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>00,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp.	00,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 8.583.086.550.127,00
 - Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.004.100.098.592,00
 - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 3.936.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 7.840.342.490.314,00
 - Retribusi Daerah sejumlah Rp. 318.077.331.209,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 209.418.071.853,00
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 215.248.656.751,00

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 833.857.025.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 170.243.073.592,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 3.936.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 5.869.717.700.125,00
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp. 2.108.154.868.789,00
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 72.086.033.246,00
 - d. Belanja Transfer sejumlah Rp. 1.593.049.701.627,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 2.446.386.381.327,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 1.933.659.478.710,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 6.413.200.000,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 1.482.132.140.088,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.126.500.000,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp. 418.938.280.645,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 215.938.739.122,00

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 637.629.788.504,00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp. 821.569.087.712,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya sejumlah Rp. 13.691.237.806,00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah Rp. 387.735.000,00
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sejumlah Rp. 72.086.033.246,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 894.386.650.239,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 698.663.051.388,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 101.885.655.068,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 50.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan :

- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub.Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota.
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (7,68/ 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaanya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8

7



KABUPATEN BADUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.650.127,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314,00
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	9.591.122.648.719,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	6.869.717.700.125,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.633.659.478.710,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.413.200.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.108.154.868.789,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	9.643.008.303.787,00
	Total Surplus/(Defisit)	-51.885.655.068,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	51.885.655.068,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung



INOMAN GIRI PRASTA



BERITA ACARA

Nomor : 900 / 24338 / SETDA / BPKAD

Nomor : 900 / 3134 / DPRD

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. : Bupati Badung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung yang beralamat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi, Mengwi Badung - Bali.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Drs. I Putu Parwata, MK, MM. : Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. I Wayan Suyasa, SH. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung.
4. Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang beralamat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala” Jalan Raya Sempidi, Mengwi Badung - Bali.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada ringkasan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada ringkasan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada ringkasan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mangupura, 15 Nopember 2023

BUPATI BADUNG,



(I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS)

KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG



(Dr. Drs. I PUTU PARWATA, MK, MM)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG

(I WAYAN SUYASA, SH)

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG

(Drs. I MADE SUNARTA, MM, M.Si)

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	APBD 2024
PENDAPATAN	9.590.932.648,719
BELANJA	9.642.818.303,787
Total Surplus/(Defisit)	(51.885.655,068)
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655,068
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000,000
Pembiayaan Netto	51.885.655,068
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-

BUPATI BABUNG

(I NYOMAN GRI PRASTA, S.SOS)

KETUA DPRD

(Dr. Drs. I PUTU PARWATA, MK,MM)



பிணக்குப்பாபிணக்கு
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிணக்குப்பாபிணக்கு
SEKRETARIAT DAERAH

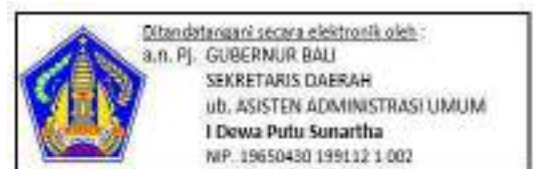
பிணக்குப்பாபிணக்குப்பாபிணக்கு - பிணக்கு (பிணக்குப்பா) பிணக்குப்பாபிணக்கு (பிணக்குப்பா) பிணக்குப்பாபிணக்கு
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361)
WEBSITE : www.baliprov.go.id

Nomor : B.13.045.2/9761/PADFE/BPKAD
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Bali, 21 Desember 2023
Kepada :
Yth. Bupati Badung
di-
Badung

Menunjuk ketentuan Pasal 112 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1015/04-E/HK/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Bali sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten Badung.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah dilandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE





GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1015/04-E/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Badung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung berkewajiban melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Badung segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, setelah Bupati Badung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Badung berkewajiban menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- KELIMA : Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 6 Desember 2023

PJ. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Bupati Badung di Mangupura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Badung di Mangupura;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
10. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1015 /04-E/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BADUNG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BADUNG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

- A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. Kebijakan Umum

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati, Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Badung dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat Nomor	Tanggal	Ket
1	2	3	4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024	22 Tahun 2023	11 Juli 2023	Sesuai, (paling lama 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan.
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD Kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP Daerah	900/11305/SETDA/BPKAD	11 Juli 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah Kabupaten Badung kepada DPRD Kabupaten Badung	900/11358/SETDA/BPKAD	13 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan KUA Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Kabupaten Badung	<u>903/11827/SETDA/BPKAD</u> 903/1834/DPRD	25 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan PPAS Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Kabupaten Badung	<u>903/11826/SETDA/BPKAD</u> 903/1835/DPRD	25 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Badung	900/14097 /SETDA/BPKAD	7 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)

1	2	3	4
Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD	<u>903/24338/SETDA/BPKAD</u> 903/3134/DPRD	15 November 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	900/24632/SETDA/BPKAD	16 November 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah, yaitu:
 - a. penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
 - b. pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
 - d. penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- e. pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Badung menyusun program Pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- b. Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan belanja daerah agar mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

- 1) penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) penurunan *stunting*;
- 3) pengendalian inflasi;
- 4) peningkatan investasi;
- 5) penguatan kualitas sumber daya manusia;
- 6) pembangunan infrastruktur; dan
- 7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

sebagaimana dimaksud butir C.1.m.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- c. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- d. Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- e. Pemerintah Kabupaten Badung dalam menganggarkan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - 1) standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan selain yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai SHSR ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);
 - 2) analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI; dan
 - 3) standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan revaluasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah, yaitu:
 - a. pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; dan
 - b. pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

III. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Kepentingan Umum

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.590.932.648.719,00 sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Target P-APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)
Pendapatan Daerah	4.123.565.571.975,00	7.459.398.824.983,00	9.590.932.648.719,00
Pendapatan Asli Daerah	3.198.774.150.724,00	6.534.295.018.991,00	8.583.086.550.127,00
Pajak Daerah	2.645.950.394.896,00	5.830.067.527.510,00	7.840.342.490.314,00
Retribusi Daerah	52.935.392.410,00	127.995.833.150,00	318.077.331.209,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	179.876.408.095,00	194.899.850.591,00	209.418.071.853,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	320.011.955.323,00	381.331.807.740,00	215.248.656.751,00
Pendapatan Transfer	924.791.421.251,00	925.103.805.992,00	1.003.910.098.592,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	764.505.918.000,00	706.890.437.000,00	833.857.025.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.285.503.251,00	218.213.368.992,00	170.053.073.592,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	3.936.000.000,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	3.936.000.000,00

Berdasarkan Tabel 2 Tersebut, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)
2022	3.198.774.150.724,00	4.123.565.571.975,00	77,57
2023	6.534.295.018.991,00	7.459.398.824.983,00	87,60
2024	8.583.086.550.127,00	9.590.932.648.719,00	89,49

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.583.086.550.127,00 atau 89,49% dari total pendapatan daerah, mengalami peningkatan Rp2.048.791.531.136,00 dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi PAD sampai dengan Bulan Oktober 2023 sebesar Rp4.818.804.190.619,11 atau 73,75% dari target PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.534.295.018.991,00, apabila diproyeksikan realisasi PAD Kabupaten Badung sampai dengan bulan Desember 2023 akan tercapai sebesar Rp5.782.565.028.742,93 lebih kecil dari target PAD yang dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.534.295.018.991,00, sehingga capaian PAD Tahun Anggaran 2024 akan berpotensi kurang sebesar Rp751.729.990.248,07.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung agar realistis, cermat, dan berhati-hati dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target PAD terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud.

Tahun 2024 ada beberapa dampak yang terjadi di sektor pariwisata selama adanya ketidakpastian politik di tengah Pemilu 2024 diantaranya menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, pembatalan investasi proyek pariwisata, dan penurunan pendapatan bagi pemangku kepentingan industri pariwisata. Tidak hanya itu, para pelaku industri perhotelan, operator tur, dan pedagang lokal juga turut merasakan yaitu mengalami penurunan pendapatan karena adanya ketidakpastian politik, untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung agar realistis, cermat, dan berhati-hati dalam perencanaan target pendapatan daerah.

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.840.342.490.314,00 atau 81,75% dari total pendapatan daerah diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) pajak Hotel sebesar Rp4.619.572.122.216,00;
- 2) pajak Restoran sebesar Rp1.536.627.999.303,00;
- 3) pajak Hiburan sebesar Rp320.722.605.442,00;
- 4) pajak Reklame sebesar Rp7.500.000.000,00;
- 5) pajak Penerangan Jalan sebesar Rp224.411.640.543,00;
- 6) pajak Parkir sebesar Rp13.500.413.160,00;
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp67.988.833.912,00;
- 8) pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp60.717.600;
- 9) pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp266.009.637.286,00; dan
- 10) pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp783.948.520.852,00.

Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perizinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak;
- 2) Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp318.077.331.209,00 atau 3,32% dari total pendapatan daerah diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) retribusi jasa umum sebesar Rp203.784.599.689,00;
- 2) retribusi jasa usaha sebesar Rp90.792.731.520,00; dan

- 3) retribusi perizinan tertentu sebesar
Rp23.500.000.000,00.

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan:

- a. penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun berdasarkan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- b. dalam hal Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- c. peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk Peraturan Daerah terkait pajak mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
- d. peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025;
- e. dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
 - 1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - 2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

- 3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- f. penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- g. penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
- h. optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut;
- i. penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- j. penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan
- k. kerja sama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - (a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan
 - (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya terhadap penyesuaian regulasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Badung segera mengupayakan langkah-langkah percepatan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya untuk penggunaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp209.418.071.853,00 atau 2,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp209.418.071.853,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
- 1) bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp202.985.189.908,00;
 - 2) bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp364.601.885; dan
 - 3) bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp6.068.280.060.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XI Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:

- 1) PT. Jasa Marga Bali sebesar Rp100.000.000.000,00;
- 2) PT. Penjaminan Kredit Bali Mandara sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 3) PDAM Tirta Mangupura sebesar Rp193.207.843.274,00;
- 4) PD. Pasar Badung sebesar Rp27.314.641.616,00; dan
- 5) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp850.617.000.000,00.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan butir C.2.a.2).b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
- b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Kabupaten Badung perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir C.4.b.2).b).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp215.248.656.751,00 atau 2,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp4.896.396.452,00;
- 2) jasa giro sebesar Rp5.791.993.005,00;
- 3) hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp10.000.000,00; dan
- 4) pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp204.550.267.294,00.

Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya pendapatan dari BLUD dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.003.910.098.592,00 atau 10,47% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

a. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada jenis pendapatan:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp833.857.025.000,00 diuraikan pada objek pendapatan:

a) Dana Perimbangan

Penganggaran target Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp756.255.486.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

(1) dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp80.858.081.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.2, Lampiran V.3, dan Lampiran V.8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, selanjutnya untuk alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar memperhatikan ketentuan penganggaran sebagaimana butir C.2.b.5).a).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; dan

(2) dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp402.567.701.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

- (3) dana transfer khusus–dana alokasi khusus (DAK) terdiri dari:
 - (a) dana transfer khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp38.872.272.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.12 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; dan
 - (b) dana transfer khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp233.957.432.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- (4) penganggaran target Insentif Fiskal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.780.370.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.17 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; dan
- (5) penganggaran target Dana Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.821.169.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.16 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, dan agar memperhatikan ketentuan penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana butir C.2.b.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal penganggaran dana

Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian Penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp170.053.073.592,00 diuraikan menjadi objek pendapatan:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp170.053.073.592,00 diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak, terdiri dari:
 - (1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp65.011.581.473,00;
 - (2) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp32.387.299.700,00;
 - (3) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp42.290.760.291,00;
 - (4) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp68.075.082,00; dan
 - (5) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp30.295.357.046,00.Pendapatan Bagi Hasil telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/8229/PADFE/BPKAD tanggal 25 Oktober 2023, hal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
 - b) Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 diuraikan pada rincian objek Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam lampiran surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/9257/PADFE/BPKAD tanggal 4 Desember 2023 hal Pagu Sementara Belanja Bantuan

Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud, dengan mempedomani butir C.2.b.5).b).(2).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp3.936.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan ke dalam objek pendapatan Hibah sebesar Rp3.936.000.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp9.642.818.303.787,00 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)
	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5
Belanja Daerah	4.285.844.412.266,00	3.669.879.652.358,10	8.523.753.903.056,00	9.642.818.303.787,00
Belanja Operasi	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	5.271.899.485.307,00	5.847.346.854.099,00
Belanja Pegawai	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	1.882.828.464.147,00	2.523.433.611.301,00
Belanja Barang Dan Jasa	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	1.720.480.276.777,00	1.955.443.123.388,00
Belanja Subsidi	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	2.035.319.000,00	4.709.000.000,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Hibah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	1.666.269.925.383,00	1.362.634.619.410,00
Belanja Bantuan Sosial	27.337.700.000,00	963.500.000,00	285.500.000,00	1.126.500.000,00
Belanja Modal	646.712.138.304,00	476.196.284.334,00	1.336.689.234.936,00	2.215.666.563.494,00
Belanja Modal Tanah	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	288.982.981.274,00	409.955.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	168.657.309.700,00	105.556.248.100,00	295.874.571.177,00	199.855.122.309,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	362.213.962.987,00	297.327.100.168,00	428.289.635.982,00	864.920.584.227,00

1	2	3	4	5
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	62.371.909.454,00	35.962.917.353,00	297.545.768.052,00	726.856.884.152,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.997.156.163,00	11.014.250.713,00	15.877.978.811,00	13.691.237.806,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.750.000.000,00	-	10.118.299.640,00	387.735.000,00
Belanja Tidak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	93.309.142.301,00	72.086.033.246,00
Belanja Tidak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	93.309.142.301,00	72.086.033.246,00
Belanja Transfer	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	1.821.856.040.512,00	1.507.718.852.948,00
Belanja Bagi Hasil	304.304.640.707,00	294.333.862.070,00	747.663.919.107,00	894.386.650.239,00
Belanja Bantuan Keuangan	151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	1.074.192.121.405,00	613.332.202.709,00

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan (Rp)	Belanja				Jumlah Belanja (Rp)
		Operasi (Rp)	Modal (Rp)	Tidak Terduga (Rp)	Transfer (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	211.849.507.209,00	3.313.946.320.707,00	1.896.799.000.952,00	-	-	5.210.745.321.659,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	588.000.000,00	1.158.689.311.315,00	447.337.118.012,00	-	-	1.606.026.429.327,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	211.080.507.209,00	1.070.192.310.465,00	137.832.178.447,00	-	-	1.208.024.388.912,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang	170.000.000,00	895.191.369.238,00	1.034.993.774.962,00	-	-	1.930.125.138.170,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.000.000,00	42.522.320.368,00	267.291.335.636,00	-	-	309.813.575.004,00
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	128.370.582.136,00	9.335.424.87.001	-	-	137.706.007.007,00
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	2.000.000,00	19.040.514.195,00	9.169.044.00	-	-	19.049.780.239,00
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	26.908.767.925,00	804.907.508.765,00	82.150.675.859,00	-	-	887.026.344.624,00
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.000.000,00	14.960.892.112,00	-	-	-	14.960.892.112,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.000.000,00	20.596.902.888,00	43.096.400,00	-	-	20.639.999.288,00

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	311.000.000,00	6.990.149.321,00	-	-	-	6.990.149.321,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	30.000.000,00	245.058.761,00	-	-	-	245.058.761,00
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	25.000.000,00	174.347.652.951,00	37.366.852.735,00	-	-	211.714.505.686,00
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.000.000,00	21.194.646.355,00	10.809.180,00	-	-	21.205.455.535,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.000.000,00	20.286.296.420,00	25.997.532,00	-	-	20.312.293.952,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.000.000,00	6.664.294.173,00	480.988.000,00	-	-	7.145.282.173,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.406.707.955,00	93.323.788.917,00	37.060.478.395,00	-	-	130.384.267.312,00
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	10.000.000,00	71.257.037.569,00	408.377.156,00	-	-	71.665.414.825,00
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.000.000,00	24.232.245.148,00	262.607.574,00	-	-	24.494.852.722,00
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	23.502.000.000,00	36.656.304.437,00	-	-	-	36.656.304.437,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	588.000.000,00	44.595.168.591,00	5.265.622.100,00	-	-	49.860.790.791,00
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	10.000.000,00	80.373.875,00	-	-	-	80.373.875,00
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	10.000.000,00	196.985.225,00	-	-	-	196.985.225,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.000.000,00	243.020.443.801,00	1.241.979.900,00	-	-	244.262.423.701,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.000.000,00	25.519.730.836,00	23.866.887,00	-	-	25.543.597.723,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsafan	2.000.000,00	740.097.185,00	-	-	-	740.097.185,00
Urusan Pemerintahan Bidang Rilihan	89.527.000.000,00	207.765.495.682,00	174.354.597.105,00	-	-	382.120.092.847,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2.000.000,00	19.488.112.279,00	108.405.708,00	-	-	19.596.517.987,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	89.210.000.000,00	67.577.872.762,00	11.936.175.734,00	-	-	79.494.048.496,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	311.000.000,00	95.791.794.525,00	10.640.624.123,00	-	-	106.432.418.648,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2.000.000,00	2.968.820.778,00	150.798.090.000,00	-	-	152.866.820.778,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.000.000,00	22.838.895.338,00	891.391.600,00	-	-	23.730.286.938,00
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	80.000.000,00	816.333.726.067,00	24.635.864.398,00	-	-	840.969.590.465,00
Sekretariat Daerah	10.000.000,00	666.414.110.983,00	423.498.300,00	-	-	666.837.609.283,00
Sekretariat Dprd	50.000.000,00	149.919.615.084,00	24.212.366.098,00	-	-	174.131.981.182,00
Unsur Penerimaan Urusan Pemerintahan	9.263.509.433.505,00	424.412.819.291,00	3.516.774.732,00	72.086.033.246,00	1.507.718.852.948,00	2.007.734.480.217
Perencanaan	2.000.000,00	24.809.833.173,00	307.300.650,00	-	-	25.117.133.823,00

1	2	3	4	5	6	7
Ruangan	9.263.501.433.505,00	331.598.029.713,00	2.782.608.226,00	72.086.033.246,00	1.507.718.852.948,00	1.914.185.324.133,00
Kepengawasan	2.000.000,00	26.962.713.789,00	9.812.400,00	-	-	26.972.526.189,00
Pendidikan Dan Pelatihan	2.000.000,00	19.578.135.032,00	-	-	-	19.578.135.032,00
Penelitian Dan Pengembangan	2.000.000,00	35.464.087.584,00	417.053.456,00	-	-	35.881.141.040,00
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2.000.000,00	37.930.182.147,00	4.062.014.714,00	-	-	41.992.196.861,00
Inspektorat Daerah	2.000.000,00	37.930.182.147,00	4.062.014.714,00	-	-	41.992.196.861,00
Usur	42.000.000,00	196.470.739.814,00	30.107.635.674,00	-	-	226.578.375.488,00
Kewilayahan	42.000.000,00	196.470.739.814,00	30.107.635.674,00	-	-	226.578.375.488,00
Kecamatan	42.000.000,00	196.470.739.814,00	30.107.635.674,00	-	-	226.578.375.488,00
Unsur Pemerintahan Umum	2.000.000,00	45.579.901.626,00	-	-	-	45.579.901.626,00
Kecamatan	2.000.000,00	45.579.901.626,00	-	-	-	45.579.901.626,00
Kecamatan Bangsan Dan Politik	2.000.000,00	45.579.901.626,00	-	-	-	45.579.901.626,00
Total	9.590.932.646.719,00	5.847.346.854.099,00	2.215.666.563.494,00	72.086.033.246,00	1.507.718.852.948,00	6.642.818.303.787,00

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp5.210.745.321.659,00 atau 54,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

- 1) urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar Rp1.606.026.429.327,00 atau 16,66% dari total belanja daerah;
- 2) urusan pemerintahan bidang kesehatan sebesar Rp1.208.024.388.912,00 atau 12,53% dari total belanja daerah;
- 3) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp1.930.125.138.170,00 atau 20,02% dari total belanja daerah;
- 4) urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp309.813.575.004,00 atau 3,21% dari total belanja daerah;
- 5) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar Rp137.706.007.007,00 atau 1,43% dari total belanja daerah; dan
- 6) urusan pemerintahan bidang sosial sebesar Rp19.049.783.239,00 atau 0,20% dari total belanja daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp887.098.344.624,00 atau 9,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

- 1) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja sebesar Rp14.960.892.112,00 atau 0,16% dari total belanja daerah;
- 2) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp20.639.699.288,00 atau 0,21% dari total belanja daerah;
- 3) urusan pemerintahan bidang pangan sebesar Rp6.990.149.321,00 atau 0,07% dari total belanja daerah;
- 4) urusan pemerintahan bidang pertanahan sebesar Rp245.058.761,00 atau 0,003% dari total belanja daerah;
- 5) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebesar Rp211.714.505.686,00 atau 2,20% dari total belanja daerah;
- 6) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar Rp21.205.455.535,00 atau 0,22% dari total belanja daerah;
- 7) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar Rp20.312.293.952,00 atau 0,21% dari total belanja daerah;
- 8) urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp7.145.282.173,00 atau 0,07% dari total belanja daerah;
- 9) urusan pemerintahan bidang perhubungan sebesar Rp130.384.267.312,00 atau 1,35% dari total belanja daerah;
- 10) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp71.665.414.825,00 atau 0,74% dari total belanja daerah;
- 11) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sebesar Rp24.494.852.722,00 atau 0,25% dari total belanja daerah;
- 12) urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebesar Rp36.656.204.437,00 atau 0,38% dari total belanja daerah;
- 13) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga semula Rp49.860.790.791,00 atau 0,52% dari total belanja daerah;
- 14) urusan pemerintahan bidang statistik sebesar Rp80.373.875,00 atau 0,001% dari total belanja daerah;
- 15) urusan pemerintahan bidang persandian sebesar Rp196.985.225,00 atau 0,002% dari total belanja daerah;
- 16) urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebesar Rp244.262.423.701,00 atau 2,53% dari total belanja daerah;
- 17) urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebesar Rp25.543.597.723,00 atau 0,26% dari total belanja daerah; dan
- 18) urusan pemerintahan bidang kearsipan sebesar Rp740.097.185,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp382.120.092.847,00 atau 3,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

- 1) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp19.596.517.987,00 atau 0,20% dari total belanja daerah;
- 2) urusan pemerintahan bidang pariwisata sebesar Rp79.494.048.496,00 atau 0,82% dari total belanja daerah;
- 3) urusan pemerintahan bidang pertanian sebesar Rp106.432.418.648,00 atau 1,10% dari total belanja daerah;
- 4) urusan pemerintahan bidang perdagangan sebesar Rp152.866.820.778,00 atau 1,59% dari total belanja daerah; dan
- 5) urusan pemerintahan bidang perindustrian semula Rp23.730.286.938,00 atau 0,25% dari total belanja daerah.

d. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp840.969.590.465,00 atau 8,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

e. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp2.007.734.480.217,00 atau 20,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

f. **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp41.992.196.861,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

g. **Unsur Kewilayahan**

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan sebesar Rp226.578.375.488,00 atau 2,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

h. **Unsur Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp45.579.901.626,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan belanja daerah:

- a. untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.

- b. disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

- a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp327.226.773.413,00 atau 20,37% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp1.606.026.429.327,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp10.389.737.812,00;
- 2) pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp75.815.799.255,00; dan
- 3) pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp241.021.236.346,00.

Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Badung yang terdiri dari:

- 1) 100% jumlah warga negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
- 2) 100% jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan
- 3) 100% jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan sebesar Rp327.226.773.413,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp10.409.990.058,00 atau 8,62% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp1.208.024.388.912,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) pengelolaan pelayanan kesehatan balita sebesar Rp187.956.700,00;
- 2) pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar Rp637.752.400,00;
- 3) pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar Rp954.665.816,00;
- 4) pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp1.105.243.800,00;
- 5) pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp82.518.520,00;
- 6) pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar Rp776.681.720,00;
- 7) pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp94.217.160,00;
- 8) pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp2.940.192.216,00;
- 9) pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sebesar Rp2.286.720.086,00;
- 10) pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp659.225.360,00;
- 11) pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp319.509.020,00; dan
- 12) pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp365.307.260,00.

Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Badung yang terdiri dari:

- 1) 100% jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 2) 100% jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;

- 3) 100% jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 4) 100% jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 5) 100% jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 6) 100% jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 7) 100% jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 8) 100% jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 9) 100% jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 10) 100% jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan;
- 11) 100% jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan; dan
- 12) 100% jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan dengan mempedomani urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan sebesar Rp10.409.990.058,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp22.844.884.251,00 atau 1,18% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.930.125.138.170,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan sebesar Rp8.029.468.015;
- 2) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) sebesar Rp1.814.927.867,00;
- 3) pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan sebesar Rp12.299.993.035,00; dan

- 4) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) sebesar Rp700.495.334,00.

Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Badung yang terdiri dari:

- 1) 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mempedomani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.844.884.251,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp3.894.041.210,00 atau 1,26% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp309.813.575.004,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota sebesar Rp3.591.806.370,00;
- 2) pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana sebesar Rp286.977.564,00;
- 3) pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani sebesar Rp7.960.700,00; dan
- 4) sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana Rp7.296.576,00.

Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Badung yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana bencana daerah Kabupaten/Kota memperoleh rumah layak huni ; dan
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran pada jenis pelayanan penyediaan rumah layak huni akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, untuk itu agar dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.894.041.210,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp22.516.848.408,00 atau 16,36% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas sebesar Rp137.706.007.007,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) sebesar Rp192.239.609,00;
- 2) peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia Rp121.150.300,00;
- 3) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar Rp3.692.262,00;
- 4) pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp249.857.262,00;
- 5) penyusunan rencana kontijensi Rp22.122.408,00;
- 6) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Rp13.862.124,00;
- 7) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota Rp670.583.745,00;
- 8) penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota Rp137.611.029,00;
- 9) respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota Rp3.381.502.475,00;

- 10) respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas Rp12.550.659,00;
- 11) pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Rp583.397.700,00;
- 12) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Rp63.135.600,00;
- 13) pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp12.838.768.735,00;
- 14) pembinaan aparatur pemadam kebakaran Rp1.674.240.700,00;
- 15) penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp2.269.200,00;
- 16) pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp204.750.000,00;
- 17) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Rp64.314.600,00;
- 18) pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi Rp2.277.966.500,00; dan
- 19) penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia Rp2.833.500,00.

Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten Badung yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara mendapat pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum;
- 2) 100% Warga Negara dalam pencegahan kebakaran memperoleh pelayanan informasi rawan kebakaran, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran, dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- 3) 100% Warga Negara yang terkena bencana memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 4) 100% Warga Negara yang terkena dampak Bencana memperoleh pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) 100% Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Trantibumlinmas dengan mempedomani urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Trantibumlinmas sebesar Rp22.516.848.408,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp1.620.120.782,00 atau 8,50% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp19.049.783.239,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

- 1) pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp692.566.813,00;
- 2) pemberian layanan data dan pengaduan sebesar Rp3.055.097,00;
- 3) pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebesar Rp141.940.515,00;
- 4) penyediaan alat bantu sebesar Rp324.819.034,00;
- 5) penyediaan permakanan sebesar Rp246.307.834,00;
- 6) pelayanan dukungan psikososial sebesar Rp80.455.241,00; dan
- 7) penyediaan makanan sebesar Rp130.976.248,00.

Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM untuk Kabupaten Badung yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) 100% Warga Negara anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti;

- 4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Sosial luar panti; dan
- 5) 100% Warga Negara korban bencana kabupaten/kota mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial sebesar Rp1.620.120.782,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar mempertahankan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM sesuai pemetaan anggaran SPM yang tercantum dalam Tabel Matriks Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai butir E.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik meliputi pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan.

3. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:
 - a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp185.157.236.787,00 atau 1,92% dari total belanja daerah, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi, pembangunan ekonomi Tahun 2024 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik

berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi;

- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2), Rp69.977.768.350,00 atau 0,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah;
- c. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp687.885.147.224,00 atau 7,13% dari total belanja daerah, yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp12.907.690.438,00 atau 0,13% dari total belanja daerah, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat;
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.357.750.274.027,00 atau 24,45% dari total belanja daerah, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2023 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi; dan

- f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp5.040.700.046,00 atau 0,05% dari total belanja, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun non alam. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana non alam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.
- g. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp636.784.754.631,00 atau 6,90% dari total belanja daerah, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	Jumlah	
		Rupiah (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	185.157.236.787,00	1,92
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	69.977.768.350,00	0,73
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	687.885.147.224,00	7,13

1	2	3	4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	12.907.690.438,00	0,13
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	2.357.750.274.027,00	24,45
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	5.040.700.046,00	0,05
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	636.784.754.754.631,00	6,60
	Total Anggaran	3.955.503.571.503,00	41,02
	Total Belanja Daerah	9.642.818.303.787,00	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Tabel 6 tersebut, agar dipertahankan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Badung pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 meliputi:

- Pertumbuhan ekonomi wilayah Bali sebesar 6,5% s.d 6,9%;
- Menurunnya kemiskinan sebesar 2,5 s.d 3,0%; dan
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,1% s.d 2,8%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Badung (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Badung sebesar 82,33%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

- c. penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Provinsi Tahun 2024
- Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas Provinsi Tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024	Jumlah	
		Rupiah (Rp)	Persentase (%)
1	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	177.884.920.963,00	1,84
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	692.002.366.898,00	7,18
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	40.367.126.595,00	0,42
4	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	8.375.900.429,00	0,09
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	163.390.564,00	0,00
6	Infrastruktur	2.267.696.031.762,00	23,52
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	769.013.834.292,00	7,97
	Total Anggaran	3.955.503.571.503,00	41,02
	Total Belanja Daerah	9.642.818.303.787,00	

Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan sinkronisasi alokasi anggaran berdasarkan pembangunan prioritas Provinsi Bali sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yaitu meliputi:

- a. pertanian, kelautan, IKM UMKM, dan pariwisata;
- b. pendidikan, IPTEK, dan kesehatan;
- c. tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
- d. adat, tradisi, seni, dan budaya;
- e. lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

- f. infrastruktur; dan
- g. tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyesuaikan program prioritas pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 kedalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Badung Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024
 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
 Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Kesehatan	966.620.355.742,00	10,02
2	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	137.706.007.020,00	1,43
3	Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan	509.494.889.453,00	5,28
4	Pembangunan Ekonomi	180.609.149.058,00	1,87
5	Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup	211.714.505.686,00	2,20
6	Pendidikan, Riset, Dan Inovasi	1.727.829.994.043,00	17,92
7	Perlindungan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender	26.676.539.246,00	0,28
8	Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan Dan Permukiman	2.368.497.828.739,00	24,56
9	Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.355.740.576.903,00	34,80
Jumlah total		9.484.889.845.890,00	98,36
Total Belanja Daerah		9.642.818.303.787,00	

6. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Kabupaten Badung agar mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.073.541.029,00 atau 0,49% dari total belanja daerah yang dianggarkan pada sub kegiatan:

- a. pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Rp47.4273.648,00;
- b. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal Rp2.532.982.332,00;
- c. penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota Rp2.294.391.785,00;
- d. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani Rp16.861.187.391,00;
- e. pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi Rp4.695.952.474,00;
- f. pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Rp16.767.270.900,00;
- g. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan Rp32.056.100,00;
- h. pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp447.350.974,00;
- i. pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil Rp605.507.674,00;
- j. penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp458.519.380,00;
- k. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap Rp1.373.442.064,00; dan
- l. pengembangan kapasitas nelayan kecil Rp530.606.307,00.

untuk itu, dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Badung agar tetap fokus terhadap pengendalian inflasi antara lain:

- 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
- 2) pengendalian laju alih fungsi lahan;
- 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
- 4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan
- 5) pengawasan harga dan operasi pasar.

sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.c) dan butir E.2.ad.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.965.395.644.922,00 atau 20,38% dari total belanja daerah Rp9.642.818.303.787,00, dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	RAPBD TA 2024 (Rp)		Persentase dari total anggaran Pendidikan (%)
		3	4	5
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan		1.606.026.429.327,00	81,72%
	1) Belanja Operasi	1.158.689.311.315,00	-	58,95%
	a) belanja pegawai	874.679.553.509,00	-	44,50%
	b) belanja barang dan jasa	245.903.095.306,00	-	12,51%
	c) belanja hibah	37.118.162.500,00	-	1,89%
	d) belanja bantuan sosial	988.500.000,00	-	0,05%
	2) Belanja Modal	447.337.118.012,00	-	22,76%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	-	244.262.423.701,00	12,43%
	1) Belanja Operasi	243.020.443.801,00	-	12,36%
	a) belanja pegawai	17.789.675.181,00	-	0,91%
	b) belanja barang dan jasa	113.848.817.620,00	-	5,79%
	c) belanja hibah	111.381.951.000,00	-	5,67%
	d) belanja bantuan sosial	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal	1.241.979.900,00	-	0,06%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	-	25.543.597.723,00	1,30%
	1) Belanja Operasi	25.519.730.836,00	-	1,30%
	a) belanja pegawai	23.745.552.344,00	-	1,21%
	b) belanja barang dan jasa	1.774.178.492,00	-	0,09%
	c) belanja hibah	-	-	0,00%
	d) belanja bantuan sosial	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal	23.866.887,00	-	0,00%
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-	49.860.790.791,00	2,54%
	1) Belanja Operasi	44.595.168.691,00	-	2,27%
	a) belanja pegawai	-	-	0,00%
	b) belanja barang dan jasa	29.233.824.833,00	-	1,49%
	c) belanja hibah	15.361.343.858,00	-	0,78%
	d) belanja bantuan sosial	-	-	0,00%
	2) Belanja Modal	5.265.622.100,00	-	0,27%
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	-	39.702.403.380,00	2,02%

1	2	3	4	5
	1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	39.702.403.380,00	-	2,02%
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		1.965.395.644.922,00	
3.	Total Belanja Daerah		9.642.818.303.787,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		20,38%	

Berdasarkan Tabel 9 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Badung dan disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Urusan Bidang Pendidikan yang antara lain diuraikan dalam:
 - a) program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp724.636.225.329,00 atau 36,87% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
 - b) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp881.390.203.998,00 atau 44,85% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.
- 2) Program pada Urusan Bidang Kebudayaan antara lain diuraikan pada:

- a) program pengembangan kebudayaan sebesar Rp147.299.941.339,00 atau 7,49% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - b) program pembinaan sejarah dianggarkan sebesar Rp7.933.753.990,00 atau 0,40% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - c) program Pengelolaan Permuseuman sebesar Rp2.760.986.712,00 atau 0,14% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - d) program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dianggarkan tetap sebesar Rp32.444.660.098,00 atau 1,65% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - e) program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp33.548.410.260,00 atau 1,71% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.
- 3) Program pada Urusan Keperpustakaan antara lain diuraikan pada program:
- a) pembinaan perpustakaan sebesar Rp558.999.232,00 atau 0,03% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - b) program pengelolaan arsip sebesar Rp650.017.232,00 atau 0,02% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - c) program perlindungan dan penyelamatan arsip sebesar Rp42.796.420,00 atau 0,002% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - d) program perizinan penggunaan arsip sebesar Rp47.283.533,00 atau 0,002% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
 - e) program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno sebesar Rp134.000.940,00 atau 0,07% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.
- 4) Program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain diuraikan pada:
- a) program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp984.661.256,00 atau 0,05% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
 - b) program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp46.686.396.925,00 atau 2,38% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.208.024.388.912,00 atau 16,97% dari total belanja daerah diluar gaji Rp7.119.384.692.486,00, dengan uraian perhitungan Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan		Jumlah RAPBD TA 2024 Jumlah (Rp)		Persentase dari total anggaran kesehatan (%)
1.	a.	Urusan bidang Kesehatan:		1.208.024.388.912,00	100%
		1) Belanja Operasi	1.070.192.210.465,00		89%
		a) belanja pegawai	519.470.011.307,00		43%
		b) belanja barang dan jasa	547.610.712.777,00		45%
		c) belanja hibah	3.111.486.381,00		0%
		d) belanja bantuan sosial	0,00		0%
		2) Belanja Modal	137.832.178.447,00		11%
	b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		0,00	0%
		1) Belanja Transfer:	0,00		0%
		2) Belanja bantuan keuangan	0,00		0%
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)			1.208.024.388.912,00	
3.	Total Belanja Daerah			9.642.818.303.787,00	
4.	Gaji ASN			2.523.433.611.301,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)			7.119.384.692.486,00	
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%				16,97%

Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, harus konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam butir E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan yaitu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dimana kebutuhan Kesehatan daerah mengacu pada program Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Kesehatan Rp1.208.024.388.912,00 atau 61,46% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan, antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - a) program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Rp2.243.928.220,00 atau 0,11% dari total anggaran kesehatan;
 - b) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Rp557.909.140.262,00 atau 28,39% dari total anggaran kesehatan;
 - c) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Rp21.405.617.336,00 atau 1,10% dari total anggaran kesehatan;
 - d) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Rp633.585.022,00 atau 0,03% dari total anggaran kesehatan; dan
 - e) program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp625.832.118.072,00 atau 31,84% dari total anggaran kesehatan.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal Rp137.832.178.447,00 atau 11% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

- 2) Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan penyediaan anggaran untuk penurunan *Prevalensi Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan prevalensi kekurangan (*underweight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita Rp151.859.510.682,00 atau 12,57% dari total anggaran kesehatan dengan berpedoman pada butir E.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
- Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah RAPBD TA 2024
1	Total Belanja Daerah	9.642.818.303.787,00
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	894.386.650.239,00
	b) belanja bantuan keuangan	613.332.202.709,00
	Jumlah (a+b)	1.507.718.852.948,00
3	Selisih (1-2)	8.135.099.450.839,00
4	Minimal Belanja Infrastuktur Pelayanan Publik (40% X Selisih)	3.254.039.780.335,60

No	Komponen Perhitungan	Jumlah RAPBD TA 2024
1	a) Belanja Modal	2.215.666.563.494,00
	1) Tanah	409.955.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	199.855.122.309,00
	3) Bangunan dan Gedung	864.920.584.227,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	726.856.884.152,00
	5) Aset tetap lainnya	13.691.237.806,00
	6) Aset lainnya	387.735.000,00
	b) Belanja pemeliharaan	119.063.262.065,00
2	a) Belanja Hibah	1.362.634.619.410,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	613.332.202.709,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	4.311.823.147.678,00

Berdasarkan Tabel 11 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp4.311.823.147.678,00 atau 53% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Tabel E.3 Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus mengupayakan pengalokasian anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Terhadap komponen perhitungan yang masih mencantumkan Belanja Bantuan Keuangan sebagai komponen perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, agar disesuaikan kembali.

Pemerintah Kabupaten Badung harus mempertahankan upaya pengalokasian anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp41.992.196.861,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja Gaji dan tunjangan pada Inspektorat sebesar Rp9.456.068.460,00 atau 0,10% dari total belanja daerah;
- 2) Alokasi belanja Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp32.536.128.401,00 atau 0,34% dari total belanja daerah yang diuraikan pada:
 - a) program penyelenggaraan pengawasan dianggarkan sebesar Rp1.029.393.390,00;
 - b) program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dianggarkan sebesar Rp2.702.547.182,00; dan
 - c) program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di luar belanja Gaji dan tunjangan Rp28.804.187.829,00.

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada inspektorat dan di atas Rp15.000.000.000,00.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada

Inspektorat sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan di atas Rp15.000.000.000,00, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

(1) kegiatan pengawasan, yaitu:

- (a) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
- (b) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
- (c) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- (d) reviu laporan keuangan;
- (e) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- (f) sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan

- (g) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- (h) peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan
- (i) sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang Pendidikan dan Pelatihan, antara lain tercantum pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp15.562.625.932,00 atau 0,16% dari total belanja daerah telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung agar memenuhi alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan dan diarahkan hanya untuk berbagai program

pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Badung tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

8. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran TP-PKK dianggarkan pada sub kegiatan Rp3.334.091.116,00 atau 0,035% dari total belanja daerah yang diuraikan pada kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga *ann trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi

rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/ Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan pendidikan dan keterampilan;
 - f) kesehatan;
 - g) pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - h) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - i) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 8) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran untuk Forkompinda Rp338.197.283.000,00 atau 0,004% dari total Belanja Daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir E.2.v.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp400.985.200,00 atau 0,004% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pemerintah Kabupaten Badung harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.v.b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp157.318.456.559,00 atau 4,17% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah

Rp3.770.912.397.882,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 belum memenuhi persentase alokasi anggaran belanja daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus meningkatkan alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.5).a) Lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp5.258.362.772,00 atau 0,05% dari total belanja daerah,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Badung agar menganggarkan dukungan pendanaan program Paskibraka pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan program paskibraka, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud butir E.2.aj Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi anggaran Penanganan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dianggarkan sebesar Rp893.952.217.176,00 atau 9,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

selanjutnya, alokasi belanja dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem dimaksud antara lain:

- 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Badung agar mensinkronisasikan program Pemerintah Daerah dengan program pemerintah pusat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk sinkronisasi data penerima program supaya data dimaksud tidak tumpang tindih.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- a) rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - b) pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - c) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
 - d) pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; dan
 - e) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
 - 4) memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 - 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.2) dan butir E.2.ak Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Alokasi anggaran Peningkatan Investasi

Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan investasi sebesar Rp11.620.475.880,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada Sub kegiatan:

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya Rp134.819.800,00;
- 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Rp293.713.200,00;
- 3) Pengawasan Penanaman Modal Rp40.877.800,00;
- 4) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Rp547.213,200,00;

- 5) Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Rp7.918.419.280,00; dan
- 6) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Rp2.685.432.600,00.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tetap mengarah kepada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama peningkatan investasi antara lain:

- 1) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS); dan
- 2) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.

sebagaimana ditegaskan pada butir C.1.m.2).d) dan butir E.2.ad.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

9. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.199.368.200.373,00 atau 74,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.847.346.854.099,00 atau 26,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer Pusat ke Daerah yang telah ditentukan penggunaannya sebesar

Rp2.418.159.263.301,00 atau 25,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer Pusat ke Daerah yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus mempertahankan konsistensi pengalokasian belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.1).f). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, sehingga batas akhir Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan belanja pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer Pusat ke Daerah yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

- 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.114.855.129.968,00 atau 11,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam maksud butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

- (1) belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp59.134.928.665,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1	2	3
1.	Penerimaan	
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	831.936.595.703,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	62.591.563.062,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.040.000.086,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.833.061.784,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.990.753.357,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.086.382.771.668,00
2.	Jumlah Belanja	2.039.774.745.660,00
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	81.590.989.826,40
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	59.134.928.665,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(22.456.061.161,40)

Berdasarkan Tabel 12 tersebut, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp81.590.989.826,40 atau terdapat selisih kurang Rp22.456.061.161,40.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp103.211.684,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1.	Penerimaan	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	932.190.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	116.209.800,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.351.675.500,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.366.950,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00
2.	Jumlah Belanja	2.551.442.250,00
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	102.057.690,00
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	103.211.684,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	1.153.994,00

Berdasarkan Tabel 13 tersebut, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp102.057.690,00 atau terdapat selisih lebih Rp1.153.994,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (3) belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp5.672.400,00, uang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 (Rp)
1.	Penerimaan	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.425.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.158.468,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	110.565.000,00
2.	Jumlah Belanja	181.148.468,00
3.	Iuran yang harus dibayarkan (jumlah Penerimaan x 4%)	7.245.938,72
4.	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.000.000,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(1.245.938,72)

Berdasarkan Tabel 14 tersebut, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp7.245.938,72 atau terdapat selisih kurang Rp1.245.938,72.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

- (a) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp1.460.673.303,00; dan
- (b) belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp3.999.085.475,00.

belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

- (a) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp1.996.647.829,69, atau terdapat selisih kurang Rp535.974.526,69; dan
- (b) belanja iuran jaminan kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp5.989.943.489,06 atau terdapat selisih kurang Rp1.990.858.014,06.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6).

- (2) Penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

- (a) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH Rp200.000,00;
- (b) belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH Rp400.000,00;
- (c) belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp6.000.000,00; dan
- (d) belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp12.000.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir C.3.a.1).h).(6).

- (3) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp6.464.619.928,00, yang diuraikan pada:

- a) belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sebesar Rp5.172.702.135,00; dan

- b) belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sebesar Rp1.291.917.793,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/S tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir E.2.ac. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp45.375.656.934,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) belanja uang representasi DPRD sebesar Rp932.190.000,00 dalam Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Uang Representasi DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2024			
	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2.	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3.	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	37	1.575.000,00	58.275.000,00

1	2	3	4	5
4.	Jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota	40	5.355.000,00	63.735.000,00
5.	Uang representasi x 14 Bulan)			892.290.000,00
6.	Alokasi Uang Representasi pada APBD TA 2024			932.190.000,00
Selisih (angka 6 - angka 5)				39.900.000,00

Berdasarkan Tabel 15 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, mengingat besaran alokasi Belanja Representasi DPRD seharusnya Rp892.290.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp39.900.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar menyesuaikan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.351.675.500,00 dalam Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi;

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Badung agar mempertahankan konsistensi alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp151.366.950,00 dianggarkan dalam Rancangan peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (4) belanja tunjangan komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.570.100.000,00 dalam Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	40	14.700.000,00	7.056.000.000,00
2.	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD TA 2024			8.570.100.000,00
3.	Selisih (angka 2 - angka 1)			1.514.100.000,00

Berdasarkan Tabel 16 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, seharusnya Rp7.056.000.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp1.514.100.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar menyesuaikan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp1.852.200.000,00 dalam Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD sangat tinggi)	40	14.700.000,00	1.764.000.000,00
2.	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD TA 2024			1.852.000.000,00
	Selisih (angka 2 - angka 1)			88.000.000,00

Berdasarkan Tabel 17 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, seharusnya Rp1.764.000.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp88.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar menyesuaikan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (6) penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja:
- (a) belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp22.305.600.000,00; dan
 - (b) belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp9.361.200.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp372.960.000,00 dalam Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2024		Jumlah (Rp)
1.	Ketua DPRD	6 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 Bulan	151.200.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	4 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	161.280.000,00
3.	Jumlah Dana Operasional		312.480.000,00
4.	Alokasi Dana Operasional pada APBD		372.960.000,00
5.	Selisih (angka 4 - angka 3)		60.480.000,00

Berdasarkan Tabel 18 tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 seharusnya Rp312.480.000,00 dari alokasi anggaran yang di rencanakan sehingga terdapat selisih lebih Rp60.480.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar menyesuaikan dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp12.874.629.825,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp12.874.629.825,19.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN
Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp1.086.382.771.668,00 atau 11,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
- a) belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp611.230.351.895,00;
 - b) belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp66.806.971.413,00;
 - c) belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp383.397.872,00; dan
 - d) belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp407.962.050.488,00.
- dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati Badung dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Badung juga memperhatikan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.1).h).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp262.842.067.038,00 atau 2,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp155.875.822.452,00;
- b) belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp1.641.196.586,00;
- c) belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp93.035.339.000,00;
- d) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp4.166.009.000,00;
- e) belanja Honorarium sebesar Rp50.700.000,00; dan
- f) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp8.073.000.000,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.5).a).(5).(e).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 7) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp533.326.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan penganggaran belanja intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung agar mengalokasikan belanja dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.955.443.123.388,00 atau 20,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta bertujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha dan meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan butir C.3.a.2).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain:

1) Belanja Barang sebesar Rp414.259.318.581,00 atau 4,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain:

- a) belanja barang pakai habis sebesar Rp414.025.935.531,00 atau 4,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp3.339.336.936,00;
 - (2) belanja bahan-bahan kimia sebesar Rp9.620.252.372,00;
 - (3) belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp61.259.293.804,00;
 - (4) belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebesar Rp2.662.412.276,00;
 - (5) belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp18.024.268.521,00;
 - (6) belanja suku cadang-suku cadang alat besar sebesar Rp2.689.130.000,00;
 - (7) belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebesar Rp1.115.613.950,00;
 - (8) belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian sebesar Rp897.166.191,00;
 - (9) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp4.019.809.872,00;
 - (10) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebesar Rp1.913.322.764,00;
 - (11) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp15.767.227.693,00;
 - (12) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp602.566.134,00;
 - (13) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp4.369.741.741,00;
 - (14) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp5.625.480.585,00;
 - (15) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebesar Rp18.415.026.555,00;
 - (16) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebesar Rp31.214.093.421,00;

- (17) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga sebesar Rp4.088.195.145,00;
- (18) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata sebesar Rp7.024.700.761,00;
- (19) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp21.732.113.497,00;
- (20) belanja obat-obatan-obat sebesar Rp33.118.170.804,00;
- (21) belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebesar Rp1.549.116.121,00;
- (22) belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp62.787.154.518,00;
- (23) belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp28.212.321.800,00;
- (24) belanja persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga sebesar Rp1.525.000.000,00;
- (25) belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp4.272.104.313,00;
- (26) belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp2.318.217.800,00;
- (27) belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp23.677.767.725,00;
- (28) belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp4.395.837.284,00;
- (29) belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp2.463.599.000,00;
- (30) belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp14.878.265.807,00;
- (31) belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp1.981.420.000,00;
- (32) belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp968.601.837,00;
- (33) belanja pakaian penyelamatan sebesar Rp1.685.596.000,00;
- (34) belanja pakaian adat daerah sebesar Rp2.362.490.421,00;
- (35) belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp1.581.910.000,00;
- (36) belanja pakaian olahraga sebesar Rp7.868.904.783,00; dan
- (37) belanja pakaian paskibraka sebesar Rp1.067.798.600,00.

b) belanja barang tak habis pakai sebesar Rp233.383.050,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) belanja komponen-komponen rambu-rambu sebesar Rp159.562.500,00; dan
- (2) belanja pipa-pipa lainnya sebesar Rp73.820.550,00.

dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).2).c).(1).(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebagaimana butir 1).a).(22) dan butir 1).a).(23) di atas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (19) belanja jasa tenaga sopir sebesar Rp12.531.171.852,00;
- (20) belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp5.123.450.000,00;
- (21) belanja jasa tata rias sebesar Rp1.215.000.000,00;
- (22) belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp3.318.960.000,00;
- (23) belanja jasa pelayanan kearsipan sebesar Rp579.600.000,00;
- (24) belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp11.297.686.219,00;
- (25) belanja jasa kalibrasi sebesar Rp848.436.000,00;
- (26) belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp9.795.911.956,00;
- (27) belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp4.329.117.505,00;
- (28) belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp20.151.499.040,00;
- (29) belanja tagihan telepon sebesar Rp3.513.781.750,00;
- (30) belanja tagihan air sebesar Rp7.246.566.120,00;
- (31) belanja tagihan listrik sebesar Rp74.135.160.442,00;
- (32) belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp3.737.841.652,00;
- (33) belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp32.768.316.400,00;
- (34) belanja penambahan daya sebesar Rp588.186.100,00;
- (35) belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp1.929.498.060,00; dan
- (36) belanja *medical check up* sebesar Rp311.442.000,00.

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan sub kegiatan dimaksud sebagaimana butir C.3.a.2).c).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan juga pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b) belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp148.615.865.508,00 atau 1,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (1) belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.062.000.000,00;
 - (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3 sebesar Rp117.490.111.200,00;
 - (3) belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3 sebesar Rp1.379.380.800,00;
 - (4) belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn sebesar Rp12.649.027.484,00;
 - (5) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebesar Rp5.213.427.588,00;
 - (6) belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebesar Rp4.121.918.436,00;
 - (7) belanja asuransi barang milik Daerah Rp2.500.000.000,00; dan
 - (8) belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS sebesar Rp4.200.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Badung agar memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tanggal 23 September 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.

- 3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- a) belanja sewa tanah sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam;
 - b) belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp50.884.040.200,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja sewa *excavator* sebesar Rp841.000.000,00;
 - (2) belanja sewa *asphalt equipment* sebesar Rp56.000.0000,00;
 - (3) belanja sewa alat besar darat lainnya sebesar Rp11.416.958.560,00;
 - (4) belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp16.621.853.312,00;
 - (5) belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp15.546.850.000,00;
 - (6) belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp266.141.500,00;
 - (7) belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp5.014.815.744,00;
 - (8) belanja sewa mebel sebesar Rp996.792.285,00; dan
 - (9) belanja sewa elektrik sebesar Rp30.200.000,00.
 - c) belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp5.558.177.591,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja sewa bangunan gudang sebesar Rp180.000.000,00;
 - (2) belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp1.489.875.000,00;

- (3) belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp1.659.574.600,00;
 - (4) belanja sewa taman sebesar Rp1.193.082.991,00; dan
 - (5) belanja sewa hotel sebesar Rp841.860.000,00.
- d) belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp2.081.887.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) belanja sewa audio visual sebesar Rp251.970.000,00;
 - (2) belanja sewa alat peraga kesenian sebesar Rp448.800.000,00;
 - (3) belanja sewa barang bercorak kesenian Lainnya sebesar Rp1.175.545.000,00; dan
 - (4) belanja sewa tanaman sebesar Rp205.572.000,00.
- e) belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp200.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.8).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp11.342.908.207,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp200.000.000,00;
 - (2) belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain interior sebesar Rp450.000.000,00;
 - (3) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik sebesar Rp24.370.272,00;
 - (4) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp2.595.534.115,00;
 - (5) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - (6) belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp4.665.235.720,00;
 - (7) belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebesar Rp219.699.100,00;
 - (8) belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp100.000.000,00; dan
 - (9) belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan sebesar Rp1.088.069.000,00.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam menganggarkan jasa konsultasi konstruksi agar mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

Pemerintah Kabupaten Badung dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan Peraturan

Tahun 2023, serta memperhatikan juga pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b) belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp148.615.865.508,00 atau 1,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (1) belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.062.000.000,00;
 - (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3 sebesar Rp117.490.111.200,00;
 - (3) belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3 sebesar Rp1.379.380.800,00;
 - (4) belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn sebesar Rp12.649.027.484,00;
 - (5) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebesar Rp5.213.427.588,00;
 - (6) belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebesar Rp4.121.918.436,00;
 - (7) belanja asuransi barang milik Daerah Rp2.500.000.000,00; dan
 - (8) belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS sebesar Rp4.200.000.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir c.3.a.2).c).(2).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d) Belanja Jasa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp392.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebesar Rp95.500.000,00;

(1) beasiswa tugas belajar S2 sebesar Rp127.500.000,00; dan

(2) beasiswa tugas belajar S3 sebesar Rp169.000.000,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan sebagaimana dimaksud pada butir c.3.a.2).c).(2).(i).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp18.866.008.193,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp12.902.122.193,00;

(2) belanja sosialisasi sebesar Rp200.000.000,00;

(3) belanja bimbingan teknis sebesar Rp2.105.060.000,00; dan

(4) belanja diklat kepemimpinan sebesar Rp3.658.826.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Badung sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).ii dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- f) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebesar Rp200.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- 5) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp119.063.262.065,00 atau 1,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp68.153.610.217,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebesar Rp2.036.750.600,00;
 - (2) belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader sebesar Rp1.225.451.000,00;
 - (3) belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sebesar Rp204.795.000,00;
 - (4) belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sebesar Rp2.588.844.352,00;
 - (5) belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebesar Rp156.921.300,00;
 - (6) belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebesar Rp11.940.000,00;
 - (7) belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebesar Rp22.215.000,00;
 - (8) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp14.168.222.700;
 - (9) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp14.673.620.454,00;

- (10) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp41.740.000,00;
- (11) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp4.907.476.300,00;
- (12) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebesar Rp19.209.000,00;
- (13) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebesar Rp2.794.159.500,00;
- (14) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebesar Rp4.160.000;
- (15) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sebesar Rp1.365.000,00;
- (16) belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp177.060.000,00;
- (17) belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sebesar Rp19.980.000,00;
- (18) belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp19.260.000,00;
- (19) belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp103.306.200,00;
- (20) belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ ikan/ternak sebesar Rp38.000.000,00;
- (21) belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat processing sebesar Rp917.096.200,00;
- (22) belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan sebesar Rp161.440.000,00;
- (23) belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sebesar Rp2.352.375,00;
- (24) belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp5.000.000,00;
- (25) belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp2.548.983.396,00;
- (26) belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebesar Rp365.134.000,00;

- (27) belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp606.082.600,00;
- (28) belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp1.000.000,00;
- (29) belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebesar Rp123.064.500,00;
- (30) belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sebesar Rp62.713.000,00;
- (31) belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebesar Rp1.425.353.400,00;
- (32) belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sebesar Rp285.000.000,00;
- (33) belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sebesar Rp5.027.000,00;
- (34) belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sebesar Rp6.592.000,00;
- (35) belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebesar Rp36.744.000,00;
- (36) belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebesar Rp753.454.900,00;
- (37) belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sebesar Rp235.839.000,00;
- (38) belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sebesar Rp6.617.380,00;
- (39) belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebesar Rp293.885.152,00;
- (40) belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebesar Rp699.624.700,00;
- (41) belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe sebesar Rp367.996.500,00;
- (42) belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebesar Rp190.470.000,00;
- (43) belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sebesar Rp12.492.210.144,00;

- (44) belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebesar Rp2.546.738.564,00;
- (45) belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya sebesar Rp2.000.000,00;
- (46) belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian sebesar Rp2.000.000,00;
- (47) belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air sebesar Rp22.500.000,00;
- (48) belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebesar Rp468.967.000,00;
- (49) belanja pemeliharaan rambu-rambu- rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sebesar Rp112.043.000,00; dan
- (50) belanja pemeliharaan rambu-rambu- rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp193.205.000,00;
- b) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.518.130.880,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp13.637.274.848,00;
 - (2) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp9.398.980.758,00;
 - (3) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebesar Rp65.934.000,00;
 - (4) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sebesar Rp199.800.000,00;
 - (5) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebesar Rp27.472.500,00;
 - (6) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp77.076.906,00;
 - (7) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp28.220.000,00;
 - (8) belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp2.383.800.000,00; dan

- (9) belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/ prasasti lainnya sebesar Rp199.000.000,00;
- c) belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp24.848.261.336,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebesar Rp15.806.400.800,00;
 - (2) belanja pemeliharaan jalan dan jembatan- jalan-jalan lainnya sebesar Rp7.177.449.186,00;
 - (3) belanja pemeliharaan jalan dan jembatan- jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp670.857.000,00;
 - (4) belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp1.039.129.400,00;
 - (5) belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebesar Rp5.600.000,00; dan
 - (6) belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebesar Rp148.824.950,00.
- d) belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp25.350.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik;
- e) belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp18.481.500,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-*Software*,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, butir C.3.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 6) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp104.899.254.390,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja
 - a) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar 97.633.449.790,00 atau 1,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp83.544.316.140,00;
 - (2) belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp9.760.808.400,00;
 - (3) belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp4.187.962.250,00; dan
 - (4) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp140.363.000,00.
 - b) belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp7.265.804.600,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebesar Rp7.265.804.600,00.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud

sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Mengingat Pemerintah Kabupaten Badung belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain untuk pemenuhan anggaran dalam rangka pemenuhan alokasi belanja SPM, mengoptimalkan belanja infrastruktur publik, maka alokasi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut agar dirasionalisasi dan dialihkan untuk pemenuhan belanja mandatori dan mengoptimalkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a. Sekretariat Daerah sebesar Rp14.625.143.200,00 atau 2,19% dari total belanja pada Sekretariat Daerah; dan
- b. Sekretariat DPRD sebesar Rp41.995.112.580,00 atau 24,14% dari total belanja pada Sekretariat DPRD,

dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja wajib SPM, belanja untuk penanganan dampak inflasi dan memenuhi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp165.533.289.575,00 atau 1,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp27.165.226.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp5.308.226.000,00;
- (2) belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp11.412.500.000,00; dan
- (3) belanja uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar Rp10.444.500.000,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp138.368.063.575,00 atau 1,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp47.817.959.575,00; dan
- (2) belanja jasa yang diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp90.550.104.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD, dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah dapat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

- 8) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp80.035.741.173,00 atau 0,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp80.035.741.173,00 dan diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) belanja barang dan jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp78.080.741.173,00 dan
 - b) belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp1.955.000.000,00.
- 9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp192.775.299.477,00 atau 2,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Belanja Subsidi

Penganggaran Belanja Bunga sebesar Rp4.709.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) belanja subsidi kepada BUMN sebesar Rp4.401.000.000,00; dan
- 2) belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp308.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah sebesar Rp1.362.634.619.410,00 atau 14,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.358.585.909.410,00 atau 14,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp85.412.836.071,00;
- b) belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp1.266.465.180.250,00; dan
- c) belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp6.707.893.089,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.126.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan sebagai objek belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.126.500.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta butir C.3.a.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Badung sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan

dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.5).g).

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Partai Politik Rp4.048.710.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Badung mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan gubernur untuk Tingkat Kabupaten/Kota. sebagaimana maksud butir C.a.5).d).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Badung agar berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Badung belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti alokasi anggaran pengawasan 0,34%, seharusnya paling sedikit 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada inspektorat dan di atas Rp15.000.000.000,00 serta pemenuhan alokasi anggaran untuk iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN dan iuran jaminan kematian ASN untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan untuk hibah yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori seperti alokasi anggaran untuk iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN dan iuran jaminan kematian ASN, serta mengoptimalisasikan alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik, belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain urusan bidang pariwisata, kebudayaan dan lingkungan hidup khususnya pada program pengolahan sampah.

Pada Lampiran IIIa Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tercantum alokasi belanja hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Badung antara lain Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Terhadap belanja hibah dimaksud yang tidak menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Badung selaku pemberi hibah agar dipertimbangkan untuk tidak dianggarkan, sebagaimana diamanatkan dalam butir D.2.e.5).e).(3).(c). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang berbunyi:

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan, dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

10. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp22.215.666.563.494,00 atau 22,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Badung sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.8).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp409.955.000.000,00 atau 4,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja Belanja Modal Tanah sebesar Rp9.211.153.810,00 dan diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1) belanja modal tanah persil sebesar Rp206.642.500.000,00; dan

2) belanja modal lapangan sebesar Rp203.312.500.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp199.855.122.309,00 atau 2,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) belanja modal alat besar sebesar Rp25.890.809.495,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) belanja modal alat besar darat sebesar Rp25.258.597.230,00; dan

b) belanja modal alat bantu sebesar Rp632.212.265,00.

2) belanja modal alat angkutan sebesar Rp54.348.748.903,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp51.395.153.403,00;

b) belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp35.683.000,00; dan

c) belanja modal alat angkutan apung bermotor sebesar Rp2.640.412.500,00.

3) belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp612.078.802,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp39.718.020,00;

b) belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp57.698.100,00; dan

c) Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp514.662.682,00.

4) belanja modal alat pertanian sebesar Rp718.326.346,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp718.326.346,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp609.612.000,00;
 - b) belanja modal alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebesar Rp98.714.346; dan
 - c) belanja modal alat pasca panen sebesar Rp10.000.000,00.
- 5) belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp35.590.446.703,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja modal alat kantor sebesar Rp4.806.025.290,00;
 - b) belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp29.191.176.655,00; dan
 - c) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp1.593.244.758,00.
- 6) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp3.160.588.814,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja modal alat studio sebesar Rp3.160.588.814,00;
 - b) belanja modal alat komunikasi sebesar Rp1.577.674.800,00; dan
 - c) belanja modal alat pemancar sebesar Rp20.489.750,00.
- 7) belanja modal alat laboratorium sebesar Rp454.566.960,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp78.903.000,00; dan
 - b) belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp375.663.960,00.
- 8) belanja modal komputer sebesar Rp10.030.867.163,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja modal komputer unit sebesar Rp7.383.031.929,00; dan
 - b) belanja modal peralatan komputer sebesar Rp2.647.835.234,00.
- 9) belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp166.299.709,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Sumur sebesar Rp166.299.709,00;
- 10) belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp536.464.110,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) belanja modal alat deteksi sebesar Rp4.928.400,00;
 - b) belanja modal alat pelindung sebesar Rp5.118.210,00; dan
 - c) belanja modal alat SAR sebesar Rp526.417.500,00.
- 11) belanja modal alat peraga sebesar Rp300.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp300.000.000,00;

- 12) belanja modal rambu-rambu sebesar Rp19.999.528.200,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp19.999.528.200,00;
- 13) belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp9.456.200,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp9.456.200,00;
- 14) belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp8.124.300.021,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebesar Rp8.124.300.021,00;
- 15) belanja modal peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp7.023.997.777,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp7.023.997.777,00; dan
- 16) belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp31.290.478.556,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp31.290.478.556,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin wajib mengutamakan penggunaan Produksi Dalam Negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp864.920.584.227,00 atau 8,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) belanja modal bangunan gedung sebesar Rp862.920.584.227,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp862.920.584.227,00; dan

- 2) belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp2.000.000.000,00 yang hanya diuraikan kedalam rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp2.000.000.000,00.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp726.856.884.152,00 atau 7,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan kedalam rincian objek belanja:
 - 1) belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp672.762.161.012,00;
 - 2) belanja modal bangunan air sebesar Rp53.816.601.000,00; dan
 - 3) belanja modal instalasi sebesar Rp278.122.140,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.691.237.806,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja
 - 1) belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp197.219.000,00;
 - 2) belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp400.000.000,00; dan
 - 3) belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebesar Rp13.094.018.806,00.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp387.735.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp387.735.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dan butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Badung wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

11. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp72.086.033.246,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.c.1).b).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

12. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp1.507.718.852.948,00 atau 15,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. belanja bagi hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp894.386.650.239,00 atau 9,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- 1) belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp812.324.249.032,00; dan
- 2) belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp82.062.401.207,00.

Dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung, mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Badung sudah mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, serta

butir C.3.d.2).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp613.332.202.709,00 atau 6,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) belanja bantuan keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp228.952.030.238,00; dan
- 2) belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp384.380.172.471,00,

dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Badung sudah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.d.2).b).(9)) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.d.2).b).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Lampiran Vb Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024, terdapat nama penerima bantuan keuangan kepada Kabupaten Badung sendiri, untuk itu agar disesuaikan kembali mempedomani ketentuan pemberian bantuan keuangan sebagaimana butir C.3.d.2).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- C. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.885.655.068,00, sebagaimana Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
Pembiayaan Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		Persentase (%)	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi					
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6-5	8=6:5
Pembiayaan Daerah	155.624.738.291,00	155.624.738.291,40	100,00%	-30.714.144.000,00	51.885.655.068,00	82.599.799.068,00	-168,93%
Penerimaan Pembiayaan	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00%	372.960.000,00	101.885.655.068,00	101.512.695.068,00	27318,12%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00%	372.960.000,00	101.885.655.068,00	101.512.695.068,00	27318,12%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00	18.912.896.000,00	160,84%
Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00	18.912.896.000,00	160,84%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan
- Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp101.885.655.068,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp101.885.655.068,00 atau 1,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam rincian objek Penghematan Belanja.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud dalam butir C.4.b.2).b).(4).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).b).(4).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, Pemerintah Kabupaten Badung dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

IV. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD Serta KUA dan PPAS

- A. Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Badung dan DPRD Kabupaten Badung, dan telah disampaikan kepada Gubernur Bali, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

- B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD.

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	RAPED	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	194	4.385.927.613.562,00	132	8.306.807.437.205,00	132	9.692.818.303.787,00	132	9.692.818.303.787,00
2.	Jumlah Kegiatan			259	8.306.807.437.205,00	270	9.692.818.303.787,00	270	9.692.818.303.787,00
3.	Jumlah Sub Kegiatan			770	8.306.807.437.205,00	793	9.692.818.303.787,00	793	9.692.818.303.787,00

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung agar terus mempertahankan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat penambahan/perubahan jumlah kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA-PPAS, untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung agar mempedomani Bab IV butir A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

V. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut:

1. terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp4.385.927.613.562,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp9.692.818.303.787,00; dan
2. jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 194 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 132 program.

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Badung. Apabila hal tersebut disebabkan oleh Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung agar mengkonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

VI. Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- C. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, dan penambahan Sub kegiatan baru dalam RAPBD yang tidak tercantum dalam KUA dan PPAS perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

- D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- E. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu:
- 1) penanggulangan kemiskinan;
 - 2) peningkatan investasi;
 - 3) pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi;
 - 4) peningkatan penggunaan PDN; dan
 - 5) pengendalian inflasi.
- pengendalian inflasi antara lain:
- 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
 - 2) pengendalian laju alih fungsi lahan;
 - 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
 - 4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan
 - 5) pengawasan harga dan operasi pasar.
- sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ad.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- F. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a) rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - b) pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
 - c) pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
 - d) pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan
 - e) pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat;
 - a) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
 - 4) memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 - 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ak.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- G. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pemerintah Kabupaten Badung agar mengalokasikan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ hal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
- H. Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengendalian Inflasi mengalokasikan anggaran dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:
- 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
 - 2) pengendalian laju alih fungsi lahan;

- 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
- 4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan
- 5) pengawasan harga dan operasi pasar.

Selanjutnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait, dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui BTT yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.2).c) dan butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- I. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana" yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain:
 - a. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

sebagaimana maksud butir C.3.c.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

- J. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai Tahun 2022, pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.2.v Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Tahun 2024;

- K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Badung agar melakukan langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta melakukan pengadaan barang/ jasa dan belanja modal yang bersifat fisik pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- L. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Badung agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir C.3.c.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain:

1. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 2. pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 3. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- M. Pemerintah Kabupaten Badung dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
 2. peningkatan efektifitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

3. menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan didalam dan diluar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam dalam butir E.2.ap.72).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; dan
 4. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dalam butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- N. Pemerintah Kabupaten Badung harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah;
- O. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- P. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.ap.21) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- Q. Pemerintah Kabupaten Badung dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir Tahun 2024 sesuai amanat pada butir E.2.ab.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- R. Pemerintah Kabupaten Badung harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020;
- S. Dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, maka diperlukan dukungan alokasi anggaran guna percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Dukungan alokasi anggaran tersebut untuk Tahun Anggaran 2024 dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a0 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- T. Dalam rangka penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan penganekaragaman pangan dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 34) untuk memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi krisis pangan, diperlukan kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, antara lain:
- 1) penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) daerah;
 - 2) penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) daerah;
 - 3) koordinasi pelaksanaan intervensi pangan dan gizi;
 - 4) gerakan selamatkan pangan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pemborosan pangan (*food wasted*);

- 5) penyusunan kajian dan program kesiapsiagaan krisis pangan, yang dimutakhirkan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan
- 6) pelaksanaan program kesiapsiagaan Krisis Pangan, pelatihan dan geladi krisis pangan daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

pelaksanaan penjaminan keamanan pangan segar melalui pengawasan pre market dan post market, pembinaan kepada pelaku usaha pangan segar usaha kecil dan mikro, peningkatan kompetensi petugas pengawas keamanan pangan, peningkatan sarana prasarana pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan segar, pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal berbasis capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), melalui:

- 1) penyusunan skor PPH;
- 2) mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan;
- 3) pengembangan produk olahan pangan lokal; dan
- 4) penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal.

sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.ap.33), butir E.2.ap.34), butir E.2.ap.35), dan butir E.2.ap.36) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

U. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah antara lain:

1. penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

V. Pemerintah Kabupaten Badung juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan provinsi antara lain:

1. penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018;
2. perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9393 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019;

3. pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018;
 4. pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018;
 5. penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018;
 6. integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019;
 7. penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019;
 8. pengelolaan Keuangan Desa Adat sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019;
 9. pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019;
 10. pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019;
 11. kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020;
 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020;
 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020;
 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020; dan
 17. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021.
- W. Pemerintah Kabupaten Badung melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024;
- X. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Badung; dan

- Y. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1015/04-E/HK/2023, tanggal 6 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung dengan TAPD Kabupaten Badung tanggal 28 Desember 2023 disetujui bersama untuk diadakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Masa Jabatan 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG.

I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENYEMPURNAAN DAN
PENYESUAIAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000
	Jumlah Pendapatan	9.591.122.648.719
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.717.700.125
5.1.01	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710
5.1.04	Belanja Subsidi	6.413.200.000
5.1.05	Belanja Hibah	1.482.132.140.088
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000
5.2	BELANJA MODAL	2.108.154.868.789
5.2.01	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	821.569.087.712
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000

5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246
5.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388
	Jumlah Belanja	9.643.008.303.787
	Total Surplus/(Defisit)	(51.885.655.068)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	51.885.655.068
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	9.693.008.303.787


KETUA DPRD
KABUPATEN BADUNG
IPUTU PARWATA MAELEA KUSUMA



KABUPATEN BADUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314,00
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	9.591.122.648.719,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.717.700.125,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.413.200.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.108.154.868.789,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	9.643.008.303.787,00
	Total Surplus/(Defisit)	-51.885.655.068,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	51.885.655.068,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung




I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314,00
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	9.591.122.648.719,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.717.700.125,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.413.200.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.108.154.868.789,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	9.643.008.303.787,00
	Total Surplus/(Defisit)	-51.885.655.068,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	51.885.655.068,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung




I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	9.591.122.648.719,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.583.086.550.127,0 0	
4.1.01	Pajak Daerah	7.840.342.490.314,0 0	
4.1.02	Retribusi Daerah	318.077.331.209,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar SD		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.622.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	929.400.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.858.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	41.983.280.645,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.587.118.708,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.579.619.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.957.862.284,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.453.429.158,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.528.400,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	534.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.589.909.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.459.796.584,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.032.636.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.814.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.965.295.471,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.905.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.213.006.222,00	

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.880.528.307,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	269.823.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.871.671,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.754.165.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.850.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.702.516.369,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.384.500,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.459.156.134,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar SMP		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.485.850,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.844.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.337.306.502,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.420.950,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.702.118.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.104.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.921.074.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.996.461.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.309.880.310,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.309.956.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.253.200,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	454.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.073.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.106.402.460,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.526.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.130.684,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.792.045.702,00	
5.1.05	Belanja Hibah	11.752.125.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.911.293.799,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.613.490.499,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.721.186,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.415.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.766.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.161.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.565.984.464,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar TK		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.660.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	10.172.672.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.910.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.189.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.724.973.370,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.177.566,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.629.567.415,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.577.398,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.970.846,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.047.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.513.536,00	
5.1.05	Belanja Hibah	13.390.558.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.461.583,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.794.230,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.340.832,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.599.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.498.058,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.408.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.349.034.930,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.806.294,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)		
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.406.812,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.040.612,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.129.112,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.987.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	805.211.081.366,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.783.984,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.441.445,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.283.022,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	883.756.512,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.283.901,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.959.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.466.045,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.378.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.028.693,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.121.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.261.988,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.707.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.762.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.267.400,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.601.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.063.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.180.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.618.933.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.129.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.865.985.439,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.481.760,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.204.540.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.326.565.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.079.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.688.741.512,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.925.170.567,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.622.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.742.752,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.343.600,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.845.360,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.769.620,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.068.960,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.553.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.452.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	954.665.816,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.243.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.518.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.305.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.217.160,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.531.431.116,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.655.711,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.398.912,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.742.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.043.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.481.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.013.312,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.224.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.584.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.408.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.647.590.436,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.111.486.381,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.554.106.964,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.564.272.076,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.089.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.057.220,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.345.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.573.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.458.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.986.172.048,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.657.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.797.700,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.801.136,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.757.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.038.512,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu		
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.465.304,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.041.783.760,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.970.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.390.127.800,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.263.012,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi		

Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.671.900,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Indikator Keluaran	: Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan tersertifikasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.368.700,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.999.100,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKBM terbina Aktif		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.936.172,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat . Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.691.300,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.019.700,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.537.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.530.500,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	315.646.421.066,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.542.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.323.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.594.636.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.026.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.703.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	963.606.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.114.089.777,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.818.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.220.200,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.332.846.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.076.071.216,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.219.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.023.907.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.242.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.400.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.384.275.652,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.043.025.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.065.669.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.903.276.044,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	30.334.142.706,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.465.857.294,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	203.290.266.807,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.998.750.990,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	586.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.144.566.416,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.237.022.128,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0200 UPTD. Puskesmas Abiansemal I		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.815.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.481.706,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.018.294,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0300 UPTD. Puskesmas Abiansemal II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.882.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	78.510.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.377.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.909.411,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.090.589,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0400 UPTD. Puskesmas Abiansemal III		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.735.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.545.929,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.039.560,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0500 UPTD Puskesmas Abiansemal IV		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.969.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	77.815.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.633.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.128.375,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.074.546,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0600 UPTD. Puskesmas Kuta I		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		

Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.571.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar undefined		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.125.070,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.874.930,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0700 UPTD. Puskesmas Kuta II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.318.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.043.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.025.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.103.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.897.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0800 UPTD. Puskesmas Kuta Selatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.489.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	108.390.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.174.636.097,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.677.262,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0900 UPTD. Puskesmas Mengwi I		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.710.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	99.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.067.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.956.645.670,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.028.330,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1000 UPTD. Puskesmas Mengwi II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II) Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.752.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		

Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.778.220,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.432.979,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1100 UPTD. Puskesmas Mengwi III		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.722.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	77.355.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.298.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.289.397,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.116.800,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1200 UPTD. Puskesmas Petang I		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.450.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	67.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: undefined Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.746.272,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.253.728,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1300 UPTD. Puskesmas Petang II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.856.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	60.021.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.583.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Pelayanan BLUD sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653.148.969,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.091.031,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.1400 UPTD. Puskesmas Kuta Utara		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.888.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.539.087.361,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.402.728,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Persentase luas sawah beririgasi		
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berkondisi baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
Indikator Keluaran	: Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.618.584.763,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.646.600,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir		
Indikator Keluaran	: Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.756.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.262.166.502,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.077.635,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.383.293,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.352.177.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.854.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.018.974,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.525.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.663.443,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.574.399.453,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.091.601.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.106.848,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.546.725.297,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.504.774.873,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.529.318,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.241.745,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.029.468.015,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.927.867,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pengembangan sistim persampahan		
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.655.906.912,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.950.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.562.388,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.299.993.035,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.495.334,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung berkondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Persentase bangunan gedung berkondisi baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.485.166,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.381.392,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.288.943,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.078.183.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.837.945.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.905.791.714,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.988.180,00	
5.1.05	Belanja Hibah	841.849.288.998,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.985.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.664.073,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.339.341,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.448.480,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.886.335.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		

Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Diganti		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.873.117,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.650.528.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.015.724,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	203.312.500.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.954.476.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.978.572,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.691.345.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.049.312,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.098.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.769.324,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.159.571,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.098.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.724.195,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.081.466,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.665.749.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.949.023.073,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.600.743,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.941.851,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.521.958,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.702.836,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.143.955,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.239.617.372,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		

Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.533.870,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.323.637,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.149.525,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	118.784.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.348.527,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	173.490.400,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.204.889.940,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.354.337,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.351.840,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.344.949.764,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.640.381,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.636.199,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.464.090,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.579.700,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.837.716,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.933.574,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.865.346,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.723.655,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.331.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.512.809,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.700.576,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.504.160,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.732.838,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.792.256,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.991.192,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.156.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.803.738,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.483.453.671,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.775.930.372,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.426.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.230.000,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan		
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.977.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.591.806.370,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.296.576,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.256.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.084.337,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		
Kegiatan	: 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
Indikator Keluaran	: Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.107.884,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.816.704,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.885,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.190.844,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.562,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.611.998,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.003.095,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.489.508,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.285.282,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.101.354.882,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.448.166.399,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.787.432,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
Indikator Keluaran	: Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.719.831,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.572.643.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.553.290.155,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.663.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.825.690.877,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	815.354.101,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.663.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.393.333.540,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.472.712,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.038.100,00	
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.612.144,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.815.036,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.470.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.694.868,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.673.662,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.737.623,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.414.213.506,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.156,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.336.423,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.314.319,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	682.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.345.479,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.536.989,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.495.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.539.672,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.510.140,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.445.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.406.248,00	

Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.189.520,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	906.626.225,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.365.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.837.006,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.635.912,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.618.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.609.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.132.024,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		

Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.264.610,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.564.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.150.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.133.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.790.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.561.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penegakan Perda dan Perkada		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.590.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.205.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.271.236,00	

Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.509.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.284.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	36.647.108.569,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.025.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.339.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.649.450,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.242.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.451.409,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.760.127,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.195.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.568.654,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.123.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.750.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.838.056.435,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.314.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.269.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.674.239.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.874.800,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.651.033.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.516.912.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.834.200,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiiksa		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.642.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.206.100,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran		

Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.595.800,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.135.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.397.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.833.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.401.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.728.565.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.476.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.056.700,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	41.338.771.568,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.532.400,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.252.300,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.025.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.447.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.954.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.309.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.884.500,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.642.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.423.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	785.278.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.995.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.917.822.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		

Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.239.609,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.390.564,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.122.408,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.692.262,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.857.262,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.550.659,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.381.502.475,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.737.817,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.845.928,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.611.029,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.862.124,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Pasca Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.989.231,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.239.731,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.556.619,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.502.328,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.252,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.486.730,00	

Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.882.718.919,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.580.966,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.279.454,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.698.345,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.775.271.951,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.678.620,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.685.456,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.808.627,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.508.455,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.879.981,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.317.512,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.893.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.046.150,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial		
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.207.624,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.351.804.650,00	
5.1.05	Belanja Hibah	64.512.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.307.834,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.819.034,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.940.515,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.172.447,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.055.097,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.955.829,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.838.462.185,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.117,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.619.087,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.418.006,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.461.379.086,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	138.000.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana		
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.976.248,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.455.241,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.051.675,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.329.888,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.970.301.089,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.556.764,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.718.036,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.795.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.528,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.169.044,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.370.155,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.316.182,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.467.531,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.102.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.788.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.615.789,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya		
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.541.760.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.707.060,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.228.760,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.235.260,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.148.935.900,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.254.840,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlindungnya Hak-Hak Pekerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.187.716,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.954.200,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.270.816,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.473.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.056.632.700,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.251.200,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif		
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.180.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.886.200,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.814.800,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.841.280,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Kekerasan yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.480.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Indikator Hasil	: Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif		
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.888.600,00	
Kegiatan	: 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.175.880,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.588.200,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak		
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.901.330,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: Skor Kabupaten Layak Anak		
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.043.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.007.220,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.528.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.056.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.151.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.594.900,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
Kegiatan	: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.475.508,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.260.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.887.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	16.386.587.390,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.169.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.787.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.775.000,00	

Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.381.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.017.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.762.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.598.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.087.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.421.200,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.345.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.141.920,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.509.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan		
Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik		
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Beras		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.437.055.004,00	
5.1.05	Belanja Hibah	214.372.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan		
Indikator Keluaran	: Informasi Stok Pangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.215.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.692.948.011,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.414.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.780.336,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutahirkan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.248.200,00	
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)		
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.812.484,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah		
Program	: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.165,00	
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.801.364,00	
Program	: 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.251.287,00	
Kegiatan	: 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.546.575,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		

Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.188.402,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.403.097,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.011.381,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.653.201,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.653.201,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		

Indikator Hasil	: Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.995.557,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.575.683.896,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3		
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.847.913,00	
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.205.806,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		

Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.486,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.167.660,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		
Indikator Hasil	: Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
Kegiatan	: 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		
Sub Kegiatan	: 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.923,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		

Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.238.191,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.655.533,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.898.278,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Terkelolanya Persampahan		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.766.354,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.117,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.957.878.730,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.622.611.786,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang terdaur ulang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.114.727.679,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.752.441,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.547.085,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	39.895.901.028,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.494.256,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.222.043,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.345.978,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.679.892.284,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.993.612,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.428.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.757.350,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.107.050.395,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.198.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.461.952,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.890.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.671.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.302.180.724,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.478.720,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.520.568.660,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.545.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.570.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.300.500,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.458.477,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.626.725.592,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.451.879,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.886.758,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.431.545.522,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.355.723,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.846.692,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.265.104,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.359.857,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.225.438,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.351.115.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.309.910,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.804.747,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.180,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.700.719,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.073.116,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.932.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.721.855,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.990.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.910.849,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.324.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.999.176,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.769.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.664.680,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.274.025,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Penataan Desa		
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan penataan desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.616.900,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.206.142,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.517.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.639.300,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	192.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.058.052,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.086.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.954.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.368.800,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.685.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.815.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.666.875,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.145.778.116,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.351.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.042.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.592.400,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.863.357.737,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.713.400,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.484.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.800.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.842.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.840.800,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.997.532,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.057.116,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.997.600,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.264.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.874.252,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Total Fertility Rate (TFR)		
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.896.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.358.200,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.629.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		

Indikator Hasil	: Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Persentase Advokasi Komunikasi KIE		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.640.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.518.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.832.720,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.781.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.265.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.756.800,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.231.200,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Faskes yang Melayani KB		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.486.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.559.433,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung KB yang Dibina		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.898.160,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.200.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.209.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Persentase Kelompok yang Dibina		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.948.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.269.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.395.900.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
Kegiatan	: 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.259.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.809.095.359,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.671.202,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.208.177,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.514.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.703.371.608,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.371.230,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
Indikator Keluaran	: Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.265.845,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.059.576,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.027.784,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.722.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.231.992,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.259.550,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.329.100,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.300,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Indikator Keluaran	: Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.643.400,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.463.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.759.500,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.248.265,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan		
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.878.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.491.200,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	33.997.099.626,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.953.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.289.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.118.200,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.738.248,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.620.316,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.745.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.294.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.857.377.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.742.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.426.320,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.070.061.676,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.227.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.366.600.632,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.230.404,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.329.103.112,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.315.695,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	529.347.649,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.225.121,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.143.164,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.785.222.987,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.119.142,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.887.748,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Hubungan Media		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.887.726,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.555.534,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.920.344,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung		
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.470.745,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.370.674.291,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.702.112.243,00	
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.322.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.757.004.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.883.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.054.200,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika		
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.405.915,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.082.375,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	16.077.348.311,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.264.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.848.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.079.600,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.949.603,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.268.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.230.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.788.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.296.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.711.379,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.628.749,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	358.748.407,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.704.480,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.452.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.769.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.902.660,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.696.824,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
Indikator Hasil	: Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
Kegiatan	: 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.054.700,00	
Kegiatan	: 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.395.400,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi		
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.766.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.057.200,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksannya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.257.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.594.300,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian		
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.327.700,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		

Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.966.800,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan UMKM		
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas SDM UMKM		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.811.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.620.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.205.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.007.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.138.160,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.128.370,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan UMKM		
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.646.865,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.502.520,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)		
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.182.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.699.200,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	19.767.752.282,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.619.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.607.574,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.254.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.297.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.361.696,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.833.116,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.206.327,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.396.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.792.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.769.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.121.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.369.712,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		

Indikator Hasil	: Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)		
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.631.300,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase tersusunnya peta potensi investasi		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.222.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.143.800,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)		
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.363.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.405.600,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)		
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.131.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.098.612.152,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.236.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.066.400,00	

Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)		
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.819.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.713.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.877.800,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)		
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang terkelola dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.400.850,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)		
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.245.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.267.500,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.483.079.685,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.317.100,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPTSP		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.042.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.709.300,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.640.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.536.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.781.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.008.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.656.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.365.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.544.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.292.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.555.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.420.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.342.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.712.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.823.300,00	
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.832.656,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.986.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.579.772.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Cabang Olahraga		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.851.832,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.380.621.728,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.051.376.040,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	11.781.571.358,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.102.059.503,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.546.700,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan		

Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.045.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	959.660.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.081.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.945.860,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.083.700,00	

Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.750.890,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.924.825,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.112.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.872.580,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.936.865,00	

Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.600,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.094.800,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.288.740,00	
5.1.05	Belanja Hibah	17.880.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.636.473.400,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.989.634.627,00	
5.1.05	Belanja Hibah	69.805.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.649.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.802.564.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	10.001.157.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.909.658.620,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.564.998.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.275.854.540,00	
5.1.05	Belanja Hibah	9.381.534.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah		
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.630.326.340,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.938.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.467.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.415.500,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.827.860,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.462.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.068.550,00	
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.960.563.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.960.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.143.920,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.413.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.272.692,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.156.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.966.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.295.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.100,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.789.675.181,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.156.200,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.054.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.688.289,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.988.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.364.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.076.938,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.211.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.420.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.024.220,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.283.956,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.752.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.884.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.600.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Indek Pembangunan Literasi masyarakat		
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.806.940,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.693.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.822.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.171.272,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.125.180,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.939.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.440.840,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Indikator Hasil	: Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat		

Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.000.940,00	
Kegiatan	: 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.652.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.209.700,00	

Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	23.745.552.344,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.935.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.568.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.928.428,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.950.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.575.692,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.866.887,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.804.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.219.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.924.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.156.024,00	

Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.211.532,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.124.340,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.470.892,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis Yang diinput pada SIKN dan JIKN		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.165.072,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.889.372,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan		

Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.796.420,00	
Program	: 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		
Kegiatan	: 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan		
Sub Kegiatan	: 2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.283.533,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.572.396,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.842.064,00	

5.1.05	Belanja Hibah	1.248.600.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.606.307,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.682.456,00	
Kegiatan	: 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
Indikator Keluaran	: Jumlah TPI yang memberikan layanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.507.674,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.393.157,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.989.736,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.388.548,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.019.380,00	
5.1.05	Belanja Hibah	261.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.669.988,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari		
Kegiatan	: 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.837.147,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.807.616,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Produksi Olahan Hasil Perikanan		
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang termanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.925.752,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.763.318,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.999.915,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan		
Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.513.695,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.873.120,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.851.309.189,00	

Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.796.284,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.723.448,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.625.037,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.603.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.779.876,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.511.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.471.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.405.708,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.631.324,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.949.760,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.889.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.241.267,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.542.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.022.400,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		

Indikator Hasil	: Persentase DTW yang ditata		
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah daya tarik wisata yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.890.948,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan yang ditata		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.189.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.697.365.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.289.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.529.300,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah destinasi yang dikelola		

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.504.103.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.772.803.960,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.130.487.588,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.701.600,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)		
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.202.860,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0011 Kesiadaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.231.360,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.213.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.325.460,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.150.414.180,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.685.432.600,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Indikator Hasil	: Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang berpartisipasi		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.465.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.932.000,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang berpartisipasi		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.228.348,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.673.250,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.004.469,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.293.974,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)		
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.898.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.590.800,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	28.219.450.205,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah DTW yang memungut retribusi		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.136.132,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.513.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.655.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.793.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.532.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.372.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.222.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.796.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	999.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.793.790,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.419.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.324.287.844,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.949.284,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.494.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.065.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.264.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan		

Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)		
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.936.864.927,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.915.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	270.250.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.219.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.830.678.650,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	5.721.200.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	176.300.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.110.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.735.000,00	

Kegiatan	: 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.070.600,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.221.100,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.781.500,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.579.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	638.258.998,00	

Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Luas Tanam Padi		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.317.900,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.942.583.900,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.678.961.891,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.515.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.333.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.299.709,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.334.878.847,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.058.131,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.693,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.351.917.468,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan		
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.352.938.130,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.263.800,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.314.306,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.174.160,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulasi		
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulasi		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.122.652,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.828.160,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.512.413.348,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.688.703.170,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.723.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.162.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Nilai LKjIP		
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.258.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.535.869,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	47.858.013.568,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase (%) administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.082.870,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.739.369,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.530.607,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.439.147.479,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.938.359,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.802.917,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.128.718,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.566.714,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.218.372,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	967.853.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.636.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.296.759.020,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.221.656.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.200.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		

Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.942.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.798.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
Indikator Keluaran	: terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.053.400,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya data barang kebutuhan pokok dan barang penting		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.198.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.056.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.350.974,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.153.700,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung		
Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor		
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.689.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.973.200,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Persentase Perlindungan terhadap Konsumen		
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah UTTP yang di Tera dan mendapat pengawasan		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.761.104,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.635.600,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha		
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.006.100,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		

Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing		
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.222.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.940.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.066.268.764,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.700,00	
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha		
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIINas		
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.750.820,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase IKM yang terdata di SIINas		
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Informasi Industri yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.900,00	
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
Kegiatan	: 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.962.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.821.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.672.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.126.480,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.285.342.558,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.787.920,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.716.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.867.616,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.553.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.081.480,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.974.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.062.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	891.391.600,00	
BELANJA DAERAH			

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.278.579.761,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.875.024,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.177.363.951,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.235.794,00	
5.1.05	Belanja Hibah	423.627.615.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.734.606,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.689.116.632,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.774.906,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.379.876.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.245.892,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.292.808,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0002 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.551.159,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.012.806,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.010.759,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.843.097,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.829.324,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.161.280,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.234.976,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.261.462,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.381.309,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.991.208,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.577.560,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.613.991,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.131.528,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.355.976,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.854.842,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.665.494,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.949.754,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	87.633.292.328,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.976.903,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.356.634,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.797.384,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.647.078,00	

Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.777.104,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.204.913,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.231.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.711.297.927,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.367.800.409,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.848.090.890,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.890,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.601.863,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.103.951,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.543.440.584,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.786.026.484,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.617.969,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.127.775.612,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.632.976,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.023.170.945,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.064.838.613,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	696.306.410,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.715.574.344,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.328.895.824,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.797.451.542,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.874.629.825,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.976.284.630,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.311.703.584,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.640.990.370,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.133.092,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.783.506,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.594.915,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.117.723,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.552.333.463,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.196.170,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.186.573.008,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.682.864.374,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.018.769.031,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.060.492,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.172.158,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.198.744,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.422.075,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.357.254,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.601.342,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.794.193,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.535.248,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.956.982,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.595.792,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.948.925,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.325.554,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.472.166,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.969.130,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.236.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.590.209.823,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.319.459.981,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.474.635,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.170.704.241,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.697.127,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.363.308.899,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.394.489,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.510.568.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.567.027.487,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.886.721.039,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.939.024.070,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: cakupan layanan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.368.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.967.500,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.219.301.992,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.842,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.906.661,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.185.700,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.566.775,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.626.504,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.993.959,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.554.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.205.954.631,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.278.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.593.439,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.892.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.552.780,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.710.209.739,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.901.874.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.328.536,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.194.609.562,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.252.485.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.843.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.332.703,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.184.754.148,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.979.012,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	45.748.616.934,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.978.752.448,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.462.880,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.984.732,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.225.900,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.973.532,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.967.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.118.614,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.436.995,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.077.644,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.100.376,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.251.130,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.001.740,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.885.547,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.755.577,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.559,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.034.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.791.236,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.962.742,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.306.963,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.458.131,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.973.968,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.267.518,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.843.971,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.253.310,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.685.255,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.021.875,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.501.980,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.031.643,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.576.758,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.580.268,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.023.762,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.890.150,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.547.580,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.431.214,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.165.206,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.249.616,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.879.247,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.720.862,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.458.575,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.224.448.832,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.464,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.087.649,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.996.264,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.334.308,00	

Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.942.605,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.791.297,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.650.650,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.703.292,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.041.674,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.641.764,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.914.293,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.550.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.931.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		

Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.325.652,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.090.726,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.872.320,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.979.550,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.937.144,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.049.588.078,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.531.960,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.432.451,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.090,00	
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	48.342.578.199,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.235.426,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.920.604,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.757.854,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.190.781,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.323.931,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.537.561,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.694.938,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.756.644,00	
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	650.320.473.189,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.548.175,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.071.571,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.079.673,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.381.699,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.539.487,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.295.240,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.615.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.569.575.194,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.170.068,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.150.158,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.243.793,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.012.231,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.437.893,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.566.958,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.593.835,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.539,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.724.382,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	56.833.948.588,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.181.770,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.879.220,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.262.291,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.919.850,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.333.770.921,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.293.029,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.866.691,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.005.002,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.696.928,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.111.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.445.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.620.843,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.990.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.623.820,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.237.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.139.800,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Efektivitas pengelolaan pajak daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.291.303,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.064.678,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.333.322.010,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	881.052.444,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.808.539.662,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.312.487.698,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.119.001,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.135.084,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.889.925,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.291.117,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.457.496,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.839.096,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.747.795,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.027.304,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.861.568,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.271.835,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.375.001,00	

Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	205.897.571.725,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.397.810,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.409.887,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.255.473,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.943.060,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.848.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan pengadaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.372.568,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	866.194.605,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.426.600,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.444.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.662.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.008.452,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.722.908,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.800.248,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.246.202,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.558.308,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.791.300,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan mutasi dan promosi ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.403.636,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.181.680,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.104.649,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.937.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.485.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.994.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.131.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.824.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.533.500,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja. evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.569.361,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.569.361,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.936,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.654.296,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.376.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.616.400,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.044.130,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.462.692,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	23.000.221.932,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.091.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.254.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.536.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.454.800,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.812.400,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.379.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.975.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis		
Indikator Keluaran	: Persentase pengembangan kompetensi teknis		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.021.460,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.240.247.416,00	
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.595.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.529.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.503.672.300,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0003 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.538.512,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.402.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.855.060,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.731.100,00	

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.080.697,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.688.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.950.242,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.715.737,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.024.832,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.943.455,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.208.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.851.355,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.818.165,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.078.106,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.430.800,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.726.240,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.195.481.187,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.003.887.205,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.213.825,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.016.860,00	
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)		
Kegiatan	: 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.414.567,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.835.144.593,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.632.893,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.377.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.195.855,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.730.227,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: ketersediaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.303.456,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.314.804,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.519.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.901.416,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.974.720,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.649.064,00	

Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.844.375,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.069.192,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.610.968,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.376.563,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.753.589,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.432,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.195.658,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.983.722,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.222.458,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)		
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.098.421,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.207.553,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.812.291.549,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.949.659,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)		
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.039.042,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.133.476,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	33.456.306.755,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.309.460,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.878.780,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.518.520,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.743.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	714.143.142,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.596.401.572,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	751.470.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.942.708,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.329.634,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN		
Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah		
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.513.084,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang		

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: undefined		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: undefined		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.857.500,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.835.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.558.716,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.141.133,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.638.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.159.750,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.648.500,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.125.300,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.862.468,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.312.800,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.116.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.707.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.555.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.921.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.213.042.692,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.734.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.316.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.636.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.576.635,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.829.720,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.057.760,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.516.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.836.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.992.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.338.700,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.984.416,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.951.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.582.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.590.268.400,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.240.600,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.562.500,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.624.377,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.490.600,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.656.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.072.300,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.930.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.574.300,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.019.359.567,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.544.028,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.613.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.888.616,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.474.265,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.240.073,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.272.040,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.689.272,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.676.020,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.677.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.200.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.203.436,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.667.058.178,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.273.132,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.049.183,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.225.951.910,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.769.400,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.156.600,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.448.081,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.537.500,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.949.536,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.794.036,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.612.100,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.070.484,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.743.304,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.076.525.363,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.652.984,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.273.681.287,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.006.135,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.286.640,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.414.187.950,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.760.992.911,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.815.513,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.677.302.682,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.010.184,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.018.556,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.697.163,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.117.949,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.470.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.358.298.044,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.884.524,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.945.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.801.278,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.745.778.733,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1001 Kelurahan Kapal		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.366.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.741.483.222,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.355.375,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1002 Kelurahan Sempidi		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.196.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.454.485,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.339.366.307,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1003 Kelurahan Abianbase		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.566.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.429.300.609,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1004 Kelurahan Sading		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.116.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.658.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.108.198.434,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.1005 Kelurahan Lukluk		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.116.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.991.472,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.127.500,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.104.314,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.379.512.919,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.473.818,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.080.958,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.514.779.681,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.465.831,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.871.942,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.523.066,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.348.515,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.928.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.160.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.558.300,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.966.015,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.902.998,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.469.210.635,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.972.690,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	725.895.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.295.886,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.185.600,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.116.422.570,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.890.846,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.211.567,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.413.553.809,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.480.955,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.740.316,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.406.435,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.425.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.267.852,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.700.212,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.165.400,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.1001 Kelurahan Kerobokan Kelod		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.919.744,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.542.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.571.250,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.579.067,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.1002 Kelurahan Kerobokan Kaja		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.722.139,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.253.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.880.500,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.346.115,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.801.364,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.1003 Kelurahan Kerobokan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.434.768,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.702.975,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.458.440,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.138.499.060,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.975.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.466.352,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.553.699.484,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.456.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.636.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.476.775.560,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.503.500,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.308.100,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.906.400,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.961.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.311.200,00	

Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen dan Laporan pada perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.403.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	18.696.717.767,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.765.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.068.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.934.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.031.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.034.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah unit pengadaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.314.612.682,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	867.265.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.811.817,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.420.729.144,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.662.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.378.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.661.032,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.677.200,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.640.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.764.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.402.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.575.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1001 Kelurahan Tuban		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.474.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.038.347.230,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1002 Kelurahan Kuta		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.247.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.250.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.355.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.658.147.400,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1003 Kelurahan Kedonganan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.920.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.428.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.389.888.064,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1004 Kelurahan Legian		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	30.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.936.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.797.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.175.030,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.1005 Kelurahan Seminyak		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.865.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.113.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.419.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.217.200,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.132.100,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.688.480,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.230.681.744,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.438.775,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.764.938.886,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.825.900,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.756.480,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang,Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.761.010,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.374.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.322.691,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.014.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.729.600,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.393.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.610.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.253.943.149,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.906.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.532.355,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.019.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.808.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.871.689.770,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.963.364,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	875.022.990,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.018.424,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.843.196,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.642.996,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDaerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.374.320,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.728.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.910.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	751.005.145,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.1004 Kelurahan Benoa		

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.596.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.523.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.005.058,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.1005 Kelurahan Tanjung Benoa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.596.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.965.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.612.779.051,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.1006 Kelurahan Jimbaran		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.596.050,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.489.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.254.760,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.815.050,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.869.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.300,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.259.035.100,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: persentase tercapainya pelaksanaan bidang pendidikan politik, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.385.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	20.627.840.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.292.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.679.500,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik		
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.461.985.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.546.600,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Persentase pemberantasan penyakit masyarakat		

Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.779.900,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.666.290.832,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.985.200,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.400.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.532.900,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.643.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.066.400,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.853.095.744,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.688.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.869.600,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.791.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.125.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.584.900,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.974.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.510.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.885.655.068,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung




I NYOMAN GIRI PRASTA



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)								
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga											
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %									
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %									
1	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	159.614.000,00	0,00	0,00	159.614.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		
2	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.622.200,00	929.400.200,00	0,00	0,00	932.022.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	627.858.900,00	174.570.399.353,00	0,00	0,00	175.198.258.253,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
4	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah											
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	32 Paket	841.100,00	6.579.619.200,00	0,00	0,00	6.580.460.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
5	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	246 Paket	7.957.862.284,00	0,00	0,00	0,00	7.957.862.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan
6	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	9.453.429.158,00	0,00	0,00	0,00	9.453.429.158,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta Didik	584.528.400,00	0,00	0,00	0,00	584.528.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
9	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	2.589.909.200,00	0,00	0,00	0,00	2.589.909.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2789 Orang	67.459.796.584,00	0,00	0,00	0,00	67.459.796.584,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	246 Orang	1.032.636.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.636.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	55 Satuan Pendidikan	347.814.680,00	0,00	0,00	0,00	347.814.680,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
13	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	55.870.295.471,00	15.093.534.529,00	0,00	0,00	70.963.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	269.823.000,00	0,00	0,00	269.823.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
15	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	305.871.671,00	0,00	0,00	0,00	305.871.671,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 Paket	16.754.165.300,00	0,00	0,00	0,00	16.754.165.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	58.850.700,00	3.702.516.369,00	0,00	0,00	3.761.367.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	298 Satuan Pendidikan	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	15.384.500,00	4.459.156.134,00	0,00	0,00	4.474.540.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %							
20	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	14 Unit	704.485.850,00	199.181.806.502,00	0,00	0,00	199.886.292.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
21	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	103.420.950,00	25.702.118.200,00	0,00	0,00	25.805.539.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
22	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	7.104.000,00	3.921.074.700,00	0,00	0,00	3.928.178.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
23	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	0,00	2.996.461.600,00	0,00	0,00	2.996.461.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
24	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 Paket	5.309.880.310,00	4.309.956.600,00	0,00	0,00	9.619.836.910,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	313 Peserta Didik	485.753.200,00	0,00	0,00	0,00	485.753.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	0,00	156.925.000,00	0,00	0,00	156.925.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
27	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2068 Peserta Didik	951.073.400,00	0,00	0,00	0,00	951.073.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
28	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1071 Orang	22.106.402.460,00	0,00	0,00	0,00	22.106.402.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
29	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	1.115.526.100,00	0,00	0,00	0,00	1.115.526.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	166.130.684,00	0,00	0,00	0,00	166.130.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
31	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	47.544.170.702,00	6.524.784.298,00	0,00	0,00	54.068.955.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
32	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	141.721.186,00	1.415.500,00	0,00	0,00	143.136.686,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6290 Satuan Pendidikan	132.766.800,00	0,00	0,00	0,00	132.766.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
34	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	270 Orang	586.161.200,00	0,00	0,00	0,00	586.161.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	16.565.984.464,00	0,00	0,00	0,00	16.565.984.464,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %							
36	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	10.287.332.700,00	17.910.020.000,00	0,00	0,00	28.197.352.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
37	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	357 Paket	1.131.189.700,00	2.724.973.370,00	0,00	0,00	3.856.163.070,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	342 Peserta Didik	1.092.177.566,00	0,00	0,00	0,00	1.092.177.566,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
39	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	342 Peserta Didik	2.629.567.415,00	0,00	0,00	0,00	2.629.567.415,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	879.577.398,00	0,00	0,00	0,00	879.577.398,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	412.970.846,00	0,00	0,00	0,00	412.970.846,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
42	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	357 Satuan Pendidikan	118.047.950,00	0,00	0,00	0,00	118.047.950,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	292 Satuan Pendidikan	13.829.672.036,00	0,00	0,00	0,00	13.829.672.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD									
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	105.461.583,00	0,00	0,00	0,00	105.461.583,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
45	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	357 Dokumen	150.794.230,00	0,00	0,00	0,00	150.794.230,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
46	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	174.340.832,00	6.599.000.000,00	0,00	0,00	6.773.340.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
47	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1.024.498.058,00	0,00	0,00	0,00	1.024.498.058,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %							
48	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	1.375.442.930,00	0,00	0,00	0,00	1.375.442.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	69.806.294,00	0,00	0,00	0,00	69.806.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %							
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	77.63 Nilai							
50	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.406.812,00	0,00	0,00	0,00	7.406.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
51	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.040.612,00	0,00	0,00	0,00	11.040.612,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.129.112,00	0,00	0,00	0,00	15.129.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	29.987.400,00	0,00	0,00	0,00	29.987.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %							
54	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	805.211.081.366,00	0,00	0,00	0,00	805.211.081.366,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
55	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	103.783.984,00	2.441.445,00	0,00	0,00	106.225.429,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
56	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	851.283.022,00	0,00	0,00	0,00	851.283.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %							
57	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
58	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	883.756.512,00	0,00	0,00	0,00	883.756.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.283.901,00	0,00	0,00	0,00	37.283.901,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
60	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	509.959.200,00	0,00	0,00	0,00	509.959.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
61	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	379.466.045,00	0,00	0,00	0,00	379.466.045,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	346.378.400,00	0,00	0,00	0,00	346.378.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %							
63	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	134 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
64	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	389.028.693,00	0,00	0,00	389.028.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.121.600,00	0,00	0,00	0,00	151.121.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
66	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.601.261.988,00	0,00	0,00	0,00	1.601.261.988,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %							
67	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71.994.000,00	0,00	0,00	0,00	71.994.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
68	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	193 Unit	842.707.700,00	0,00	0,00	0,00	842.707.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
69	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	206.410.000,00	0,00	0,00	0,00	206.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
70	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	363.762.200,00	161.267.400,00	0,00	0,00	525.029.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %							
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %							
71	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor									
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	155.420.500,00	0,00	0,00	0,00	155.420.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
72	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula									
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	260 Orang	346.342.700,00	0,00	0,00	0,00	346.342.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	153.712.100,00	0,00	0,00	0,00	153.712.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda									
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	57.823.300,00	0,00	0,00	0,00	57.823.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	269.832.656,00	0,00	0,00	0,00	269.832.656,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %							
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %							
76	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3.854.758.800,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	8.854.758.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %							
77	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.860.851.832,00	0,00	0,00	0,00	1.860.851.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.380.621.728,00	0,00	0,00	0,00	19.380.621.728,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
79	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan									
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	115 Orang	2.051.376.040,00	0,00	0,00	0,00	2.051.376.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %							
80	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1221 Orang	11.781.571.358,00	0,00	0,00	0,00	11.781.571.358,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	100 %							
81	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi									
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	3.102.059.503,00	29.546.700,00	0,00	0,00	3.131.606.203,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %							
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %							
82	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	350.045.600,00	0,00	0,00	0,00	350.045.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	959.660.050,00	0,00	0,00	0,00	959.660.050,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
84	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	0,00	251.081.100,00	0,00	0,00	251.081.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	628.945.860,00	0,00	0,00	0,00	628.945.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %							
86	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas									
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	3.601.500,00	0,00	0,00	0,00	3.601.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas									
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	4.063.500,00	8.798.933.500,00	0,00	0,00	8.802.997.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
88	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
89	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	250.129.300,00	2.865.985.439,00	0,00	0,00	3.116.114.739,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	251.481.760,00	8.204.540.900,00	0,00	0,00	8.456.022.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
91	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2116 Unit	3.326.565.000,00	0,00	0,00	0,00	3.326.565.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
92	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit									
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	2.079.900,00	73.688.741.512,00	0,00	0,00	73.690.821.412,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
93	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	35.925.170.567,00	0,00	0,00	0,00	35.925.170.567,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
94	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	3.622.000,00	0,00	0,00	0,00	3.622.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
95	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	259.742.752,00	79.343.600,00	0,00	0,00	339.086.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %							
96	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11317 Orang	591.845.360,00	0,00	0,00	0,00	591.845.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
97	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10803 Orang	166.769.620,00	0,00	0,00	0,00	166.769.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
98	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10288 Orang	515.068.960,00	0,00	0,00	0,00	515.068.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
99	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33879 Orang	113.553.900,00	0,00	0,00	0,00	113.553.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
100	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27248 Orang	98.452.400,00	0,00	0,00	0,00	98.452.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
101	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337684 Orang	954.665.816,00	0,00	0,00	0,00	954.665.816,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
102	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79044 Orang	1.105.243.800,00	0,00	0,00	0,00	1.105.243.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
103	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8340 Orang	82.518.520,00	0,00	0,00	0,00	82.518.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
104	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2930 Orang	772.305.220,00	0,00	0,00	0,00	772.305.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
105	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	624 Orang	94.217.160,00	0,00	0,00	0,00	94.217.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4239 Orang	1.531.431.116,00	0,00	0,00	0,00	1.531.431.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
107	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17136 Orang	2.200.655.711,00	0,00	0,00	0,00	2.200.655.711,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
108	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	850.800,00	0,00	0,00	0,00	850.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
109	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	198.398.912,00	0,00	0,00	0,00	198.398.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
110	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	14.742.800,00	0,00	0,00	0,00	14.742.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
111	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	809.043.200,00	0,00	0,00	0,00	809.043.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
112	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	517.481.500,00	0,00	0,00	0,00	517.481.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
113	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	206.013.312,00	0,00	0,00	0,00	206.013.312,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
114	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	474.224.400,00	0,00	0,00	0,00	474.224.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
115	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	4.584.900,00	0,00	0,00	0,00	4.584.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
116	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	42785 Orang	157.408.000,00	0,00	0,00	0,00	157.408.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
117	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	744 Dokumen	18.759.076.817,00	0,00	0,00	0,00	18.759.076.817,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	29.554.106.964,00	0,00	0,00	0,00	29.554.106.964,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
119	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220 Dokumen	124.564.272.076,00	0,00	0,00	0,00	124.564.272.076,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
120	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah									
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2000 Orang	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
121	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	23.089.100,00	0,00	0,00	0,00	23.089.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
122	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	56.057.220,00	0,00	0,00	0,00	56.057.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
123	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
124	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	289.345.500,00	0,00	0,00	0,00	289.345.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
125	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
126	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	339.573.900,00	0,00	0,00	0,00	339.573.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
127	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	12.458.400,00	0,00	0,00	0,00	12.458.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
128	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	411.840.000,00	0,00	0,00	0,00	411.840.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
129	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1878 Orang	2.986.172.048,00	0,00	0,00	0,00	2.986.172.048,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
130	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	206 Orang	93.657.400,00	0,00	0,00	0,00	93.657.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
131	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	103.797.700,00	0,00	0,00	0,00	103.797.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %							
132	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 Dokumen	1.510.801.136,00	0,00	0,00	0,00	1.510.801.136,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	80 %							
133	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3 Unit	1.757.700,00	0,00	0,00	0,00	1.757.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
134	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	287.038.512,00	0,00	0,00	0,00	287.038.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %							
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2500 Dokumen	287.465.304,00	0,00	0,00	0,00	287.465.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100 %							
136	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	378 Orang	17.041.783.760,00	0,00	0,00	0,00	17.041.783.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
137	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	176.970.000,00	0,00	0,00	0,00	176.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	98 %							
138	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	1.390.127.800,00	0,00	0,00	0,00	1.390.127.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %							
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100 % 98 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	285 Dokumen	162.263.012,00	0,00	0,00	0,00	162.263.012,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi	94 % 100 %							
140	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	207.671.900,00	0,00	0,00	0,00	207.671.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan tersertifikasi	92 % 100 %							
141	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	78.368.700,00	0,00	0,00	0,00	78.368.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	100 % 94 %							
142	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12 Unit	177.999.100,00	0,00	0,00	0,00	177.999.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %							
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKBM terbina Aktif	5 dokumen 100 %							
143	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	1.815.936.172,00	0,00	0,00	0,00	1.815.936.172,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat . Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70 % 100 %							
144	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	388.691.300,00	0,00	0,00	0,00	388.691.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;	100 % 85 %							
145	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	30.019.700,00	0,00	0,00	0,00	30.019.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
146	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	617.537.600,00	0,00	0,00	0,00	617.537.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
147	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
148	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
149	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
150	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	9.530.500,00	0,00	0,00	0,00	9.530.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %							
151	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang/bulan	315.646.421.066,00	0,00	0,00	0,00	315.646.421.066,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %							
152	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %							
153	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	24.542.500,00	0,00	0,00	0,00	24.542.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
154	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.323.500,00	0,00	0,00	0,00	3.323.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
155	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %							
156	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
157	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	3.594.636.200,00	0,00	0,00	0,00	3.594.636.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
158	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	706.026.000,00	0,00	0,00	0,00	706.026.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
159	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	190.703.600,00	0,00	0,00	0,00	190.703.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
160	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
161	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %							
162	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	963.606.000,00	0,00	0,00	963.606.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
163	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	0,00	1.114.089.777,00	0,00	0,00	1.114.089.777,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
164	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
165	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	14.818.500,00	0,00	0,00	14.818.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
166	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %							
167	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	605.220.200,00	0,00	0,00	0,00	605.220.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
168	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.332.846.600,00	0,00	0,00	0,00	15.332.846.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
169	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.076.071.216,00	0,00	0,00	0,00	23.076.071.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %							
170	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	151.219.500,00	0,00	0,00	0,00	151.219.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
171	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	314 Unit	6.023.907.500,00	0,00	0,00	0,00	6.023.907.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
172	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	915.242.000,00	0,00	0,00	0,00	915.242.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
173	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	338.400.000,00	3.427.301.352,00	0,00	0,00	3.765.701.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
174	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % 100 %							
175	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Rumah Sakit Daerah Mangusada									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %							
176	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600 Unit	0,00	22.065.669.700,00	0,00	0,00	22.065.669.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
177	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	16.903.276.044,00	0,00	0,00	0,00	16.903.276.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	A 0,81							
178	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	167.800.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	184.800.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu	100 % 100 %							
179	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang/bulan	203.290.266.807,00	0,00	0,00	0,00	203.290.266.807,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %							
180	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	0,00	6.998.750.990,00	0,00	0,00	6.998.750.990,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
181	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	586.400.000,00	0,00	0,00	586.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
182	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	100 %							
183	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.144.566.416,00	0,00	0,00	0,00	17.144.566.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
184	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.237.022.128,00	0,00	0,00	0,00	12.237.022.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD. Puskesmas Abiansemal I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %							
185	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
186	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
187	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93280 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
188	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
189	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	633 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
190	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	538 Dokumen	169.680.000,00	0,00	0,00	0,00	169.680.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
191	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
192	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	9.840.000,00	0,00	0,00	0,00	9.840.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	197 Dokumen	117.900.000,00	0,00	0,00	0,00	117.900.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
194	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	133.815.000,00	0,00	0,00	0,00	133.815.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
195	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
196	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
197	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	564 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
198	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	33 Dokumen	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
199	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	139 Dokumen	106.900.000,00	0,00	0,00	0,00	106.900.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
200	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	853.000,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % 100 %							
201	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.525.481.706,00	119.018.294,00	0,00	0,00	1.644.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Abiansemal II									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %							
202	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
203	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
205	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2892 Orang	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
206	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1541 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
207	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
208	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	113 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
209	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	457 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
210	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.882.000,00	0,00	0,00	0,00	171.882.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
212	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
213	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
214	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	16.660.000,00	0,00	0,00	0,00	16.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
215	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
216	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00	107.700.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
217	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	134.887.000,00	0,00	0,00	0,00	134.887.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
218	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
219	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
220	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
221	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
222	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	74.900.000,00	0,00	0,00	0,00	74.900.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	12 Dokumen 70 %							
223	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %							
224	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	812.909.411,00	87.090.589,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Abiansemal III									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %							
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %							
225	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
226	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
227	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
228	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
230	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	152.052.000,00	0,00	0,00	0,00	152.052.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
231	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
232	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
233	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91.500.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
234	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	117.735.000,00	0,00	0,00	0,00	117.735.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
235	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	169 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
237	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
238	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
239	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	56.900.000,00	0,00	0,00	0,00	56.900.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
240	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 %							
241	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	991.545.929,00	118.039.560,00	0,00	0,00	1.109.585.489,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Puskesmas Abiansemal IV									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %							
242	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
243	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	28.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
244	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
245	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
246	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	179.969.000,00	0,00	0,00	0,00	179.969.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
247	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
248	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	107.400.000,00	0,00	0,00	0,00	107.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
250	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	133.449.000,00	0,00	0,00	0,00	133.449.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
251	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Orang	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
252	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
253	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	41.480.000,00	0,00	0,00	0,00	41.480.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
254	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
255	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %							
256	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	996.128.375,00	134.074.546,00	0,00	0,00	1.130.202.921,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Kuta I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 % undefined							
257	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1072 Orang	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
258	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
259	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
260	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
261	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
262	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
263	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
264	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
265	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	166.528.000,00	0,00	0,00	0,00	166.528.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
267	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
268	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
269	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
270	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
271	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
272	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	110.350.000,00	0,00	0,00	0,00	110.350.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
273	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	131.571.000,00	0,00	0,00	0,00	131.571.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
274	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	12.550.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
275	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
276	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
277	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
278	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
279	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
281	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	12.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % undefined							
282	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.303.125.070,00	336.874.930,00	0,00	0,00	1.640.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Kuta II									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	269 Orang	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
284	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	257 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
285	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
286	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	223 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
287	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1304 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
288	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	126.318.000,00	0,00	0,00	0,00	126.318.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
289	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
290	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
291	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	60.700.000,00	0,00	0,00	0,00	60.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
292	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	101.043.000,00	0,00	0,00	0,00	101.043.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
293	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
294	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
295	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
296	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1304 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
297	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
298	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	35.025.000,00	0,00	0,00	0,00	35.025.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
299	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
300	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %							
301	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	634.103.000,00	62.897.000,00	0,00	0,00	697.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	Lain-lain PAD Yang Sah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD. Puskesmas Kuta Selatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %							
302	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2854 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
303	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
304	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15109 Orang	87.600.000,00	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
305	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	896 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
306	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3217 Orang	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
307	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	260.489.000,00	0,00	0,00	0,00	260.489.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
308	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
309	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
310	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63 Dokumen	141.550.000,00	0,00	0,00	0,00	141.550.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
311	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	44 Dokumen	198.220.000,00	0,00	0,00	0,00	198.220.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
312	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
313	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
314	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	183 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
315	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1705 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
316	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	18 Dokumen	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
317	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	20 Dokumen	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
318	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
319	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	100 % undefined							
320	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.174.636.097,00	252.677.262,00	0,00	0,00	2.427.313.359,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Mengwi I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %							
321	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
322	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
323	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
324	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
325	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	231.710.000,00	0,00	0,00	0,00	231.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
326	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
327	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
328	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	166.950.000,00	0,00	0,00	0,00	166.950.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
329	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	180.067.000,00	0,00	0,00	0,00	180.067.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
330	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
332	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
333	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
334	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
335	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	101.100.000,00	0,00	0,00	0,00	101.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
336	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %							
337	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.956.645.670,00	343.028.330,00	0,00	0,00	2.299.674.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
		UPTD. Puskesmas Mengwi II									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II) Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III) Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
339	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
340	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	37.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
341	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
342	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
343	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	229.835.000,00	0,00	0,00	0,00	229.835.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
344	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
345	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
346	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	149.800.000,00	0,00	0,00	0,00	149.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
347	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	179.752.000,00	0,00	0,00	0,00	179.752.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
348	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
349	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
350	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
351	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
352	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	137.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
353	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %							
354	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.328.778.220,00	111.432.979,00	0,00	0,00	1.440.211.199,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Mengwi III									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %							
355	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	614 Orang	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
356	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
357	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2996 Orang	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
358	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
359	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	715 Orang	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
360	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	185.722.000,00	0,00	0,00	0,00	185.722.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
361	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
362	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	28.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
363	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	111.900.000,00	0,00	0,00	0,00	111.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
364	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	132.653.000,00	0,00	0,00	0,00	132.653.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
365	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	9.380.000,00	0,00	0,00	0,00	9.380.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
366	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
367	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
368	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
369	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
370	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	41.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
371	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %							
372	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	925.289.397,00	73.116.800,00	0,00	0,00	998.406.197,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Petang I									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 % undefined undefined							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined							
373	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
374	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266 Orang	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
375	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 Orang	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
376	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
377	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	371 Orang	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
378	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	171.782.000,00	0,00	0,00	0,00	171.782.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
379	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
380	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
381	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	92.450.000,00	0,00	0,00	0,00	92.450.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
382	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	132.478.000,00	0,00	0,00	0,00	132.478.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
383	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
384	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	44.550.000,00	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
385	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
386	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	undefined Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	undefined undefined 100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % undefined undefined							
388	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	667.746.272,00	112.253.728,00	0,00	0,00	780.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
		UPTD. Puskesmas Petang II									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	100 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %							
389	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
390	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1357 Orang	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
392	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	280 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
393	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	152.856.000,00	0,00	0,00	0,00	152.856.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
394	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
395	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
396	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	99.950.000,00	0,00	0,00	0,00	99.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
397	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	117.604.000,00	0,00	0,00	0,00	117.604.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
399	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
400	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
401	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	117.800.000,00	0,00	0,00	0,00	117.800.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
402	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersediannya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %							
403	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	653.148.969,00	107.091.031,00	0,00	0,00	760.240.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	Lain-lain PAD Yang Sah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD. Puskesmas Kuta Utara									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %							
404	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
405	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2047 Orang	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
406	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	60.800.000,00	0,00	0,00	0,00	60.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
407	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
408	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
409	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	230.888.000,00	0,00	0,00	0,00	230.888.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
410	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
411	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
412	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	164.750.000,00	0,00	0,00	0,00	164.750.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
413	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	178.975.000,00	0,00	0,00	0,00	178.975.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
414	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
415	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
416	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
417	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
418	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
419	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
420	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
421	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %							
422	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.539.087.361,00	166.402.728,00	0,00	0,00	1.705.490.089,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	97.25 %							
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik	100 %							
423	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	3.618.584.763,00	308.646.600,00	0,00	0,00	3.927.231.363,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
424	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir									
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	837.756.210,00	0,00	0,00	0,00	837.756.210,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
425	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir									
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	1.262.166.502,00	0,00	0,00	0,00	1.262.166.502,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
426	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi	[object Object]
427	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.1 KM	476.077.635,00	0,00	0,00	0,00	476.077.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
428	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	7,9 KM	27.383.293,00	98.352.177.000,00	0,00	0,00	98.379.560.293,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
429	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	605.854.140,00	0,00	0,00	0,00	605.854.140,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
430	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai									
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.05 KM	7.018.974,00	4.525.000.000,00	0,00	0,00	4.532.018.974,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %							
431	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.069 KM	570.663.443,00	19.425.000,00	0,00	0,00	590.088.443,00	Kab. Badung, Mengwi, Keheran Kab. Badung, Petang, Carangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
432	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	1.574.399.453,00	34.091.601.000,00	0,00	0,00	35.666.000.453,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
433	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,9 KM	8.106.848,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.708.106.848,00	Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
434	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.5 KM	10.546.725.297,00	0,00	0,00	0,00	10.546.725.297,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
435	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi									
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Bendung	1.504.774.873,00	0,00	0,00	0,00	1.504.774.873,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
436	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi									
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	30 DI	1.099.529.318,00	0,00	0,00	0,00	1.099.529.318,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
437	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	448.241.745,00	0,00	0,00	0,00	448.241.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.5 %							
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	2000 Unit	8.029.468.015,00	0,00	0,00	0,00	8.029.468.015,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
439	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	10 Dokumen	1.814.927.867,00	0,00	0,00	0,00	1.814.927.867,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75 %							
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan	100 %							
440	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	600 Ton/hari	3.655.906.912,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	5.605.906.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
441	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	1.410.562.388,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1.710.562.388,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97.75 %							
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	100 %							
442	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	600 M ³ /Hari	12.299.993.035,00	0,00	0,00	0,00	12.299.993.035,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
443	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	700.495.334,00	0,00	0,00	0,00	700.495.334,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %							
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %							
444	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	104.485.166,00	0,00	0,00	0,00	104.485.166,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
445	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	1.367.381.392,00	0,00	0,00	0,00	1.367.381.392,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
446	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	6.168.471.943,00	81.837.945.000,00	0,00	0,00	88.006.416.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	900 Dokumen	2.905.791.714,00	0,00	0,00	0,00	2.905.791.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %							
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100 %							
448	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	7 Kawasan	842.266.277.178,00	46.985.472.000,00	0,00	0,00	889.251.749.178,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
449	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	691.664.073,00	0,00	0,00	0,00	691.664.073,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
450	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %							
451	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan									
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	6 Dokumen	593.339.341,00	0,00	0,00	0,00	593.339.341,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
452	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	27 Dokumen	764.448.480,00	1.886.335.700,00	0,00	0,00	2.650.784.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
453	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	87,08 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
454	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Diganti	65 Jembatan	10.873.117,00	29.650.528.300,00	0,00	0,00	29.661.401.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
455	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
			Panjang Jalan yang Dibangun	11 KM	262.015.724,00	238.266.976.000,00	0,00	0,00	238.528.991.724,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	22 KM	19.978.572,00	24.691.345.700,00	0,00	0,00	24.711.324.272,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
457	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	5.049.312,00	11.098.000.000,00	0,00	0,00	11.103.049.312,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
458	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1582.27 Jembatan	792.769.324,00	0,00	0,00	0,00	792.769.324,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
459	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	6.159.571,00	17.098.000.000,00	0,00	0,00	17.104.159.571,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
460	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	809,59 KM	703.724.195,00	0,00	0,00	0,00	703.724.195,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
461	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	114.081.466,00	289.665.749.200,00	0,00	0,00	289.779.830.666,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
462	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	881.945 KM	19.949.023.073,00	0,00	0,00	0,00	19.949.023.073,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %							
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	181.600.743,00	0,00	0,00	0,00	181.600.743,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
464	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	8.941.851,00	0,00	0,00	0,00	8.941.851,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
465	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	230.521.958,00	0,00	0,00	0,00	230.521.958,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	100 %							
466	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	23.702.836,00	0,00	0,00	0,00	23.702.836,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
467	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	91.143.955,00	0,00	0,00	0,00	91.143.955,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	100 %							
468	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	1.239.617.372,00	0,00	0,00	0,00	1.239.617.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %							
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung	100 %							
469	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota									
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen	256.533.870,00	0,00	0,00	0,00	256.533.870,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
470	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang									
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	2.323.637,00	0,00	0,00	0,00	2.323.637,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	100 %							
471	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang									
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	18.149.525,00	118.784.600,00	0,00	0,00	136.934.125,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
472	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2.348.527,00	173.490.400,00	0,00	0,00	175.838.927,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	100 %							
473	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	1.204.889.940,00	0,00	0,00	0,00	1.204.889.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %							
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
474	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	140.354.337,00	0,00	0,00	0,00	140.354.337,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
475	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	48.351.840,00	0,00	0,00	0,00	48.351.840,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %							
476	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	26.344.949.764,00	0,00	0,00	0,00	26.344.949.764,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
477	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	96.640.381,00	0,00	0,00	0,00	96.640.381,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	89.636.199,00	0,00	0,00	0,00	89.636.199,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1.464.090,00	0,00	0,00	0,00	1.464.090,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
480	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	89.579.700,00	0,00	0,00	0,00	89.579.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %							
481	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	131.837.716,00	0,00	0,00	0,00	131.837.716,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %							
482	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.933.574,00	0,00	0,00	0,00	47.933.574,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
483	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.865.346,00	0,00	0,00	0,00	10.865.346,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
484	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	284.723.655,00	151.331.850,00	0,00	0,00	436.055.505,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
485	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.512.809,00	0,00	0,00	0,00	11.512.809,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
486	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	56.700.576,00	0,00	0,00	0,00	56.700.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
487	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.504.160,00	0,00	0,00	0,00	2.504.160,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
488	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
489	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	113.732.838,00	0,00	0,00	0,00	113.732.838,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
490	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	330.792.256,00	0,00	0,00	0,00	330.792.256,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
491	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
492	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	0,00	38.991.192,00	0,00	0,00	38.991.192,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
493	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.156.000,00	0,00	0,00	0,00	162.156.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
494	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	598.803.738,00	0,00	0,00	0,00	598.803.738,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %							
495	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	125.460.000,00	0,00	0,00	0,00	125.460.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
496	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	103 Unit	2.483.453.671,00	0,00	0,00	0,00	2.483.453.671,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
497	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	38 Unit	2.775.930.372,00	0,00	0,00	0,00	2.775.930.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
498	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	42.790.000,00	0,00	0,00	0,00	42.790.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
499	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	62.426.400,00	0,00	0,00	0,00	62.426.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
500	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.230.000,00	0,00	0,00	0,00	26.230.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %							
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %							
501	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan									
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
502	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	7.960.700,00	0,00	0,00	0,00	7.960.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
503	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana									
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	286.977.564,00	0,00	0,00	0,00	286.977.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
504	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.591.806.370,00	0,00	0,00	0,00	3.591.806.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-							
505	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana									
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang	7.296.576,00	0,00	0,00	0,00	7.296.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-							
506	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %							
507	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	25.256.200,00	0,00	0,00	0,00	25.256.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
508	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	187.084.337,00	0,00	0,00	0,00	187.084.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %							
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %							
509	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	9.107.884,00	0,00	0,00	0,00	9.107.884,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
510	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	15.816.704,00	0,00	0,00	0,00	15.816.704,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %							
511	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	5.298.885,00	0,00	0,00	0,00	5.298.885,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	102.190.844,00	0,00	0,00	0,00	102.190.844,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
513	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	6 Kelompok Masyarakat	6.960.562,00	0,00	0,00	0,00	6.960.562,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
514	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	1.001.611.998,00	0,00	0,00	0,00	1.001.611.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
515	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah									
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	24.003.095,00	0,00	0,00	0,00	24.003.095,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-							
516	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU									
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
517	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	305.489.508,00	0,00	0,00	0,00	305.489.508,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh									
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	201.285.282,00	0,00	0,00	0,00	201.285.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
519	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh									
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 ha Ha	10.101.354.882,00	0,00	0,00	0,00	10.101.354.882,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %							
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100 %							
520	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	2.448.166.399,00	2.787.432,00	0,00	0,00	2.450.953.831,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 % 100 %							
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %							
521	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	36 Dokumen	69.719.831,00	3.572.643.564,00	0,00	0,00	3.642.363.395,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	36 Lokasi	7.553.290.155,00	258.829.353.877,00	0,00	0,00	266.382.644.032,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
523	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	815.354.101,00	3.396.996.540,00	0,00	0,00	4.212.350.641,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
524	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang									
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	12 Laporan	40.472.712,00	4.038.100,00	0,00	0,00	44.510.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 % 100 %							
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
525	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	335.612.144,00	0,00	0,00	0,00	335.612.144,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
526	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.815.036,00	0,00	0,00	0,00	3.815.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
527	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.470.200,00	0,00	0,00	0,00	2.470.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
528	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	2.694.868,00	0,00	0,00	0,00	2.694.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
529	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	2.673.662,00	0,00	0,00	0,00	2.673.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
530	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
531	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7.737.623,00	0,00	0,00	0,00	7.737.623,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
532	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	13.414.213.506,00	0,00	0,00	0,00	13.414.213.506,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
533	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	3.870.156,00	0,00	0,00	0,00	3.870.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
534	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
535	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.336.423,00	8.991.000,00	0,00	0,00	27.327.423,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
536	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.314.319,00	682.650,00	0,00	0,00	3.996.969,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
537	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	325.345.479,00	0,00	0,00	0,00	325.345.479,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
538	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.536.989,00	0,00	0,00	0,00	29.536.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
539	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	54.495.600,00	0,00	0,00	0,00	54.495.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
540	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.539.672,00	0,00	0,00	0,00	4.539.672,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
542	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	238.510.140,00	0,00	0,00	0,00	238.510.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0 %							
543	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	320.445.000,00	0,00	0,00	320.445.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
544	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	234.406.248,00	0,00	0,00	234.406.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
545	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	35.189.520,00	920.991.225,00	0,00	0,00	956.180.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
546	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	45.837.006,00	0,00	0,00	0,00	45.837.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
547	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
548	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	353.635.912,00	0,00	0,00	0,00	353.635.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
549	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.618.600,00	0,00	0,00	0,00	120.618.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
550	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	626.609.000,00	0,00	0,00	0,00	626.609.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
551	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
552	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	43.132.024,00	0,00	0,00	0,00	43.132.024,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
553	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
554	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
555	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan Polisi Pamong Praja									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %							
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %							
556	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 Dokumen	1.033.264.610,00	255.300.000,00	0,00	0,00	1.288.564.610,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
557	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31 Dokumen	5.564.100,00	0,00	0,00	0,00	5.564.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia									
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	454 Orang	121.150.300,00	0,00	0,00	0,00	121.150.300,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
559	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	9.133.200,00	0,00	0,00	0,00	9.133.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
560	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat									
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
561	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2482 laporan	2.774.790.100,00	0,00	0,00	0,00	2.774.790.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
562	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan	36.561.400,00	0,00	0,00	0,00	36.561.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
563	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %							
564	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	8.590.700,00	0,00	0,00	0,00	8.590.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
565	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	60 Laporan	11.205.400,00	0,00	0,00	0,00	11.205.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
566	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23 Laporan	2.680.271.236,00	0,00	0,00	0,00	2.680.271.236,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-							
567	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
568	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.509.500,00	0,00	0,00	0,00	4.509.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
569	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
570	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.284.200,00	0,00	0,00	0,00	3.284.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
571	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan	36.647.108.569,00	0,00	0,00	0,00	36.647.108.569,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
572	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %							
573	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.025.950,00	0,00	0,00	0,00	24.025.950,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
574	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	376.339.500,00	0,00	0,00	0,00	376.339.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
575	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.649.450,00	0,00	0,00	0,00	15.649.450,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
576	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	32.242.800,00	0,00	0,00	0,00	32.242.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
577	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
578	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
579	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	28.451.409,00	0,00	0,00	28.451.409,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
580	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
581	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	23.760.127,00	0,00	0,00	0,00	23.760.127,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
583	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
584	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	82.195.500,00	0,00	0,00	0,00	82.195.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
585	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	929.568.654,00	0,00	0,00	0,00	929.568.654,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
586	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
587	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	89.123.400,00	0,00	0,00	0,00	89.123.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
588	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %							
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %							
589	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	204.750.000,00	0,00	0,00	0,00	204.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
590	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	12.838.056.435,00	0,00	0,00	0,00	12.838.056.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
591	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	64.314.600,00	0,00	0,00	0,00	64.314.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
592	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.269.200,00	0,00	0,00	0,00	2.269.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
593	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
594	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	180 Orang	1.674.239.600,00	0,00	0,00	0,00	1.674.239.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
595	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)									
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	114.874.800,00	0,00	0,00	0,00	114.874.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
596	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	540 Unit	4.651.033.000,00	4.516.912.000,00	0,00	0,00	9.167.945.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
597	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1.188.400,00	0,00	0,00	0,00	1.188.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
598	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	180 Keluarga	230.834.200,00	0,00	0,00	0,00	230.834.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	100 %							
599	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	50 Dokumen	5.642.100,00	0,00	0,00	0,00	5.642.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
600	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	120 Dokumen	306.206.100,00	0,00	0,00	0,00	306.206.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	100 %							
601	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	10.595.800,00	0,00	0,00	0,00	10.595.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %							
602	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	63.135.600,00	0,00	0,00	0,00	63.135.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
603	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa/Kelurahan	583.397.700,00	0,00	0,00	0,00	583.397.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
604	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-							
605	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	2.833.500,00	0,00	0,00	0,00	2.833.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
606	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	6 Unit	549.401.500,00	1.728.565.000,00	0,00	0,00	2.277.966.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
607	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.476.300,00	0,00	0,00	0,00	4.476.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
609	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.056.700,00	0,00	0,00	0,00	4.056.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
610	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	41.338.771.568,00	0,00	0,00	0,00	41.338.771.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
611	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.532.400,00	0,00	0,00	0,00	7.532.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							
612	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	164.252.300,00	0,00	0,00	0,00	164.252.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
613	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
614	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	74.025.600,00	0,00	0,00	0,00	74.025.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
615	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	825.447.900,00	0,00	0,00	0,00	825.447.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
616	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.954.800,00	0,00	0,00	0,00	14.954.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
617	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	708 Dokumen	43.309.200,00	0,00	0,00	0,00	43.309.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
618	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %							
619	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	425.300,00	304.884.500,00	0,00	0,00	305.309.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	21.642.200,00	0,00	0,00	0,00	21.642.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
621	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	315.423.400,00	0,00	0,00	0,00	315.423.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
622	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	785.278.200,00	0,00	0,00	0,00	785.278.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
623	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	126.995.600,00	0,00	0,00	0,00	126.995.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
624	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	2.917.822.000,00	0,00	0,00	0,00	2.917.822.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
625	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	74.410.000,00	0,00	0,00	0,00	74.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
626	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %							
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %							
627	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	192.239.609,00	0,00	0,00	0,00	192.239.609,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	100 %							
628	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 Kawasan	163.390.564,00	0,00	0,00	0,00	163.390.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
629	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi									
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	22.122.408,00	0,00	0,00	0,00	22.122.408,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
630	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	220 Orang	3.692.262,00	0,00	0,00	0,00	3.692.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
631	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	270 Kawasan	249.857.262,00	0,00	0,00	0,00	249.857.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %							
632	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas									
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	12.550.659,00	0,00	0,00	0,00	12.550.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
633	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	3.381.502.475,00	0,00	0,00	0,00	3.381.502.475,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
634	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	666.737.817,00	3.845.928,00	0,00	0,00	670.583.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
635	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	137.611.029,00	0,00	0,00	0,00	137.611.029,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
636	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	12 Laporan	13.862.124,00	0,00	0,00	0,00	13.862.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %							
637	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1.989.231,00	0,00	0,00	0,00	1.989.231,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
638	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	29.239.731,00	0,00	0,00	0,00	29.239.731,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
639	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	46.556.619,00	0,00	0,00	0,00	46.556.619,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
640	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 Kegiatan	115.502.328,00	0,00	0,00	0,00	115.502.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
641	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.298.252,00	0,00	0,00	0,00	5.298.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
642	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	[object Object]
643	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.486.730,00	0,00	0,00	0,00	5.486.730,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
644	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	8.882.718.919,00	0,00	0,00	0,00	8.882.718.919,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
645	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.878.120,00	0,00	0,00	0,00	1.878.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
646	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.580.966,00	0,00	0,00	0,00	8.580.966,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
647	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	150.279.454,00	0,00	0,00	0,00	150.279.454,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.698.345,00	0,00	0,00	0,00	13.698.345,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
649	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	35.964.000,00	0,00	0,00	0,00	35.964.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
650	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
651	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0,00	1.775.271.951,00	0,00	0,00	1.775.271.951,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
652	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	34.678.620,00	968.685.456,00	0,00	0,00	1.003.364.076,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
653	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	8.808.627,00	0,00	0,00	8.808.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
654	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.508.455,00	0,00	0,00	0,00	22.508.455,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
655	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	279.100.000,00	0,00	0,00	0,00	279.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
656	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	740.879.981,00	0,00	0,00	0,00	740.879.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
657	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	882.317.512,00	0,00	0,00	0,00	882.317.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
658	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	113.893.900,00	0,00	0,00	0,00	113.893.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
659	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	146.046.150,00	0,00	0,00	0,00	146.046.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %							
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %							
660	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Keluarga	252.207.624,00	0,00	0,00	0,00	252.207.624,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
661	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Lembaga	2.416.316.650,00	0,00	0,00	0,00	2.416.316.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %							
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %							
662	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	246.307.834,00	0,00	0,00	0,00	246.307.834,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
663	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	324.819.034,00	0,00	0,00	0,00	324.819.034,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
664	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	141.940.515,00	0,00	0,00	0,00	141.940.515,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
665	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	691.172.447,00	0,00	0,00	0,00	691.172.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
666	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	3.055.097,00	0,00	0,00	0,00	3.055.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %							
667	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	23.955.829,00	0,00	0,00	0,00	23.955.829,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
668	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4700 Orang	4.838.462.185,00	0,00	0,00	0,00	4.838.462.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
669	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.325.117,00	0,00	0,00	0,00	2.325.117,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %							
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1978 Orang	34.619.087,00	0,00	0,00	0,00	34.619.087,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
671	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1978 Keluarga	77.418.006,00	0,00	0,00	0,00	77.418.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
672	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15282 Keluarga	1.599.379.086,00	0,00	0,00	0,00	1.599.379.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %							
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %							
673	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.976.248,00	0,00	0,00	0,00	130.976.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
674	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	80.455.241,00	0,00	0,00	0,00	80.455.241,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
675	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.051.675,00	0,00	0,00	0,00	8.051.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
676	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.329.888,00	0,00	0,00	0,00	4.329.888,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
677	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	11.970.301.089,00	0,00	0,00	0,00	11.970.301.089,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %							
678	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
679	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	172.556.764,00	0,00	0,00	0,00	172.556.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
680	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.718.036,00	0,00	0,00	0,00	23.718.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
681	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	21.795.600,00	0,00	0,00	0,00	21.795.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
683	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
684	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	360.528,00	9.169.044,00	0,00	0,00	9.529.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
685	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.370.155,00	0,00	0,00	0,00	40.370.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
686	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.316.182,00	0,00	0,00	0,00	30.316.182,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
687	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	79.467.531,00	0,00	0,00	0,00	79.467.531,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	568.102.500,00	0,00	0,00	0,00	568.102.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
689	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	44.788.500,00	0,00	0,00	0,00	44.788.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
690	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.615.789,00	0,00	0,00	0,00	39.615.789,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %							
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan							
691	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	781.188.402,00	0,00	0,00	0,00	781.188.402,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
692	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	117.403.097,00	0,00	0,00	0,00	117.403.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan							
693	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	22 Laporan	135.011.381,00	0,00	0,00	0,00	135.011.381,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan							
694	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota									
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	20 Kegiatan	95.653.201,00	0,00	0,00	0,00	95.653.201,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
695	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi									
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	95.653.201,00	0,00	0,00	0,00	95.653.201,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %							
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	12 Bulan							
696	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	156.995.557,00	0,00	0,00	0,00	156.995.557,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
697	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10.694519 Ha	18.575.683.896,00	0,00	0,00	0,00	18.575.683.896,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %							
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	12 Bulan							
698	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3									
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	238.847.913,00	0,00	0,00	0,00	238.847.913,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan							
699	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	88.205.806,00	0,00	0,00	0,00	88.205.806,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %							
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan							
700	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	2.675.486,00	0,00	0,00	0,00	2.675.486,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
701	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	216 Badan Usaha	983.167.660,00	0,00	0,00	0,00	983.167.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
702	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %							
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH									
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	742.923,00	0,00	0,00	0,00	742.923,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %							
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan							
704	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	29.238.191,00	0,00	0,00	0,00	29.238.191,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
705	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %							
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	12 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	60 Pengaduan	502.655.533,00	0,00	0,00	0,00	502.655.533,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
707	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	4.898.278,00	0,00	0,00	0,00	4.898.278,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %							
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	12 Bulan							
708	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	162.766.354,00	0,00	0,00	0,00	162.766.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
709	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	1.781.117,00	34.157.878.730,00	0,00	0,00	34.159.659.847,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
710	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	74525,07 Ton	105.622.611.786,00	0,00	0,00	0,00	105.622.611.786,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
711	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah									
			Jumlah sampah yang terdaur ulang	29.390,17 Ton	2.114.727.679,00	0,00	0,00	0,00	2.114.727.679,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %							
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan							
712	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	90.752.441,00	0,00	0,00	0,00	90.752.441,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
713	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	169.547.085,00	0,00	0,00	0,00	169.547.085,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan							
714	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	39.895.901.028,00	0,00	0,00	0,00	39.895.901.028,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan							
715	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.494.256,00	0,00	0,00	0,00	27.494.256,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
716	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.222.043,00	0,00	0,00	0,00	68.222.043,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
717	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.345.978,00	0,00	0,00	0,00	9.345.978,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
718	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.679.892.284,00	0,00	0,00	0,00	1.679.892.284,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
719	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.993.612,00	0,00	0,00	0,00	18.993.612,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
720	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	61.428.800,00	0,00	0,00	0,00	61.428.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
721	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
722	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.757.350,00	0,00	0,00	0,00	3.757.350,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
723	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	3.107.050.395,00	0,00	0,00	3.107.050.395,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0,00	63.198.960,00	0,00	0,00	63.198.960,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
725	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	252.461.952,00	0,00	0,00	252.461.952,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
726	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	109.890.000,00	0,00	0,00	109.890.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
727	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.671.200,00	0,00	0,00	0,00	5.671.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
728	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.302.180.724,00	0,00	0,00	0,00	1.302.180.724,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %							
729	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	127.478.720,00	0,00	0,00	0,00	127.478.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
730	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	212 Unit	1.520.568.660,00	0,00	0,00	0,00	1.520.568.660,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
731	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	7.545.700,00	0,00	0,00	0,00	7.545.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
732	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	243 Unit	287.570.700,00	0,00	0,00	0,00	287.570.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
733	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	331.300.500,00	0,00	0,00	0,00	331.300.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %							
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel							
734	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	565.458.477,00	0,00	0,00	0,00	565.458.477,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
735	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	1.626.725.592,00	0,00	0,00	0,00	1.626.725.592,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-							
736	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	62 desa/kel							
737	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	524.451.879,00	0,00	0,00	0,00	524.451.879,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %							
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %							
738	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10 Dokumen	243.886.758,00	0,00	0,00	0,00	243.886.758,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
739	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	1.431.545.522,00	0,00	0,00	0,00	1.431.545.522,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-							
740	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
741	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
742	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-							
743	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
744	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %							
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel							
745	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	124.355.723,00	0,00	0,00	0,00	124.355.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	85.846.692,00	0,00	0,00	0,00	85.846.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	62 desa/kel							
747	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan	123.265.104,00	0,00	0,00	0,00	123.265.104,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
748	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.359.857,00	0,00	0,00	0,00	5.359.857,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
749	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
750	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.225.438,00	0,00	0,00	0,00	3.225.438,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
751	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	13.351.115.700,00	0,00	0,00	0,00	13.351.115.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
752	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
753	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.309.910,00	0,00	0,00	0,00	2.309.910,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
754	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3.804.747,00	819.180,00	0,00	0,00	4.623.927,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
755	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	135.700.719,00	0,00	0,00	0,00	135.700.719,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
756	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	144.073.116,00	0,00	0,00	0,00	144.073.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
757	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.932.020,00	0,00	0,00	0,00	47.932.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
759	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	693.721.855,00	0,00	0,00	0,00	693.721.855,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
760	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0,00	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
761	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.910.849,00	0,00	0,00	0,00	17.910.849,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
762	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	9.324.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
763	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	82.999.176,00	0,00	0,00	0,00	82.999.176,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
764	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	95.769.220,00	0,00	0,00	0,00	95.769.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
765	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	502.664.680,00	0,00	0,00	0,00	502.664.680,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
766	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit	262.274.025,00	0,00	0,00	0,00	262.274.025,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
767	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %							
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %							
768	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	18.616.900,00	0,00	0,00	0,00	18.616.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %							
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa							
769	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	1.359.206.142,00	0,00	0,00	0,00	1.359.206.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
770	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	175.517.900,00	0,00	0,00	0,00	175.517.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
771	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46 Dokumen	506.639.300,00	0,00	0,00	0,00	506.639.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
772	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa									
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	141.058.052,00	0,00	0,00	0,00	141.058.052,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
773	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	15.086.200,00	0,00	0,00	0,00	15.086.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
774	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46 Orang	85.954.100,00	0,00	0,00	0,00	85.954.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	689.368.800,00	0,00	0,00	0,00	689.368.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %							
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa							
776	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	370.685.400,00	0,00	0,00	0,00	370.685.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
777	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	56.815.800,00	0,00	0,00	0,00	56.815.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
778	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 Laporan	18.666.875,00	0,00	0,00	0,00	18.666.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
779	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	3.145.778.116,00	0,00	0,00	0,00	3.145.778.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
780	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.351.600,00	0,00	0,00	0,00	4.351.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
781	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.042.300,00	0,00	0,00	0,00	4.042.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
782	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.592.400,00	0,00	0,00	0,00	4.592.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
783	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	12.863.357.737,00	0,00	0,00	0,00	12.863.357.737,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
784	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.713.400,00	0,00	0,00	0,00	4.713.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
785	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.484.300,00	0,00	0,00	0,00	3.484.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
786	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.800.700,00	0,00	0,00	0,00	136.800.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
787	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.842.700,00	0,00	0,00	0,00	9.842.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
788	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	26.840.800,00	0,00	0,00	0,00	26.840.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
789	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	25.997.532,00	0,00	0,00	25.997.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
790	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	104.057.116,00	0,00	0,00	0,00	104.057.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
791	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.997.600,00	0,00	0,00	0,00	5.997.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
792	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	117.264.220,00	0,00	0,00	0,00	117.264.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
793	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 mobil,12 spd motor Unit	393.874.252,00	0,00	0,00	0,00	393.874.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
794	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	28.570.000,00	0,00	0,00	0,00	28.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
795	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %							
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah	31 %							
796	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.180.500,00	0,00	0,00	0,00	500.180.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
797	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	12.886.200,00	0,00	0,00	0,00	12.886.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	100 %							
798	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.001.814.800,00	0,00	0,00	0,00	1.001.814.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100 %							
799	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	101.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
800	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	366.841.280,00	0,00	0,00	0,00	366.841.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang terselesaikan	100 %							
801	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	235.480.000,00	0,00	0,00	0,00	235.480.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %							
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh	100 %							
802	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	14.888.600,00	0,00	0,00	0,00	14.888.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	243.175.880,00	8.588.200,00	0,00	0,00	251.764.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %							
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	45 buku							
804	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	53.901.330,00	0,00	0,00	0,00	53.901.330,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin							
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %							
805	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	9.043.800,00	0,00	0,00	0,00	9.043.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
806	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.007.220,00	0,00	0,00	0,00	46.007.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %							
807	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	54.528.400,00	0,00	0,00	0,00	54.528.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
808	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.056.300,00	0,00	0,00	0,00	15.056.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.151.000,00	0,00	0,00	0,00	16.151.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %							
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	0,016 %							
810	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	38 Orang	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota									
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus	0,0065 %							
812	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
813	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/									
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	25 Orang	69.020.000,00	0,00	0,00	0,00	69.020.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
814	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota									
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	19.594.900,00	0,00	0,00	0,00	19.594.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %							
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD	100 %							
815	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.475.508,00	0,00	0,00	0,00	52.475.508,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	42.260.560,00	0,00	0,00	0,00	42.260.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
817	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.887.000,00	0,00	0,00	0,00	3.887.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %							
818	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	16.386.587.390,00	0,00	0,00	0,00	16.386.587.390,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
819	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	11.169.600,00	0,00	0,00	0,00	11.169.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
820	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	2.787.100,00	0,00	0,00	0,00	2.787.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
821	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.775.000,00	0,00	0,00	0,00	6.775.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %							
822	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.381.200,00	0,00	0,00	0,00	17.381.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
823	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	186.017.000,00	0,00	0,00	0,00	186.017.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
824	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.762.400,00	0,00	0,00	0,00	7.762.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
825	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	26.598.500,00	0,00	0,00	0,00	26.598.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
826	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
827	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	11.087.000,00	0,00	0,00	11.087.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
828	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	23.421.200,00	0,00	0,00	23.421.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan							
829	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	54.345.200,00	0,00	0,00	0,00	54.345.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
830	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00	8.610.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %							
831	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77 Unit	911.141.920,00	0,00	0,00	0,00	911.141.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
832	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	46.509.300,00	0,00	0,00	0,00	46.509.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
833	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	69.300.000,00	0,00	0,00	0,00	69.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
834	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %							
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	1 lembaga							
835	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	54 Dokumen	37.896.700,00	0,00	0,00	0,00	37.896.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
836	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal									
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	11.358.200,00	0,00	0,00	0,00	11.358.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen							
837	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
838	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	175.200.000,00	0,00	0,00	0,00	175.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
839	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	63.629.460,00	0,00	0,00	0,00	63.629.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
840	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana									
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %							
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %							
841	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	384.158.700,00	0,00	0,00	0,00	384.158.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
842	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana									
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
843	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
845	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	149.999.700,00	0,00	0,00	0,00	149.999.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
846	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal									
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	204.832.720,00	0,00	0,00	0,00	204.832.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
847	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Organisasi	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1 : (2-3) org/desa							
848	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	955 Orang	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
849	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB									
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62 Organisasi	148.781.600,00	0,00	0,00	0,00	148.781.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	812.265.500,00	180.988.000,00	0,00	0,00	993.253.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %							
851	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	68.080.000,00	0,00	0,00	0,00	68.080.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
852	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3927 Orang	339.140.000,00	0,00	0,00	0,00	339.140.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
854	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	71.486.100,00	0,00	0,00	0,00	71.486.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
855	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak									
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1500 Laporan	768.559.433,00	0,00	0,00	0,00	768.559.433,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
856	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB									
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	380 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
857	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan									
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	3000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB							
858	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
859	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	71.898.160,00	0,00	0,00	0,00	71.898.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
860	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung	94.200.000,00	0,00	0,00	0,00	94.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %							
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %							
861	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	91.209.200,00	0,00	0,00	0,00	91.209.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
862	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	12690 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok yang Dibina	100 %							
864	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	58.948.700,00	0,00	0,00	0,00	58.948.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
865	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4 laporan	1.269.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
866	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 laporan	1.395.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.900.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
		Dinas Perhubungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %							
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %							
867	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	451.259.800,00	0,00	0,00	0,00	451.259.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
868	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.809.095.359,00	0,00	0,00	0,00	1.809.095.359,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
869	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.325.671.202,00	0,00	0,00	0,00	4.325.671.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %							
870	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1200 Unit	38.208.177,00	19.514.000.000,00	0,00	0,00	19.552.208.177,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
871	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5000 Unit	22.703.371.608,00	65.371.230,00	0,00	0,00	22.768.742.838,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %							
872	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	19.265.845,00	0,00	0,00	0,00	19.265.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %							
873	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	26397 Unit	359.059.576,00	0,00	0,00	0,00	359.059.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
874	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	757.027.784,00	0,00	0,00	0,00	757.027.784,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %							
875	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.083.722.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.722.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
876	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	646.800,00	0,00	0,00	0,00	646.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
877	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	230 Dokumen	1.386.231.992,00	396.259.550,00	0,00	0,00	1.782.491.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
878	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	92.329.100,00	0,00	0,00	0,00	92.329.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %							
879	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	1.456.100,00	0,00	0,00	0,00	1.456.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
880	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin									
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3 Laporan	1.558.300,00	0,00	0,00	0,00	1.558.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %							
881	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal									
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00	3.564.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
882	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	13 Laporan	63.643.400,00	0,00	0,00	0,00	63.643.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
883	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum									
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	14.463.800,00	286.759.500,00	0,00	0,00	301.223.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %							
884	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	193.248.265,00	0,00	0,00	0,00	193.248.265,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
885	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %							
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	13.878.600,00	0,00	0,00	0,00	13.878.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
887	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
888	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.491.200,00	0,00	0,00	0,00	5.491.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
889	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	33.997.099.626,00	0,00	0,00	0,00	33.997.099.626,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
890	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	8.953.900,00	0,00	0,00	0,00	8.953.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
891	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.289.900,00	0,00	0,00	0,00	2.289.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
892	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.118.200,00	0,00	0,00	0,00	5.118.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %							
893	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	165.738.248,00	0,00	0,00	0,00	165.738.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %							
894	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
895	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	460.620.316,00	0,00	0,00	0,00	460.620.316,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
896	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.745.700,00	0,00	0,00	0,00	8.745.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
897	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12.294.000,00	0,00	0,00	0,00	12.294.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
898	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
899	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
900	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
901	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	995.700,00	13.857.377.640,00	0,00	0,00	13.858.373.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
902	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	270.600,00	161.742.000,00	0,00	0,00	162.012.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
903	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	72.426.320,00	2.070.061.676,00	0,00	0,00	2.142.487.996,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
904	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
905	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.227.500,00	0,00	0,00	0,00	12.227.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
906	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	23.366.600.632,00	0,00	0,00	0,00	23.366.600.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
907	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	348.230.404,00	0,00	0,00	0,00	348.230.404,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
908	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.050.000,00	0,00	0,00	0,00	42.050.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
909	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	1.329.103.112,00	0,00	0,00	0,00	1.329.103.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
910	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	302.075.000,00	0,00	0,00	0,00	302.075.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
911	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45.315.695,00	529.347.649,00	0,00	0,00	574.663.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Komunikasi dan Informatika									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfrentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %							
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %							
912	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	12 Dokumen	170.225.121,00	0,00	0,00	0,00	170.225.121,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
913	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	203.143.164,00	0,00	0,00	0,00	203.143.164,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
914	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	5.785.222.987,00	0,00	0,00	0,00	5.785.222.987,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
915	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	19.119.142,00	0,00	0,00	0,00	19.119.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
916	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	153.887.748,00	0,00	0,00	0,00	153.887.748,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
917	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media									
			Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan	57.887.726,00	0,00	0,00	0,00	57.887.726,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
918	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan									
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	7.555.534,00	0,00	0,00	0,00	7.555.534,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
919	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas									
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	44.920.344,00	0,00	0,00	0,00	44.920.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	100 %							
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen							
920	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	63.470.745,00	0,00	0,00	0,00	63.470.745,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
921	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4.370.674.291,00	0,00	0,00	0,00	4.370.674.291,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
922	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1010 Unit	39.702.112.243,00	0,00	0,00	0,00	39.702.112.243,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen							
923	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	970.322.600,00	0,00	0,00	0,00	970.322.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
924	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	1.757.004.950,00	0,00	0,00	0,00	1.757.004.950,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
925	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah									
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	177.883.900,00	0,00	0,00	0,00	177.883.900,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
926	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas									
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	3.054.200,00	0,00	0,00	0,00	3.054.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %							
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen							
927	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	49.405.915,00	0,00	0,00	0,00	49.405.915,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
928	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
929	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	47.082.375,00	0,00	0,00	0,00	47.082.375,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen							
930	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	16.077.348.311,00	0,00	0,00	0,00	16.077.348.311,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
931	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Dokumen	20.264.400,00	0,00	0,00	0,00	20.264.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.848.000,00	0,00	0,00	0,00	2.848.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
933	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.079.600,00	0,00	0,00	0,00	9.079.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
934	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
935	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	83.949.603,00	0,00	0,00	0,00	83.949.603,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan							
936	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.268.820,00	0,00	0,00	0,00	22.268.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
937	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	176.230.700,00	0,00	0,00	0,00	176.230.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
938	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.788.300,00	0,00	0,00	0,00	11.788.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
939	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.296.000,00	0,00	0,00	0,00	40.296.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
940	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.711.379,00	0,00	0,00	0,00	2.711.379,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
941	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit							
942	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
943	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	0,00	49.628.749,00	0,00	0,00	49.628.749,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
944	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	97 Unit	0,00	358.748.407,00	0,00	0,00	358.748.407,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan							
946	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	129.704.480,00	0,00	0,00	0,00	129.704.480,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
947	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.452.000,00	0,00	0,00	0,00	167.452.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
948	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219 Unit							
949	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	139.769.220,00	0,00	0,00	0,00	139.769.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
950	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	663.902.660,00	0,00	0,00	0,00	663.902.660,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
951	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 Unit	122.696.824,00	0,00	0,00	0,00	122.696.824,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %							
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	15 Dokumen							
953	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	7.083.700,00	0,00	0,00	0,00	7.083.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
954	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi									
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	62.750.890,00	0,00	0,00	0,00	62.750.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral									
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8 Dokumen	9.924.825,00	0,00	0,00	0,00	9.924.825,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %							
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen							
956	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	2.112.380,00	0,00	0,00	0,00	2.112.380,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
957	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	3.872.580,00	0,00	0,00	0,00	3.872.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	184.936.865,00	0,00	0,00	0,00	184.936.865,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
959	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	1.968.600,00	0,00	0,00	0,00	1.968.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen							
960	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	4.094.800,00	0,00	0,00	0,00	4.094.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %							
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	60 Unit Usaha							
961	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	10.054.700,00	0,00	0,00	0,00	10.054.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	5 Unit Usaha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
962	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	4.395.400,00	0,00	0,00	0,00	4.395.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %							
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha							
963	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha	160.766.500,00	0,00	0,00	0,00	160.766.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
964	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58 Unit Usaha	78.057.200,00	0,00	0,00	0,00	78.057.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %							
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha							
965	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	160 Unit Usaha	178.257.420,00	0,00	0,00	0,00	178.257.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
966	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	31.594.300,00	0,00	0,00	0,00	31.594.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %							
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian	347 orang							
967	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	347 Orang	418.327.700,00	0,00	0,00	0,00	418.327.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %							
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20 Unit Usaha							
968	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	97.966.800,00	0,00	0,00	0,00	97.966.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha							
969	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 Unit Usaha	12.811.900,00	0,00	0,00	0,00	12.811.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
970	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	54.620.560,00	0,00	0,00	0,00	54.620.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
971	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	96.205.200,00	0,00	0,00	0,00	96.205.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
972	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	141.007.200,00	0,00	0,00	0,00	141.007.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
973	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil									
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	40 Unit Usaha	42.138.160,00	0,00	0,00	0,00	42.138.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	372 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
975	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	105 Orang	352.128.370,00	0,00	0,00	0,00	352.128.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %							
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	600 Unit Usaha							
976	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	256 Unit Usaha	1.419.646.865,00	0,00	0,00	0,00	1.419.646.865,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
977	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	232.502.520,00	0,00	0,00	0,00	232.502.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %							
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %							
978	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.182.900,00	0,00	0,00	0,00	7.182.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
979	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
980	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.699.200,00	0,00	0,00	0,00	4.699.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
981	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	19.767.752.282,00	0,00	0,00	0,00	19.767.752.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
982	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.619.000,00	0,00	0,00	0,00	8.619.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
983	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.880.000,00	262.607.574,00	0,00	0,00	271.487.574,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
984	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.254.100,00	0,00	0,00	0,00	6.254.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
985	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	213.297.300,00	0,00	0,00	0,00	213.297.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
986	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.361.696,00	0,00	0,00	0,00	32.361.696,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
987	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	468 Dokumen	50.833.116,00	0,00	0,00	0,00	50.833.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
988	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
989	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	106.206.327,00	0,00	0,00	0,00	106.206.327,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
990	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.396.000,00	0,00	0,00	0,00	28.396.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	9.792.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %							
992	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	102.769.220,00	0,00	0,00	0,00	102.769.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
993	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	525.121.500,00	0,00	0,00	0,00	525.121.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
994	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	29.369.712,00	0,00	0,00	0,00	29.369.712,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
995	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %							
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Unit							
996	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	49.942.800,00	150.798.000.000,00	0,00	0,00	150.847.942.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen							
997	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	5.053.400,00	0,00	0,00	0,00	5.053.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %							
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data barang kebutuhan pokok dan barang penting	8 Laporan							
998	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6.198.700,00	0,00	0,00	0,00	6.198.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
999	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	110 Laporan							
1000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	32.056.100,00	0,00	0,00	0,00	32.056.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
1001	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14 Laporan	447.350.974,00	0,00	0,00	0,00	447.350.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan							
1002	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan									
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1003	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1004	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	8.153.700,00	0,00	0,00	0,00	8.153.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %							
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	6 Produk							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1005	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	626.689.100,00	0,00	0,00	0,00	626.689.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1006	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1007	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor									
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	62.973.200,00	0,00	0,00	0,00	62.973.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %							
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang di Tera dan mendapat pengawasan	100 %							
1008	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	567.761.104,00	0,00	0,00	0,00	567.761.104,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1009	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	11.635.600,00	0,00	0,00	0,00	11.635.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %							
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	10 UMKM							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	251.006.100,00	0,00	0,00	0,00	251.006.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)	100 %							
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	100 %							
1011	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	1.810.300,00	0,00	0,00	0,00	1.810.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1012	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko									
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	15 Dokumen	77.631.300,00	0,00	0,00	0,00	77.631.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %							
1013	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.222.200,00	0,00	0,00	0,00	19.222.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1014	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	286.143.800,00	0,00	0,00	0,00	286.143.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %							
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %							
1015	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.303.363.450,00	0,00	0,00	0,00	1.303.363.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1016	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	509.405.600,00	0,00	0,00	0,00	509.405.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)	100 %							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %							
1017	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	18.131.600,00	0,00	0,00	0,00	18.131.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1018	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	2.098.612.152,00	0,00	0,00	0,00	2.098.612.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1019	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	14.236.700,00	0,00	0,00	0,00	14.236.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1020	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500 Kegiatan Usaha	396.066.400,00	0,00	0,00	0,00	396.066.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)	100 %							
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %							
1021	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha.	134.819.800,00	0,00	0,00	0,00	134.819.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1022	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	293.713.200,00	0,00	0,00	0,00	293.713.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1023	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	40.877.800,00	0,00	0,00	0,00	40.877.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPPTSP)	100 %							
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang dikelola dengan baik	100 %							
1024	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	1.303.400.850,00	0,00	0,00	0,00	1.303.400.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPPTSP)	100 %							
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPPTSP	100 %							
1025	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	5.245.600,00	0,00	0,00	0,00	5.245.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1027	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	5.267.500,00	0,00	0,00	0,00	5.267.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1028	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	26.483.079.685,00	0,00	0,00	0,00	26.483.079.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1029	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.317.100,00	0,00	0,00	0,00	10.317.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPSTSP	100 %							
1030	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.042.200,00	0,00	0,00	0,00	3.042.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1031	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	983.709.300,00	0,00	0,00	0,00	983.709.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1032	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.640.600,00	0,00	0,00	0,00	16.640.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1033	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.536.700,00	0,00	0,00	0,00	11.536.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1034	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	530.781.280,00	0,00	0,00	0,00	530.781.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1035	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.008.800,00	0,00	0,00	0,00	90.008.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1036	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	85.656.000,00	0,00	0,00	0,00	85.656.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1037	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %							
1038	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1039	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1040	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1041	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1042	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	684.365.000,00	0,00	0,00	0,00	684.365.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1043	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	122.544.220,00	0,00	0,00	0,00	122.544.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1044	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	773.292.600,00	0,00	0,00	0,00	773.292.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1045	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	190.555.000,00	0,00	0,00	0,00	190.555.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Kebudayaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 paket							
1047	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	596 Objek	18.632.288.740,00	0,00	0,00	0,00	18.632.288.740,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	596 Orang	1.636.473.400,00	0,00	0,00	0,00	1.636.473.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	1 Paket							
1049	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2308 Objek	82.795.459.627,00	0,00	0,00	0,00	82.795.459.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1050	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	1 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1051	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat									
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	827.649.100,00	0,00	0,00	0,00	827.649.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1052	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat									
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1545 Orang	45.803.721.500,00	0,00	0,00	0,00	45.803.721.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %							
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	1 Paket							
1053	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1495 Orang	3.909.658.620,00	0,00	0,00	0,00	3.909.658.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1054	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	132 Sertifikat	1.564.998.100,00	0,00	0,00	0,00	1.564.998.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1055	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional									
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	30.657.388.540,00	0,00	0,00	0,00	30.657.388.540,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %							
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1056	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1142 Orang	5.630.326.340,00	0,00	0,00	0,00	5.630.326.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1057	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	52 Unit	1.843.218.200,00	0,00	0,00	0,00	1.843.218.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1058	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	426.010.000,00	1.415.500,00	0,00	0,00	427.425.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 Unit 3 unit							
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	1 Paket							
1059	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek	1.910.227.860,00	0,00	0,00	0,00	1.910.227.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1060	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	499.068.550,00	0,00	0,00	0,00	499.068.550,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	1 Paket							
1061	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	29.920.563.600,00	0,00	0,00	0,00	29.920.563.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1062	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	14 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1063	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan	1 Paket							
1064	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1065	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit							
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit							
1066	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	572.143.920,00	0,00	0,00	0,00	572.143.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1067	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	680.413.600,00	1.000.000,00	0,00	0,00	681.413.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1068	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	650.272.692,00	6.000.000,00	0,00	0,00	656.272.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1069	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1.156.500,00	850.000.000,00	0,00	0,00	851.156.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
1070	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.320.400,00	0,00	0,00	0,00	4.320.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1071	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.966.000,00	0,00	0,00	0,00	2.966.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1072	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7.295.700,00	0,00	0,00	0,00	7.295.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1073	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.722.100,00	0,00	0,00	0,00	1.722.100,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	12 Bulan							
1074	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	17.789.675.181,00	0,00	0,00	0,00	17.789.675.181,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen							
1075	2.22.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.156.200,00	0,00	0,00	0,00	30.156.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1076	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.054.800,00	0,00	0,00	0,00	7.054.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1077	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	715.688.289,00	115.230.000,00	0,00	0,00	830.918.289,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1078	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.988.200,00	0,00	0,00	0,00	25.988.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1079	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
1080	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket							
1081	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
1082	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	28.364.900,00	0,00	0,00	28.364.900,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1083	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	132.076.938,00	0,00	0,00	132.076.938,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
1084	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	32.211.200,00	0,00	0,00	0,00	32.211.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1085	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	44.991.000,00	0,00	0,00	0,00	44.991.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1086	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.420.000,00	0,00	0,00	0,00	45.420.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
1087	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	135.024.220,00	0,00	0,00	0,00	135.024.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	899.283.956,00	0,00	0,00	0,00	899.283.956,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1089	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	69.752.000,00	0,00	0,00	0,00	69.752.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1090	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.884.000,00	196.600.000,00	0,00	0,00	236.484.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek							
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang							
1091	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	36 Layanan	82.806.940,00	0,00	0,00	0,00	82.806.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1092	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	32.693.100,00	0,00	0,00	0,00	32.693.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1093	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	30 Layanan	2.822.700,00	0,00	0,00	0,00	2.822.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1094	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	88.171.272,00	0,00	0,00	0,00	88.171.272,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1095	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	181.125.180,00	0,00	0,00	0,00	181.125.180,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,58							
1096	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	72.939.200,00	0,00	0,00	0,00	72.939.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	98.440.840,00	0,00	0,00	0,00	98.440.840,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %							
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	30 Naskah							
1098	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno									
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	134.000.940,00	0,00	0,00	0,00	134.000.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	500 Eksemplar							
1099	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	500 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1100	2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	250 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %							
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1101	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.652.000,00	0,00	0,00	0,00	6.652.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1102	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.209.700,00	0,00	0,00	0,00	3.209.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1103	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	23.745.552.344,00	0,00	0,00	0,00	23.745.552.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
1104	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.935.000,00	0,00	0,00	0,00	46.935.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1105	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.568.400,00	0,00	0,00	0,00	10.568.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1106	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	206.928.428,00	0,00	0,00	0,00	206.928.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1107	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.950.700,00	0,00	0,00	0,00	10.950.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1108	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	65.575.692,00	0,00	0,00	0,00	65.575.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1109	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1110	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	23.866.887,00	0,00	0,00	23.866.887,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1111	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.804.400,00	0,00	0,00	0,00	12.804.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1112	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.100.200,00	0,00	0,00	0,00	12.100.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1113	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1114	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	77.219.500,00	0,00	0,00	0,00	77.219.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1115	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	468.924.300,00	0,00	0,00	0,00	468.924.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1116	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1117	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	121.310.000,00	0,00	0,00	0,00	121.310.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1118	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %							
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja							
1119	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	124.156.024,00	0,00	0,00	0,00	124.156.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1120	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	109.211.532,00	0,00	0,00	0,00	109.211.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1121	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	97.124.340,00	0,00	0,00	0,00	97.124.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi	1400 Arsip							
1122	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	137.470.892,00	0,00	0,00	0,00	137.470.892,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang diinput pada SIKN dan JIKN	500 Berkas							
1123	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7000 Pengguna	83.165.072,00	0,00	0,00	0,00	83.165.072,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1124	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan	98.889.372,00	0,00	0,00	0,00	98.889.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %							
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan	3 Unit Kearsipan							
1125	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	42.796.420,00	0,00	0,00	0,00	42.796.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang							
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	100 Berkas							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1126	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	47.283.533,00	0,00	0,00	0,00	47.283.533,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	8146 Ton							
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan	12 bulan							
1127	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	289.572.396,00	0,00	0,00	0,00	289.572.396,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta, Kedongan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Mengwi, Pererenan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1128	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit	1.373.442.064,00	0,00	0,00	0,00	1.373.442.064,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	100 persen							
1129	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	340 Orang	530.606.307,00	0,00	0,00	0,00	530.606.307,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Pecatu Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1130	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	9.682.456,00	0,00	0,00	0,00	9.682.456,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang memberikan layanan	2 Unit							
1131	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton							
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	63 Kelompok							
1132	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4 Kelompok	605.507.674,00	0,00	0,00	0,00	605.507.674,00	Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1133	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	48 Kelompok	5.393.157,00	0,00	0,00	0,00	5.393.157,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1134	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	17.989.736,00	0,00	0,00	0,00	17.989.736,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1135	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.388.548,00	0,00	0,00	0,00	100.388.548,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Kekeeran Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1136	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1137	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	458.519.380,00	0,00	0,00	0,00	458.519.380,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Petang, Pangsan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	62.669.988,00	0,00	0,00	0,00	62.669.988,00	Kab. Badung, Mengwi, Keheran Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1139	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh	[object Object]
1140	3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat									
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan							
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 kawasan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1141	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	186.837.147,00	0,00	0,00	0,00	186.837.147,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Mengwi, Sading Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Taman Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1142	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.807.616,00	0,00	0,00	0,00	20.807.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton							
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang termanfaatkan	1 Dokumen							
1143	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	99.925.752,00	0,00	0,00	0,00	99.925.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan	6742 Ton							
1144	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,5 Ton	325.763.318,00	0,00	0,00	0,00	325.763.318,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Abiansemal, Jagapati Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	Insentif Fiskal
1145	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	235.999.915,00	0,00	0,00	0,00	235.999.915,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan							
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 bulan							
1146	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	13.513.695,00	0,00	0,00	0,00	13.513.695,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1147	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
1148	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	6.873.120,00	0,00	0,00	0,00	6.873.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan							
1149	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	13.851.309.189,00	0,00	0,00	0,00	13.851.309.189,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis							
1150	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.796.284,00	0,00	0,00	0,00	30.796.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1151	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.723.448,00	0,00	0,00	0,00	50.723.448,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1152	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.625.037,00	0,00	0,00	0,00	4.625.037,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1153	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	263.603.800,00	0,00	0,00	0,00	263.603.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1154	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.779.876,00	0,00	0,00	0,00	10.779.876,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1155	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	36.511.200,00	0,00	0,00	0,00	36.511.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1156	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.471.000,00	0,00	0,00	0,00	3.471.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1157	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan							
1158	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
1159	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	108.405.708,00	0,00	0,00	108.405.708,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1160	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Baha	[object Object]
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan							
1161	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1162	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.631.324,00	0,00	0,00	0,00	32.631.324,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1163	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	298.949.760,00	0,00	0,00	0,00	298.949.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	99 Unit							
1164	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	130.889.700,00	0,00	0,00	0,00	130.889.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1165	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	359.241.267,00	0,00	0,00	0,00	359.241.267,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1166	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	46.542.600,00	0,00	0,00	0,00	46.542.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1167	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22.022.400,00	0,00	0,00	0,00	22.022.400,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pariwisata									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	76.92 %							
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	30 DTW							
1168	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	136.890.948,00	0,00	0,00	0,00	136.890.948,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan							
1169	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.189.600,00	0,00	0,00	0,00	4.189.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1170	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	8.697.365.100,00	0,00	0,00	0,00	8.697.365.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1171	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	94.289.200,00	0,00	0,00	0,00	94.289.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1172	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	58.529.300,00	0,00	0,00	0,00	58.529.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi							
1173	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1174	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	6.504.103.900,00	0,00	0,00	0,00	6.504.103.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1175	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	6.772.803.960,00	7.130.487.588,00	0,00	0,00	13.903.291.548,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1176	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	215.701.600,00	0,00	0,00	0,00	215.701.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 usaha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1177	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)									
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	75 Usaha	135.202.860,00	0,00	0,00	0,00	135.202.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1178	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota									
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan	128.231.360,00	0,00	0,00	0,00	128.231.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang							
1179	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	547.213.200,00	0,00	0,00	0,00	547.213.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1180	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	137.325.460,00	0,00	0,00	0,00	137.325.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1181	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	8.150.414.180,00	0,00	0,00	0,00	8.150.414.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1182	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	2.685.432.600,00	0,00	0,00	0,00	2.685.432.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %							
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	50 usaha							
1183	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	76.465.360,00	0,00	0,00	0,00	76.465.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1184	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual									
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	55.932.000,00	0,00	0,00	0,00	55.932.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %							
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang							
1185	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	539.228.348,00	0,00	0,00	0,00	539.228.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1186	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI									
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	106.673.250,00	0,00	0,00	0,00	106.673.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1187	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	86 Orang	84.004.469,00	0,00	0,00	0,00	84.004.469,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1188	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	123.293.974,00	0,00	0,00	0,00	123.293.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %							
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %							
1189	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	482.898.500,00	0,00	0,00	0,00	482.898.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1190	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1191	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	4.590.800,00	0,00	0,00	0,00	4.590.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan							
1192	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	28.219.450.205,00	0,00	0,00	0,00	28.219.450.205,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah DTW yang memungut retribusi	6 DTW							
1193	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	460.136.132,00	0,00	0,00	0,00	460.136.132,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan							
1194	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.513.400,00	0,00	0,00	0,00	3.513.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1195	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.655.300,00	33.300.000,00	0,00	0,00	116.955.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1196	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.793.600,00	0,00	0,00	0,00	11.793.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1197	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	236.532.400,00	0,00	0,00	0,00	236.532.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1198	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.372.800,00	0,00	0,00	0,00	40.372.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	55.222.800,00	0,00	0,00	0,00	55.222.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1200	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit							
1201	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.796.600,00	999.000.000,00	0,00	0,00	1.000.796.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1202	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	0,00	82.793.790,00	0,00	0,00	82.793.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1203	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	111.419.500,00	4.324.287.844,00	0,00	0,00	4.435.707.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan							
1204	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.210.000,00	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1205	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.949.284,00	0,00	0,00	0,00	162.949.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan							
1206	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	126.494.720,00	0,00	0,00	0,00	126.494.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1207	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	2.237.065.260,00	0,00	0,00	0,00	2.237.065.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1208	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	559 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1209	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	245.830.000,00	0,00	0,00	0,00	245.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1210	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	117.264.000,00	0,00	0,00	0,00	117.264.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pertanian dan Pangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	1 Unit							
1211	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya									
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %							
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton							
1212	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	5.651.427.204,00	0,00	0,00	0,00	5.651.427.204,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1213	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia									
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1214	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan									
			Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	5.215.200,00	0,00	0,00	0,00	5.215.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1215	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota									
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	2.692.948.011,00	0,00	0,00	0,00	2.692.948.011,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik	100 %							
1216	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	8 Kelompok							
1217	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	78.414.800,00	0,00	0,00	0,00	78.414.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1218	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	1.140.780.336,00	0,00	0,00	0,00	1.140.780.336,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %							
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen							
1219	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2.248.200,00	0,00	0,00	0,00	2.248.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan							
1220	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi							
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok							
1221	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1222	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1223	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	98.812.484,00	0,00	0,00	0,00	98.812.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton							
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 Kelompok							
1224	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	4.936.864.927,00	1.188.384.000,00	0,00	0,00	6.125.248.927,00	Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Sulangai	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1225	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	8.728.178.650,00	0,00	0,00	0,00	8.728.178.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0,4 %							
1226	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	208.110.360,00	0,00	0,00	0,00	208.110.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1227	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	46.735.000,00	0,00	0,00	0,00	46.735.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	25 Sampel							
1228	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	34.070.600,00	0,00	0,00	0,00	34.070.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	7 Pengecer obat Hewan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1229	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan									
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	3.221.100,00	0,00	0,00	0,00	3.221.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	25 Kelompok							
1230	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	11.781.500,00	0,00	0,00	0,00	11.781.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor							
1231	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	80 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1232	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	200 Ekor	653.837.998,00	0,00	0,00	0,00	653.837.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha							
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen							
1233	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	57.317.900,00	0,00	0,00	0,00	57.317.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit							
1234	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	9.621.545.791,00	7.515.000.000,00	0,00	0,00	17.136.545.791,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1235	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya									
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	3.333.900,00	1.587.236.687,00	0,00	0,00	1.590.570.587,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1236	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
1237	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1238	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	17.690.693,00	0,00	0,00	0,00	17.690.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1239	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak									
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	3.351.917.468,00	0,00	0,00	0,00	3.351.917.468,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %							
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	13 Laporan							
1240	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	13 Laporan	3.352.938.130,00	0,00	0,00	0,00	3.352.938.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	1 Laporan							
1241	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	414.263.800,00	0,00	0,00	0,00	414.263.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	62 Lokasi							
1242	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	53.314.306,00	0,00	0,00	0,00	53.314.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1243	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	84.174.160,00	0,00	0,00	0,00	84.174.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %							
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	430 Ha							
1244	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	707.122.652,00	11.828.160,00	0,00	0,00	718.950.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1245	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	1.512.413.348,00	0,00	0,00	0,00	1.512.413.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %							
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 Kali							
1246	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	1.688.703.170,00	0,00	0,00	0,00	1.688.703.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1247	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	29.723.500,00	0,00	0,00	0,00	29.723.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1248	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32 Unit	67.162.500,00	0,00	0,00	0,00	67.162.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1249	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP	84,58							
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	7 Dokumen							
1250	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.258.000,00	0,00	0,00	0,00	7.258.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1251	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.118.535.869,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535.869,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %							
1252	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	47.858.013.568,00	0,00	0,00	0,00	47.858.013.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %							
1253	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	47.082.870,00	0,00	0,00	0,00	47.082.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1254	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	14.739.369,00	0,00	0,00	0,00	14.739.369,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %							
1255	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1256	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84.530.607,00	1.439.147.479,00	0,00	0,00	1.523.678.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1257	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.938.359,00	279.802.917,00	0,00	0,00	315.741.276,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1258	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.114.128.718,00	0,00	0,00	0,00	1.114.128.718,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1259	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.566.714,00	0,00	0,00	0,00	52.566.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1260	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	76.218.372,00	0,00	0,00	0,00	76.218.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %							
1261	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0,00	967.853.400,00	0,00	0,00	967.853.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1262	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %							
1263	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1264	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	531.636.000,00	0,00	0,00	0,00	531.636.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1265	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.296.759.020,00	0,00	0,00	0,00	2.296.759.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 %							
1266	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit	1.221.656.020,00	0,00	0,00	0,00	1.221.656.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1267	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	327.400.000,00	0,00	0,00	0,00	327.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1268	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	157.200.000,00	0,00	0,00	0,00	157.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %							
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	30, 30 orang, LPK							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1269	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6605 Orang	4.541.760.460,00	0,00	0,00	0,00	4.541.760.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1270	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja									
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	841.707.060,00	0,00	0,00	0,00	841.707.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44 Lembaga							
1271	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44 Lembaga	101.228.760,00	0,00	0,00	0,00	101.228.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	8 Perizinan							
1272	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi									
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	8 Perizinan	81.235.260,00	0,00	0,00	0,00	81.235.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %							
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	90 orang							
1273	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	90 Orang	1.148.935.900,00	0,00	0,00	0,00	1.148.935.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1300 orang							
1274	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	167.254.840,00	0,00	0,00	0,00	167.254.840,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %							
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5126 perusahaan							
1275	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	87.187.716,00	0,00	0,00	0,00	87.187.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1276	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	238.954.200,00	0,00	0,00	0,00	238.954.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %							
1277	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	60 Perkara	90.270.816,00	0,00	0,00	0,00	90.270.816,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1278	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	173.473.200,00	0,00	0,00	0,00	173.473.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1279	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35000 Orang	7.056.632.700,00	0,00	0,00	0,00	7.056.632.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %							
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
1280	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	432.251.200,00	0,00	0,00	0,00	432.251.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing	20 %							
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	1,1,20 Dokumen, Gugus, IKM							
1281	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1282	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	694.222.360,00	0,00	0,00	0,00	694.222.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1283	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	364.940.720,00	0,00	0,00	0,00	364.940.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1284	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	6.066.268.764,00	0,00	0,00	0,00	6.066.268.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1285	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri									
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.318.700,00	0,00	0,00	0,00	2.318.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha	100 %							
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Indsutri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	80 IKM							
1286	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	85.750.820,00	0,00	0,00	0,00	85.750.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIINas	100 %							
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	1 Dokumen							
1287	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	1.175.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %							
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen							
1288	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	427.962.700,00	0,00	0,00	0,00	427.962.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1289	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.095.200,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1290	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	640.300,00	0,00	0,00	0,00	640.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1291	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.821.500,00	0,00	0,00	0,00	3.821.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1292	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.672.700,00	0,00	0,00	0,00	2.672.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1293	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	126.126.480,00	0,00	0,00	0,00	126.126.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun							
1294	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	14.285.342.558,00	0,00	0,00	0,00	14.285.342.558,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1295	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	92.787.920,00	0,00	0,00	0,00	92.787.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
1296	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1297	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.716.900,00	0,00	0,00	0,00	26.716.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1298	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	223.867.616,00	0,00	0,00	0,00	223.867.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1299	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.553.000,00	0,00	0,00	0,00	14.553.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1300	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1301	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1302	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1303	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	135.081.480,00	0,00	0,00	0,00	135.081.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
1304	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1305	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
1306	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.974.720,00	0,00	0,00	0,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1307	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	68.062.000,00	891.391.600,00	0,00	0,00	959.453.600,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Daerah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-							
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
1308	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	1.458.165,00	0,00	0,00	0,00	1.458.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-							
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
1309	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84.801.364,00	0,00	0,00	0,00	84.801.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-							
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-							
1310	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	7.251.287,00	0,00	0,00	0,00	7.251.287,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-							
1311	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong									
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	151.546.575,00	0,00	0,00	0,00	151.546.575,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-							
1312	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	3.278.579.761,00	0,00	0,00	0,00	3.278.579.761,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1313	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	439.875.024,00	0,00	0,00	0,00	439.875.024,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1314	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5.177.363.951,00	0,00	0,00	0,00	5.177.363.951,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-							
1315	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	424.599.851.294,00	0,00	0,00	0,00	424.599.851.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1316	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	113.734.606,00	0,00	0,00	0,00	113.734.606,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1317	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	2.689.116.632,00	0,00	0,00	0,00	2.689.116.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-							
1318	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	344.774.906,00	0,00	0,00	0,00	344.774.906,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1319	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	3.379.876.500,00	0,00	0,00	0,00	3.379.876.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1320	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	93.245.892,00	0,00	0,00	0,00	93.245.892,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-							
1321	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	81.292.808,00	0,00	0,00	0,00	81.292.808,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1322	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	131.551.159,00	0,00	0,00	0,00	131.551.159,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1323	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	97.012.806,00	0,00	0,00	0,00	97.012.806,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-							
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-							
1324	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	22 Dokumen	104.010.759,00	0,00	0,00	0,00	104.010.759,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1325	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	171.843.097,00	0,00	0,00	0,00	171.843.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1326	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	49.829.324,00	0,00	0,00	0,00	49.829.324,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-							
1327	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	564.161.280,00	0,00	0,00	0,00	564.161.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1328	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	184.234.976,00	0,00	0,00	0,00	184.234.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1329	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	423.261.462,00	0,00	0,00	0,00	423.261.462,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-							
1330	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	97.381.309,00	0,00	0,00	0,00	97.381.309,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1331	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	748.991.208,00	0,00	0,00	0,00	748.991.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1332	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 Orang	135.577.560,00	0,00	0,00	0,00	135.577.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-							
1333	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	698.613.991,00	0,00	0,00	0,00	698.613.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1334	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	7.131.528,00	0,00	0,00	0,00	7.131.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1335	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	62.355.976,00	0,00	0,00	0,00	62.355.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1336	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	42.854.842,00	0,00	0,00	0,00	42.854.842,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1337	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.665.494,00	0,00	0,00	0,00	11.665.494,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1338	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.949.754,00	0,00	0,00	0,00	6.949.754,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1339	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang/bulan	87.633.292.328,00	0,00	0,00	0,00	87.633.292.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1340	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	809.976.903,00	0,00	0,00	0,00	809.976.903,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1341	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1342	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	9.356.634,00	0,00	0,00	0,00	9.356.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1343	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	123.797.384,00	0,00	0,00	0,00	123.797.384,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1344	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	10.647.078,00	0,00	0,00	0,00	10.647.078,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1345	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	229.777.104,00	0,00	0,00	0,00	229.777.104,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1346	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1347	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1348	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	104.204.913,00	0,00	0,00	0,00	104.204.913,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1349	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.231.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231.280.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.711.297.927,00	0,00	0,00	0,00	12.711.297.927,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1351	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	38 Unit	15.367.800.409,00	0,00	0,00	0,00	15.367.800.409,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1352	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit	4.848.090.890,00	0,00	0,00	0,00	4.848.090.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1353	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	664.890,00	312.601.863,00	0,00	0,00	313.266.753,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1354	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	177.103.951,00	0,00	0,00	0,00	177.103.951,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1355	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.543.440.584,00	0,00	0,00	0,00	15.543.440.584,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1356	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
1357	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.786.026.484,00	0,00	0,00	0,00	40.786.026.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1358	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	4.287.617.969,00	0,00	0,00	0,00	4.287.617.969,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1359	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	4.127.775.612,00	0,00	0,00	0,00	4.127.775.612,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1360	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	177.632.976,00	0,00	0,00	0,00	177.632.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1361	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit	2.023.170.945,00	0,00	0,00	0,00	2.023.170.945,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1362	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	11.064.838.613,00	696.306.410,00	0,00	0,00	11.761.145.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1363	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	8.715.574.344,00	0,00	0,00	0,00	8.715.574.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1364	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.328.895.824,00	0,00	0,00	0,00	4.328.895.824,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-							
1365	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.797.451.542,00	0,00	0,00	0,00	1.797.451.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1366	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12.874.629.825,00	0,00	0,00	0,00	12.874.629.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-							
1367	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.976.284.630,00	0,00	0,00	0,00	1.976.284.630,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1368	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.311.703.584,00	0,00	0,00	0,00	1.311.703.584,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1369	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	20.640.990.370,00	0,00	0,00	0,00	20.640.990.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-							
1370	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	230.133.092,00	0,00	0,00	0,00	230.133.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1371	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	34.783.506,00	95.460.000,00	0,00	0,00	130.243.506,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1372	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	290.594.915,00	0,00	0,00	0,00	290.594.915,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1373	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	36.117.723,00	0,00	0,00	0,00	36.117.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-							
1374	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	3.552.333.463,00	0,00	0,00	0,00	3.552.333.463,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1375	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.133.196.170,00	0,00	0,00	0,00	1.133.196.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1376	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12.186.573.008,00	0,00	0,00	0,00	12.186.573.008,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1377	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	445.513.084,00	0,00	0,00	0,00	445.513.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	85 persen							
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1378	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	2.682.864.374,00	0,00	0,00	0,00	2.682.864.374,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1379	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15.018.769.031,00	0,00	0,00	0,00	15.018.769.031,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1380	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	171.060.492,00	0,00	0,00	0,00	171.060.492,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1381	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	3.172.158,00	0,00	0,00	0,00	3.172.158,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-							
1382	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	116.198.744,00	0,00	0,00	0,00	116.198.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1383	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	117.422.075,00	0,00	0,00	0,00	117.422.075,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1384	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	114.357.254,00	0,00	0,00	0,00	114.357.254,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1385	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	124.601.342,00	0,00	0,00	0,00	124.601.342,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1386	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	197.794.193,00	0,00	0,00	0,00	197.794.193,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-							
1387	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	825.535.248,00	0,00	0,00	0,00	825.535.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1388	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	574.956.982,00	0,00	0,00	0,00	574.956.982,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1389	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	790.595.792,00	0,00	0,00	0,00	790.595.792,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1390	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	479.948.925,00	0,00	0,00	0,00	479.948.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1391	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	416.325.554,00	0,00	0,00	0,00	416.325.554,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1392	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	318.472.166,00	0,00	0,00	0,00	318.472.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1393	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	827.969.130,00	0,00	0,00	0,00	827.969.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-							
1394	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	417.236.000,00	0,00	0,00	0,00	417.236.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1395	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	4.590.209.823,00	0,00	0,00	0,00	4.590.209.823,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1396	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	2.319.459.981,00	0,00	0,00	0,00	2.319.459.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1397	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	253.474.635,00	0,00	0,00	0,00	253.474.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1398	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	3.170.704.241,00	0,00	0,00	0,00	3.170.704.241,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	13.697.127,00	0,00	0,00	0,00	13.697.127,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1400	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen	4.363.308.899,00	0,00	0,00	0,00	4.363.308.899,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-							
1401	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	10.394.489,00	0,00	0,00	0,00	10.394.489,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1402	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	6.510.568.000,00	0,00	0,00	0,00	6.510.568.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-							
1403	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	1.567.027.487,00	0,00	0,00	0,00	1.567.027.487,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-							
1404	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	18.886.721.039,00	0,00	0,00	0,00	18.886.721.039,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1405	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	5.939.024.070,00	0,00	0,00	0,00	5.939.024.070,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran	80							
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1406	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.368.900,00	0,00	0,00	0,00	7.368.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1407	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.967.500,00	0,00	0,00	0,00	2.967.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1408	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	17.219.301.992,00	0,00	0,00	0,00	17.219.301.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1409	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	10.480.842,00	0,00	0,00	0,00	10.480.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1410	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	299.906.661,00	0,00	0,00	0,00	299.906.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1411	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.185.700,00	0,00	0,00	0,00	2.185.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1412	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	657.566.775,00	0,00	0,00	0,00	657.566.775,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1413	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	91.626.504,00	0,00	0,00	0,00	91.626.504,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1414	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	46.993.959,00	1.554.000,00	0,00	0,00	48.547.959,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1415	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.205.954.631,00	0,00	0,00	0,00	2.205.954.631,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1416	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	143.278.400,00	0,00	0,00	0,00	143.278.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1417	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	552.593.439,00	0,00	0,00	0,00	552.593.439,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1418	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	767.892.000,00	0,00	0,00	0,00	767.892.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1419	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	920.552.780,00	0,00	0,00	0,00	920.552.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1420	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.710.209.739,00	0,00	0,00	0,00	1.710.209.739,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1421	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00	1.901.874.000,00	0,00	0,00	1.901.874.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	0,00	114.328.536,00	0,00	0,00	114.328.536,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1423	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	1.194.609.562,00	0,00	0,00	1.194.609.562,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1424	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	22.252.485.000,00	0,00	0,00	22.252.485.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1425	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	44.843.620,00	0,00	0,00	0,00	44.843.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1426	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	651.332.703,00	0,00	0,00	0,00	651.332.703,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1427	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	2.184.754.148,00	0,00	0,00	0,00	2.184.754.148,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1428	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	128.760.000,00	0,00	0,00	0,00	128.760.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1429	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	495 Unit	452.979.012,00	0,00	0,00	0,00	452.979.012,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-							
1430	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	585 Orang/Bulan	45.748.616.934,00	0,00	0,00	0,00	45.748.616.934,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1431	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket	2.978.752.448,00	0,00	0,00	0,00	2.978.752.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1432	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	310.462.880,00	0,00	0,00	0,00	310.462.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-							
1433	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	501.984.732,00	0,00	0,00	0,00	501.984.732,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1434	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	1.246.225.900,00	0,00	0,00	0,00	1.246.225.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %							
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %							
1435	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	213.973.532,00	0,00	0,00	0,00	213.973.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1436	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	7.967.000,00	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1437	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	68.118.614,00	0,00	0,00	0,00	68.118.614,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1438	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan	36.436.995,00	0,00	0,00	0,00	36.436.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1439	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	738.077.644,00	0,00	0,00	0,00	738.077.644,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %							
1440	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	50.100.376,00	0,00	0,00	0,00	50.100.376,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %							
1441	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	77.251.130,00	0,00	0,00	0,00	77.251.130,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1442	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	235.001.740,00	0,00	0,00	0,00	235.001.740,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %							
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	100 %							
1443	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	13.885.547,00	0,00	0,00	0,00	13.885.547,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1444	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	6.755.577,00	0,00	0,00	0,00	6.755.577,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1445	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	5.760.559,00	0,00	0,00	0,00	5.760.559,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1446	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	7.034.520,00	0,00	0,00	0,00	7.034.520,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1447	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	12.791.236,00	0,00	0,00	0,00	12.791.236,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1448	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	5.962.742,00	0,00	0,00	0,00	5.962.742,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1449	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	49.306.963,00	0,00	0,00	0,00	49.306.963,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1450	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	144.458.131,00	0,00	0,00	0,00	144.458.131,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %							
1451	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	21.973.968,00	0,00	0,00	0,00	21.973.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1452	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	48.267.518,00	0,00	0,00	0,00	48.267.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1453	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	21.843.971,00	0,00	0,00	0,00	21.843.971,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1454	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	48.253.310,00	0,00	0,00	0,00	48.253.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1455	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	23.685.255,00	0,00	0,00	0,00	23.685.255,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1456	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	48.021.875,00	0,00	0,00	0,00	48.021.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1457	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	21.501.980,00	0,00	0,00	0,00	21.501.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1458	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	48.031.643,00	0,00	0,00	0,00	48.031.643,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %							
1459	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	116.576.758,00	0,00	0,00	0,00	116.576.758,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1460	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	46.580.268,00	0,00	0,00	0,00	46.580.268,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1461	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	961.023.762,00	0,00	0,00	0,00	961.023.762,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1462	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	45.890.150,00	0,00	0,00	0,00	45.890.150,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1463	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	88.547.580,00	0,00	0,00	0,00	88.547.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1464	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	45.431.214,00	0,00	0,00	0,00	45.431.214,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1465	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	30.165.206,00	0,00	0,00	0,00	30.165.206,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1466	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	103.249.616,00	0,00	0,00	0,00	103.249.616,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1467	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.879.247,00	0,00	0,00	0,00	17.879.247,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1468	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
1469	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1470	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.720.862,00	0,00	0,00	0,00	14.720.862,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	98.458.575,00	0,00	0,00	0,00	98.458.575,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %							
1472	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	20.224.448.832,00	0,00	0,00	0,00	20.224.448.832,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1473	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.978.464,00	0,00	0,00	0,00	1.978.464,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	71.087.649,00	0,00	0,00	0,00	71.087.649,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1475	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.996.264,00	0,00	0,00	0,00	17.996.264,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1476	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.334.308,00	0,00	0,00	0,00	2.334.308,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1477	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.942.605,00	0,00	0,00	0,00	7.942.605,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1478	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	58.791.297,00	290.650.650,00	0,00	0,00	349.441.947,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1479	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	4.703.292,00	0,00	0,00	0,00	4.703.292,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	197.041.674,00	0,00	0,00	0,00	197.041.674,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	38.641.764,00	0,00	0,00	0,00	38.641.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1482	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1483	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0,00	14.914.293,00	0,00	0,00	14.914.293,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1484	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1485	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1486	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	121.550.700,00	0,00	0,00	0,00	121.550.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1487	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	444.931.260,00	0,00	0,00	0,00	444.931.260,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1488	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1489	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1490	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%							
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %							
1491	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	261.325.652,00	0,00	0,00	0,00	261.325.652,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1492	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	225.090.726,00	0,00	0,00	0,00	225.090.726,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1493	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	362.872.320,00	0,00	0,00	0,00	362.872.320,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1494	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	358.979.550,00	0,00	0,00	0,00	358.979.550,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1495	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	35 Dokumen	29.937.144,00	0,00	0,00	0,00	29.937.144,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	3.049.588.078,00	0,00	0,00	0,00	3.049.588.078,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %							
1497	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38 Dokumen	285.531.960,00	0,00	0,00	0,00	285.531.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1498	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38 Dokumen	5.432.451,00	0,00	0,00	0,00	5.432.451,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1499	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	1.686.090,00	0,00	0,00	942.729.228.438,00	942.730.914.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1500	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	227.235.426,00	0,00	0,00	0,00	227.235.426,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %							
1501	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	30.920.604,00	0,00	0,00	0,00	30.920.604,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1502	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	159.757.854,00	0,00	0,00	0,00	159.757.854,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1503	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	28.190.781,00	0,00	0,00	0,00	28.190.781,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1504	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	411.323.931,00	0,00	0,00	0,00	411.323.931,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1505	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	12.537.561,00	0,00	0,00	0,00	12.537.561,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1506	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	33.694.938,00	0,00	0,00	0,00	33.694.938,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %							
1507	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	70.756.644,00	0,00	0,00	650.320.473.189,00	650.391.229.833,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1508	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	72.086.033.246,00	0,00	72.086.033.246,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%							
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %							
1509	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	276.548.175,00	0,00	0,00	0,00	276.548.175,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	24.071.571,00	0,00	0,00	0,00	24.071.571,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1511	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	125.079.673,00	0,00	0,00	0,00	125.079.673,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1512	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.381.699,00	0,00	0,00	0,00	30.381.699,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1513	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	148.539.487,00	0,00	0,00	0,00	148.539.487,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1514	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	38 Laporan	1.071.295.240,00	73.615.200,00	0,00	0,00	1.144.910.440,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1515	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.569.575.194,00	160.000.000,00	0,00	0,00	3.729.575.194,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1516	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	483.170.068,00	0,00	0,00	0,00	483.170.068,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1517	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	27.150.158,00	0,00	0,00	0,00	27.150.158,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1518	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.367.243.793,00	0,00	0,00	0,00	1.367.243.793,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1519	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	16.012.231,00	0,00	0,00	0,00	16.012.231,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1520	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	26.437.893,00	0,00	0,00	0,00	26.437.893,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1521	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	12.566.958,00	0,00	0,00	0,00	12.566.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %							
1522	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.593.835,00	0,00	0,00	0,00	15.593.835,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1523	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.015.539,00	0,00	0,00	0,00	1.015.539,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1524	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.724.382,00	0,00	0,00	0,00	4.724.382,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan							
1525	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	56.833.948.588,00	0,00	0,00	0,00	56.833.948.588,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1526	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	48.181.770,00	0,00	0,00	0,00	48.181.770,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1527	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	11.879.220,00	0,00	0,00	0,00	11.879.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1528	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.262.291,00	0,00	0,00	0,00	2.262.291,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan							
1529	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.919.850,00	0,00	0,00	0,00	7.919.850,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1530	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	1.333.770.921,00	0,00	0,00	1.333.770.921,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1531	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.293.029,00	0,00	0,00	0,00	11.293.029,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	391.866.691,00	0,00	0,00	0,00	391.866.691,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1533	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	292.005.002,00	0,00	0,00	0,00	292.005.002,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1534	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	41.696.928,00	0,00	0,00	0,00	41.696.928,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1535	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.111.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	1 unit							
1536	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	320.445.000,00	0,00	0,00	320.445.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan							
1537	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23.620.843,00	0,00	0,00	0,00	23.620.843,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1538	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	402.930.000,00	0,00	0,00	0,00	402.930.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1539	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
1540	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	214.990.000,00	0,00	0,00	0,00	214.990.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan							
1541	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.623.820,00	0,00	0,00	0,00	120.623.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1542	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	261.237.700,00	0,00	0,00	0,00	261.237.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1543	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00	12.210.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1544	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	298.139.800,00	0,00	0,00	0,00	298.139.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1545	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	173 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	[object Object]
		Badan Pendapatan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak							
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1546	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.291.303,00	0,00	0,00	0,00	250.291.303,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1547	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	353.064.678,00	0,00	0,00	0,00	353.064.678,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1548	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	700 Unit	1.333.322.010,00	0,00	0,00	0,00	1.333.322.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1549	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	881.052.444,00	0,00	0,00	0,00	881.052.444,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1550	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	1.808.539.662,00	0,00	0,00	0,00	1.808.539.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1551	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	212267 Obyek Pajak	3.312.487.698,00	0,00	0,00	0,00	3.312.487.698,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1552	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	102.119.001,00	0,00	0,00	0,00	102.119.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1553	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	3.135.084,00	0,00	0,00	0,00	3.135.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1554	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	823.889.925,00	0,00	0,00	0,00	823.889.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1555	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	810.291.117,00	0,00	0,00	0,00	810.291.117,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1556	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	9.457.496,00	0,00	0,00	0,00	9.457.496,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1557	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.978.839.096,00	0,00	0,00	0,00	1.978.839.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1558	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	456.747.795,00	0,00	0,00	0,00	456.747.795,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	2.027.304,00	0,00	0,00	0,00	2.027.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen							
1560	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	12.861.568,00	0,00	0,00	0,00	12.861.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.271.835,00	0,00	0,00	0,00	4.271.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1562	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	6.375.001,00	0,00	0,00	0,00	6.375.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan							
1563	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/bulan	205.897.571.725,00	0,00	0,00	0,00	205.897.571.725,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan							
1564	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.397.810,00	0,00	0,00	0,00	14.397.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.409.887,00	0,00	0,00	0,00	36.409.887,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1566	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	550.255.473,00	0,00	0,00	0,00	550.255.473,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1567	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.943.060,00	0,00	0,00	0,00	107.943.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1568	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	516 Dokumen	66.848.400,00	0,00	0,00	0,00	66.848.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %							
1570	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1571	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0,00	170.372.568,00	0,00	0,00	170.372.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1572	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	866.194.605,00	0,00	0,00	866.194.605,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %							
1573	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	14.620.000,00	0,00	0,00	0,00	14.620.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1574	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	168.426.600,00	0,00	0,00	0,00	168.426.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan							
1575	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.444.500,00	0,00	0,00	0,00	46.444.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1576	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	820.662.300,00	0,00	0,00	0,00	820.662.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1577	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	807.008.452,00	0,00	0,00	0,00	807.008.452,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1578	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %							
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %							
1579	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11.722.908,00	0,00	0,00	0,00	11.722.908,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1580	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	350.800.248,00	0,00	0,00	0,00	350.800.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	465 Dokumen	13.246.202,00	0,00	0,00	0,00	13.246.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1582	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	33.558.308,00	0,00	0,00	0,00	33.558.308,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1583	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	84.791.300,00	0,00	0,00	0,00	84.791.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %							
1584	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	4.403.636,00	0,00	0,00	0,00	4.403.636,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1585	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3200 Dokumen	180.181.680,00	0,00	0,00	0,00	180.181.680,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1586	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	74.104.649,00	0,00	0,00	0,00	74.104.649,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %							
1587	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	646.937.700,00	0,00	0,00	0,00	646.937.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1588	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	17.485.100,00	0,00	0,00	0,00	17.485.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1589	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	395.994.500,00	0,00	0,00	0,00	395.994.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1590	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	17.131.700,00	0,00	0,00	0,00	17.131.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1591	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	15.824.900,00	0,00	0,00	0,00	15.824.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1592	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN									
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	29.533.500,00	0,00	0,00	0,00	29.533.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %							
1593	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	14.569.361,00	0,00	0,00	0,00	14.569.361,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1594	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	8.569.361,00	0,00	0,00	0,00	8.569.361,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1595	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	3.200.936,00	0,00	0,00	0,00	3.200.936,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1596	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	810 Orang	1.259.654.296,00	0,00	0,00	0,00	1.259.654.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 Orang	3.376.500,00	0,00	0,00	0,00	3.376.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1.616.400,00	0,00	0,00	0,00	1.616.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %							
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
1599	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.044.130,00	0,00	0,00	0,00	13.044.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.462.692,00	0,00	0,00	0,00	13.462.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
1601	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	23.000.221.932,00	0,00	0,00	0,00	23.000.221.932,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %							
1603	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.091.750,00	0,00	0,00	0,00	25.091.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1604	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1605	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	152.254.000,00	0,00	0,00	0,00	152.254.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1606	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.536.600,00	0,00	0,00	0,00	37.536.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1607	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.454.800,00	0,00	0,00	0,00	57.454.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1608	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	9.812.400,00	0,00	0,00	9.812.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1609	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.379.500,00	0,00	0,00	0,00	47.379.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1610	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
1611	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.975.200,00	0,00	0,00	0,00	90.975.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1612	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	231.060.000,00	0,00	0,00	0,00	231.060.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1613	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1614	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	61.970.000,00	0,00	0,00	0,00	61.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1615	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	32.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %							
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %							
1616	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	56.021.460,00	0,00	0,00	0,00	56.021.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1617	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	587 Orang	8.240.247.416,00	0,00	0,00	0,00	8.240.247.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi	100 %							
1618	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang	1.002.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.595.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1619	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga									
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	12 Dokumen	15.529.100,00	0,00	0,00	0,00	15.529.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1620	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	6.503.672.300,00	0,00	0,00	0,00	6.503.672.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %							
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan							
1621	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	24.538.512,00	0,00	0,00	0,00	24.538.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1622	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1.746.402.100,00	0,00	0,00	0,00	1.746.402.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1623	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	444.855.060,00	0,00	0,00	0,00	444.855.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen							
1624	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	524.731.100,00	0,00	0,00	0,00	524.731.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1625	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	82.080.697,00	0,00	0,00	0,00	82.080.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1626	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	213.688.800,00	0,00	0,00	0,00	213.688.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	230.950.242,00	0,00	0,00	0,00	230.950.242,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1628	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	251.715.737,00	0,00	0,00	0,00	251.715.737,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1629	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	233.024.832,00	0,00	0,00	0,00	233.024.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen							
1630	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	315.943.455,00	0,00	0,00	0,00	315.943.455,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1631	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	240.208.900,00	0,00	0,00	0,00	240.208.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1632	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	207.851.355,00	0,00	0,00	0,00	207.851.355,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1633	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	237.818.165,00	0,00	0,00	0,00	237.818.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1634	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	335.078.106,00	0,00	0,00	0,00	335.078.106,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1635	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	239.430.800,00	0,00	0,00	0,00	239.430.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1636	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	627.726.240,00	0,00	0,00	0,00	627.726.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1637	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1.195.481.187,00	0,00	0,00	0,00	1.195.481.187,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1638	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	2.003.887.205,00	0,00	0,00	0,00	2.003.887.205,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1639	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	134.213.825,00	0,00	0,00	0,00	134.213.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1640	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	199.016.860,00	0,00	0,00	0,00	199.016.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)	100 %							
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen							
1641	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	18.414.567,00	0,00	0,00	0,00	18.414.567,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah	2 Laporan							
1642	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	14.835.144.593,00	0,00	0,00	0,00	14.835.144.593,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1643	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	13.632.893,00	0,00	0,00	0,00	13.632.893,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	7 Paket							
1644	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.377.700,00	0,00	0,00	0,00	7.377.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1645	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	285.195.855,00	0,00	0,00	0,00	285.195.855,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1646	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.730.227,00	0,00	0,00	0,00	42.730.227,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ketersediaan barang milik daerah	8 Unit							
1647	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	387.750.000,00	0,00	0,00	387.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1648	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0,00	29.303.456,00	0,00	0,00	29.303.456,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan							
1649	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	42.314.804,00	0,00	0,00	0,00	42.314.804,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1650	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.519.400,00	0,00	0,00	0,00	14.519.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1651	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	87.901.416,00	0,00	0,00	0,00	87.901.416,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan							
1652	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.974.720,00	0,00	0,00	0,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1653	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	459.649.064,00	0,00	0,00	0,00	459.649.064,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1654	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.844.375,00	0,00	0,00	0,00	2.844.375,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1655	5.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	72.069.192,00	0,00	0,00	0,00	72.069.192,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Inspektorat									
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01		INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %							
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %							
1656	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	208.610.968,00	0,00	0,00	0,00	208.610.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1657	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	75.376.563,00	0,00	0,00	0,00	75.376.563,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1658	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	81.753.589,00	0,00	0,00	0,00	81.753.589,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1659	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	15.250.432,00	0,00	0,00	0,00	15.250.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1660	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	52.195.658,00	0,00	0,00	0,00	52.195.658,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1661	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	5.983.722,00	0,00	0,00	0,00	5.983.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %							
1662	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	590.222.458,00	0,00	0,00	0,00	590.222.458,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %							
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %							
1663	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	882.098.421,00	0,00	0,00	0,00	882.098.421,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1664	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	2.207.553,00	0,00	0,00	0,00	2.207.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1665	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1.812.291.549,00	0,00	0,00	0,00	1.812.291.549,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1666	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	5.949.659,00	0,00	0,00	0,00	5.949.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %							
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
1667	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.039.042,00	0,00	0,00	0,00	9.039.042,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1668	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1669	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.133.476,00	0,00	0,00	0,00	5.133.476,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
1670	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	33.456.306.755,00	0,00	0,00	0,00	33.456.306.755,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %							
1671	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.309.460,00	0,00	0,00	0,00	5.309.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1672	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	189.878.780,00	0,00	0,00	0,00	189.878.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1673	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.518.520,00	0,00	0,00	0,00	28.518.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1674	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	41.743.200,00	0,00	0,00	0,00	41.743.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1675	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1676	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0,00	714.143.142,00	0,00	0,00	714.143.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1677	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	3.347.871.572,00	0,00	0,00	3.347.871.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %							
1678	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.942.708,00	0,00	0,00	0,00	15.942.708,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1679	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1680	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.329.634,00	0,00	0,00	0,00	37.329.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
1681	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	73.970.000,00	0,00	0,00	0,00	73.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1682	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	271.200.000,00	0,00	0,00	0,00	271.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1683	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	36.870.000,00	0,00	0,00	0,00	36.870.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1684	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Petang									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined undefined							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	undefined undefined							
1685	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	8.857.500,00	0,00	0,00	0,00	8.857.500,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1686	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen	1.835.600,00	0,00	0,00	0,00	1.835.600,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1687	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	683.558.716,00	0,00	0,00	0,00	683.558.716,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1688	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	31.141.133,00	0,00	0,00	0,00	31.141.133,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1689	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	50.638.200,00	0,00	0,00	0,00	50.638.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1690	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	2.099.159.750,00	0,00	0,00	0,00	2.099.159.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-							
1691	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	10.648.500,00	0,00	0,00	0,00	10.648.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-							
1692	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	78.125.300,00	0,00	0,00	0,00	78.125.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1693	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	301.862.468,00	0,00	0,00	0,00	301.862.468,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1694	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	37.312.800,00	0,00	0,00	0,00	37.312.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket							
1695	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	29.116.100,00	0,00	0,00	0,00	29.116.100,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1696	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	26.707.400,00	0,00	0,00	0,00	26.707.400,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1697	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1698	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.555.700,00	0,00	0,00	0,00	11.555.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1699	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	[object Object]
1700	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.921.200,00	0,00	0,00	0,00	8.921.200,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1701	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	8.213.042.692,00	0,00	0,00	0,00	8.213.042.692,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1702	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1703	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1704	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	347.734.200,00	0,00	0,00	0,00	347.734.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1705	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.316.900,00	0,00	0,00	0,00	21.316.900,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1706	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.636.800,00	0,00	0,00	0,00	40.636.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1707	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1708	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	10.576.635,00	0,00	0,00	10.576.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1709	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0,00	5.829.720,00	0,00	0,00	5.829.720,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1710	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1711	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.057.760,00	0,00	0,00	0,00	21.057.760,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1712	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.270.000,00	0,00	0,00	0,00	79.270.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1713	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.001.516.500,00	0,00	0,00	0,00	1.001.516.500,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1714	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	354.836.300,00	0,00	0,00	0,00	354.836.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1715	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	23.870.000,00	0,00	0,00	0,00	23.870.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1716	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	53.992.000,00	0,00	0,00	0,00	53.992.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Abiansemai									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Paket							
1717	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	12.338.700,00	0,00	0,00	0,00	12.338.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7186 Paket							
1718	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	260 Dokumen	1.624.900,00	0,00	0,00	0,00	1.624.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1719	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6926 Laporan	576.984.416,00	0,00	0,00	0,00	576.984.416,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket							
1720	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarakatan	32.951.900,00	0,00	0,00	0,00	32.951.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1721	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	55.582.900,00	0,00	0,00	0,00	55.582.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1722	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2.590.268.400,00	0,00	0,00	0,00	2.590.268.400,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35 Paket							
1723	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	17.240.600,00	0,00	0,00	0,00	17.240.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Laporan							
1724	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	27.562.500,00	0,00	0,00	0,00	27.562.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	241 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1725	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 Orang	375.624.377,00	0,00	0,00	0,00	375.624.377,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1726	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	67.490.600,00	0,00	0,00	0,00	67.490.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket							
1727	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	26.656.700,00	0,00	0,00	0,00	26.656.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1728	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	83.072.300,00	0,00	0,00	0,00	83.072.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Paket							
1729	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.930.900,00	0,00	0,00	0,00	7.930.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1730	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	[object Object]
1731	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	5.574.300,00	0,00	0,00	0,00	5.574.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 Paket							
1732	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.019.359.567,00	0,00	0,00	0,00	13.019.359.567,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	184 Paket							
1733	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1734	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	389.544.028,00	0,00	0,00	0,00	389.544.028,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1735	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.613.600,00	0,00	0,00	0,00	21.613.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1736	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	33.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1737	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	[object Object]
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104 Unit							
1738	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Unit	0,00	272.888.616,00	0,00	0,00	272.888.616,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1739	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	11.474.265,00	0,00	0,00	11.474.265,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1740	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	[object Object]
1741	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan							
1742	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.240.073,00	0,00	0,00	0,00	27.240.073,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1743	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.272.040,00	0,00	0,00	0,00	90.272.040,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1744	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	457.689.272,00	0,00	0,00	0,00	457.689.272,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Paket							
1745	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	348.676.020,00	0,00	0,00	0,00	348.676.020,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1746	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	35.677.500,00	0,00	0,00	0,00	35.677.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1747	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	221.200.000,00	0,00	0,00	0,00	221.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Mengwi									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10 Paket							
1748	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.203.436,00	0,00	0,00	0,00	8.203.436,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13 Paket							
1749	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	6.667.058.178,00	0,00	0,00	0,00	6.667.058.178,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30 Paket							
1750	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	37.273.132,00	0,00	0,00	0,00	37.273.132,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1751	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	54.049.183,00	0,00	0,00	0,00	54.049.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1752	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	2.225.951.910,00	0,00	0,00	0,00	2.225.951.910,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Paket							
1753	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	9.769.400,00	0,00	0,00	0,00	9.769.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan							
1754	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	67.156.600,00	0,00	0,00	0,00	67.156.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151 Paket							
1755	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	476.448.081,00	0,00	0,00	0,00	476.448.081,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1756	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	67.537.500,00	0,00	0,00	0,00	67.537.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Paket							
1757	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	20.949.536,00	0,00	0,00	0,00	20.949.536,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1758	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	11.794.036,00	0,00	0,00	0,00	11.794.036,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1759	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen	54.612.100,00	0,00	0,00	0,00	54.612.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Paket							
1760	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	9.070.484,00	0,00	0,00	0,00	9.070.484,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1761	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1762	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.743.304,00	0,00	0,00	0,00	5.743.304,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114 Paket							
1763	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	25.076.525.363,00	0,00	0,00	0,00	25.076.525.363,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket							
1764	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.652.984,00	0,00	0,00	0,00	29.652.984,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1765	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.273.681.287,00	0,00	0,00	0,00	1.273.681.287,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1766	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.006.135,00	0,00	0,00	0,00	35.006.135,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1767	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	73.286.640,00	0,00	0,00	0,00	73.286.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1768	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180 Unit							
1769	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	0,00	3.414.187.950,00	0,00	0,00	3.414.187.950,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1770	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	356 Unit	388.500,00	1.760.992.911,00	0,00	0,00	1.761.381.411,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1771	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	180 Unit	5.815.513,00	4.677.302.682,00	0,00	0,00	4.683.118.195,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1772	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1773	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	28.010.184,00	736.715.719,00	0,00	0,00	764.725.903,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan							
1774	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	62.117.949,00	0,00	0,00	0,00	62.117.949,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1775	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	492.470.600,00	0,00	0,00	0,00	492.470.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1776	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.358.298.044,00	0,00	0,00	0,00	2.358.298.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169 Paket							
1777	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	609.884.524,00	0,00	0,00	0,00	609.884.524,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1778	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	49.945.000,00	0,00	0,00	0,00	49.945.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1779	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	235.801.278,00	1.745.778.733,00	0,00	0,00	1.981.580.011,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kapal									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1780	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	13.366.700,00	0,00	0,00	0,00	13.366.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1781	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1890 Unit	4.741.483.222,00	0,00	0,00	0,00	4.741.483.222,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1782	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	1.224.355.375,00	0,00	0,00	0,00	1.224.355.375,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Sempidi									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1783	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.196.500,00	0,00	0,00	0,00	13.196.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1784	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1303 Unit	652.454.485,00	0,00	0,00	0,00	652.454.485,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1785	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.339.366.307,00	0,00	0,00	0,00	2.339.366.307,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Abianbase									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1786	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.566.700,00	0,00	0,00	0,00	10.566.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1787	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	2.429.300.609,00	0,00	0,00	0,00	2.429.300.609,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Sading									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1788	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.116.700,00	0,00	0,00	0,00	11.116.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1789	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95 Unit	255.658.500,00	0,00	0,00	0,00	255.658.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1790	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	1.108.198.434,00	0,00	0,00	0,00	1.108.198.434,00	Kab. Badung, Mengwi, Sading	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Lukluk									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1791	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.116.700,00	0,00	0,00	0,00	10.116.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1792	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	658.991.472,00	0,00	0,00	0,00	658.991.472,00	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kuta Utara									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Paket							
1793	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	22.127.500,00	0,00	0,00	0,00	22.127.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	3 Paket							
1794	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	734.104.314,00	0,00	0,00	0,00	734.104.314,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20 Paket							
1795	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	5.379.512.919,00	0,00	0,00	0,00	5.379.512.919,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket							
1796	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	47.473.818,00	0,00	0,00	0,00	47.473.818,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1797	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	47.080.958,00	0,00	0,00	0,00	47.080.958,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1798	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.514.779.681,00	0,00	0,00	0,00	2.514.779.681,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-							
1799	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.465.831,00	0,00	0,00	0,00	10.465.831,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1800	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	71.871.942,00	0,00	0,00	0,00	71.871.942,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Paket							
1801	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Orang	420.523.066,00	0,00	0,00	0,00	420.523.066,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1802	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	106.348.515,00	0,00	0,00	0,00	106.348.515,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Paket							
1803	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	801.928.050,00	0,00	0,00	0,00	801.928.050,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1804	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	13.160.800,00	0,00	0,00	0,00	13.160.800,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1805	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	23.558.300,00	0,00	0,00	0,00	23.558.300,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket							
1806	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	140.966.015,00	0,00	0,00	0,00	140.966.015,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1807	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.902.998,00	0,00	0,00	0,00	9.902.998,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81 orang							
1808	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	17.469.210.635,00	0,00	0,00	0,00	17.469.210.635,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket							
1809	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.972.690,00	0,00	0,00	0,00	3.972.690,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1810	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	725.895.500,00	0,00	0,00	0,00	725.895.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1811	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.295.886,00	0,00	0,00	0,00	40.295.886,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1812	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	396 Dokumen	58.185.600,00	0,00	0,00	0,00	58.185.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1813	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27 Unit	0,00	2.116.422.570,00	0,00	0,00	2.116.422.570,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1814	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	415 Unit	0,00	151.890.846,00	0,00	0,00	151.890.846,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1815	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	308 Unit	110.211.567,00	1.413.553.809,00	0,00	0,00	1.523.765.376,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan							
1816	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	61.480.955,00	0,00	0,00	0,00	61.480.955,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1817	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	279.740.316,00	0,00	0,00	0,00	279.740.316,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1818	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	759.406.435,00	0,00	0,00	0,00	759.406.435,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1819	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	124.425.320,00	0,00	0,00	0,00	124.425.320,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1820	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	424.267.852,00	0,00	0,00	0,00	424.267.852,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1821	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	87.700.212,00	0,00	0,00	0,00	87.700.212,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1822	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	323.165.400,00	0,00	0,00	0,00	323.165.400,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kerobokan Kelod									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	3 Paket							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket							
1823	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga kemasyarakatan	6.919.744,00	0,00	0,00	0,00	6.919.744,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1824	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	124.542.000,00	178.571.250,00	0,00	0,00	303.113.250,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1825	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.188.579.067,00	0,00	0,00	0,00	1.188.579.067,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kerobokan Kaja									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	3 Paket							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket							
1826	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.722.139,00	0,00	0,00	0,00	6.722.139,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1827	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2.253.300,00	496.226.615,00	0,00	0,00	498.479.915,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1828	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	578.801.364,00	0,00	0,00	0,00	578.801.364,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kerobokan									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	3 Paket							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket							
1829	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.434.768,00	0,00	0,00	0,00	6.434.768,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1830	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	285 Unit	321.702.975,00	101.458.440,00	0,00	0,00	423.161.415,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1831	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.138.499.060,00	0,00	0,00	0,00	1.138.499.060,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kuta									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta	100 %							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8 paket							
1832	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.065.975.300,00	0,00	0,00	0,00	1.065.975.300,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1833	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	70.466.352,00	0,00	0,00	0,00	70.466.352,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 paket							
1834	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	3.553.699.484,00	0,00	0,00	0,00	3.553.699.484,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 paket							
1835	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	23.456.700,00	0,00	0,00	0,00	23.456.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1836	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	23.636.000,00	0,00	0,00	0,00	23.636.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1837	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.476.775.560,00	0,00	0,00	0,00	2.476.775.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket							
1838	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
1839	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
1840	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.213.503.500,00	0,00	0,00	0,00	1.213.503.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	4 paket							
1841	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	20.308.100,00	0,00	0,00	0,00	20.308.100,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 laporan							
1842	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	98.906.400,00	0,00	0,00	0,00	98.906.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 paket							
1843	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	219.961.400,00	0,00	0,00	0,00	219.961.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1844	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	54.311.200,00	0,00	0,00	0,00	54.311.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen							
1845	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.403.800,00	0,00	0,00	0,00	7.403.800,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1846	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	[object Object]
1847	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.980.200,00	0,00	0,00	0,00	5.980.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Paket							
1848	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	18.696.717.767,00	0,00	0,00	0,00	18.696.717.767,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket							
1849	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	347.765.900,00	0,00	0,00	0,00	347.765.900,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1850	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.087.068.200,00	0,00	0,00	0,00	1.087.068.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1851	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.934.700,00	0,00	0,00	0,00	54.934.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1852	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	108.031.200,00	0,00	0,00	0,00	108.031.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1853	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	38.034.000,00	0,00	0,00	0,00	38.034.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit							
1854	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0,00	4.314.612.682,00	0,00	0,00	4.314.612.682,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1855	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	867.265.200,00	0,00	0,00	867.265.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1856	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	148.811.817,00	2.420.729.144,00	0,00	0,00	2.569.540.961,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1857	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	499.500.000,00	0,00	0,00	499.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan							
1858	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	124.662.400,00	0,00	0,00	0,00	124.662.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1859	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	465.378.900,00	0,00	0,00	0,00	465.378.900,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1860	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.240.661.032,00	0,00	0,00	0,00	2.240.661.032,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 paket							
1861	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.677.200,00	0,00	0,00	0,00	120.677.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1862	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	620.640.700,00	0,00	0,00	0,00	620.640.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1863	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	262.764.400,00	0,00	0,00	0,00	262.764.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1864	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.402.000.000,00	197.575.000,00	0,00	0,00	3.599.575.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Tuban									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1865	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1866	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	199.474.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	285.874.000,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1867	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.038.347.230,00	0,00	0,00	0,00	1.038.347.230,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kuta									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket							
1868	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1869	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	452.247.000,00	185.605.500,00	0,00	0,00	637.852.500,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1870	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.658.147.400,00	0,00	0,00	0,00	1.658.147.400,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Kedonganan									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1871	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1872	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	307.920.000,00	332.428.200,00	0,00	0,00	640.348.200,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1873	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2.389.888.064,00	0,00	0,00	0,00	2.389.888.064,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Legian									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1874	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1875	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	726.996.500,00	16.797.600,00	0,00	0,00	743.794.100,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1876	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.183.175.030,00	0,00	0,00	0,00	1.183.175.030,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Seminyak									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1877	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.865.800,00	0,00	0,00	0,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1878	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	18.113.000,00	30.419.700,00	0,00	0,00	48.532.700,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
1879	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	191.217.200,00	0,00	0,00	0,00	191.217.200,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kecamatan Kuta Selatan									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen							
1880	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.132.100,00	0,00	0,00	0,00	11.132.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 paket							
1881	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	625.688.480,00	0,00	0,00	0,00	625.688.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 paket							
1882	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	5.230.681.744,00	0,00	0,00	0,00	5.230.681.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket							
1883	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	35.438.775,00	0,00	0,00	0,00	35.438.775,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1884	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	999.400,00	0,00	0,00	0,00	999.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1885	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.764.938.886,00	0,00	0,00	0,00	2.764.938.886,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan							
1886	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	138.825.900,00	0,00	0,00	0,00	138.825.900,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan							
1887	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	419.756.480,00	0,00	0,00	0,00	419.756.480,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang,Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65 Orang							
1888	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	308.761.010,00	0,00	0,00	0,00	308.761.010,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1889	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	96.374.000,00	0,00	0,00	0,00	96.374.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 paket							
1890	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	376.322.691,00	0,00	0,00	0,00	376.322.691,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1891	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	7.014.700,00	0,00	0,00	0,00	7.014.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1892	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	23.729.600,00	0,00	0,00	0,00	23.729.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	14 Paket							
1893	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.393.800,00	0,00	0,00	0,00	10.393.800,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1894	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1895	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	654.610.500,00	0,00	0,00	0,00	654.610.500,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket undefined undefined							
1896	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.253.943.149,00	0,00	0,00	0,00	13.253.943.149,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket							
1897	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.906.400,00	0,00	0,00	0,00	14.906.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1898	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	710.532.355,00	0,00	0,00	0,00	710.532.355,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1899	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	69.019.000,00	0,00	0,00	0,00	69.019.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1900	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	71.808.000,00	0,00	0,00	0,00	71.808.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1901	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1902	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	1.871.689.770,00	0,00	0,00	1.871.689.770,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1903	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	428 Unit	0,00	449.963.364,00	0,00	0,00	449.963.364,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1904	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	0,00	875.022.990,00	0,00	0,00	875.022.990,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1905	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan							
1906	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	82.018.424,00	0,00	0,00	0,00	82.018.424,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1907	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	351.843.196,00	0,00	0,00	0,00	351.843.196,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1908	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	933.642.996,00	0,00	0,00	0,00	933.642.996,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 paket							
1909	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	121.374.320,00	0,00	0,00	0,00	121.374.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1910	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	625.728.700,00	0,00	0,00	0,00	625.728.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1911	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	603 Unit	83.250.000,00	0,00	0,00	0,00	83.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1912	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	326.910.000,00	751.005.145,00	0,00	0,00	1.077.915.145,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Benoa									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket							
1913	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.596.050,00	0,00	0,00	0,00	4.596.050,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1914	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2359 Unit	306.523.000,00	0,00	0,00	0,00	306.523.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1915	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	910.005.058,00	0,00	0,00	0,00	910.005.058,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Tanjung Benoa									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket							
1916	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.596.050,00	0,00	0,00	0,00	4.596.050,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1917	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	372 Unit	367.965.000,00	0,00	0,00	0,00	367.965.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1918	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.612.779.051,00	0,00	0,00	0,00	1.612.779.051,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Kelurahan Jimbaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket							
1919	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.596.050,00	0,00	0,00	0,00	4.596.050,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1920	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1444 Unit	191.489.400,00	0,00	0,00	0,00	191.489.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1921	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.085.254.760,00	0,00	0,00	0,00	1.085.254.760,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %							
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1922	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	139.815.050,00	0,00	0,00	0,00	139.815.050,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1923	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7500 Orang	910.869.400,00	0,00	0,00	0,00	910.869.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1924	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	2.998.300,00	0,00	0,00	0,00	2.998.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1925	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka									
			Jumlah Paskibraka	79 Orang	3.259.035.100,00	0,00	0,00	0,00	3.259.035.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	persentase tercapainya pelaksanaan bidang pendidikan politik, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik	100 %							
1926	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	20.660.225.700,00	0,00	0,00	0,00	20.660.225.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1927	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	663.292.500,00	0,00	0,00	0,00	663.292.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1928	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	104.679.500,00	0,00	0,00	0,00	104.679.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %							
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %							
1929	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	2.461.985.600,00	0,00	0,00	0,00	2.461.985.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1930	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	12.546.600,00	0,00	0,00	0,00	12.546.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %							
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1931	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5500 Orang	2.508.070.732,00	0,00	0,00	0,00	2.508.070.732,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1932	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	400.985.200,00	0,00	0,00	0,00	400.985.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %							
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100 %							
1933	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	878.400.500,00	0,00	0,00	0,00	878.400.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1934	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.532.900,00	0,00	0,00	0,00	90.532.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %							
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
1935	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.643.800,00	0,00	0,00	0,00	5.643.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1936	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.066.400,00	0,00	0,00	0,00	4.066.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
1937	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	12.853.095.744,00	0,00	0,00	0,00	12.853.095.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %							
1938	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.688.500,00	0,00	0,00	0,00	33.688.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1939	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	544.200,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1940	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.869.600,00	0,00	0,00	0,00	127.869.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1941	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.791.800,00	0,00	0,00	0,00	24.791.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1942	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	24.125.000,00	0,00	0,00	0,00	24.125.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
1943	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	39.584.900,00	0,00	0,00	0,00	39.584.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1944	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
1945	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	349.974.600,00	0,00	0,00	0,00	349.974.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1946	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	19.510.000,00	0,00	0,00	0,00	19.510.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung




I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	811.623.813.854,00	552.737.538,00	0,00	0,00	812.176.551.392,00
1	01	1	02	Kesehatan	615.416.108.810,00	15.128.964.396,00	0,00	0,00	630.545.073.206,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.078.829.422,00	190.323.042,00	0,00	0,00	34.269.152.464,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.715.587.879,00	1.485.516.123,00	0,00	0,00	17.201.104.002,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	96.404.560.522,00	3.086.101.943,00	0,00	0,00	99.490.662.465,00
1	01	1	06	Sosial	13.003.774.237,00	9.169.044,00	0,00	0,00	13.012.943.281,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	432.251.200,00	0,00	0,00	0,00	432.251.200,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.834.827.678,00	34.508.200,00	0,00	0,00	17.869.335.878,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	45.607.651.081,00	3.532.601.307,00	0,00	0,00	49.140.252.388,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.083.721.059,00	10.809.180,00	0,00	0,00	20.094.530.239,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.298.582.710,00	25.997.532,00	0,00	0,00	20.324.580.242,00
1	01	2	15	Perhubungan	60.199.524.653,00	16.618.528.965,00	0,00	0,00	76.818.053.618,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	17.768.798.587,00	408.377.156,00	0,00	0,00	18.177.175.743,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.901.534.353,00	262.607.574,00	0,00	0,00	21.164.141.927,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	30.003.341.585,00	0,00	0,00	0,00	30.003.341.585,00
1	01	2	20	Statistik	79.759.415,00	0,00	0,00	0,00	79.759.415,00
1	01	2	22	Kebudayaan	19.851.433.246,00	472.271.838,00	0,00	0,00	20.323.705.084,00
1	01	2	23	Perpustakaan	24.826.730.664,00	23.866.887,00	0,00	0,00	24.850.597.551,00
1	01	2	24	Kearsipan	740.097.185,00	0,00	0,00	0,00	740.097.185,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	15.164.983.700,00	108.405.708,00	0,00	0,00	15.273.389.408,00
1	01	3	26	Pariwisata	32.618.135.301,00	5.439.381.634,00	0,00	0,00	38.057.516.935,00
1	01	3	27	Pertanian	55.040.663.486,00	2.686.803.796,00	0,00	0,00	57.727.467.282,00
1	01	3	31	Perindustrian	15.621.200.074,00	891.391.600,00	0,00	0,00	16.512.591.674,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	714.112.193.489,00	1.104.368.273,00	0,00	0,00	715.216.561.762,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	149.709.461.450,00	25.464.851.098,00	0,00	0,00	175.174.312.548,00
1	01	5	01	Perencanaan	24.809.833.173,00	305.564.943,00	0,00	0,00	25.115.398.116,00
1	01	5	02	Keuangan	292.411.545.362,00	2.924.398.294,00	72.086.033.246,00	1.593.049.701.627,00	1.960.471.678.529,00
1	01	5	03	Kepegawaian	26.962.713.789,00	9.812.400,00	0,00	0,00	26.972.526.189,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	15.818.065.276,00	0,00	0,00	0,00	15.818.065.276,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	25.461.411.984,00	417.053.456,00	0,00	0,00	25.878.465.440,00
1	01	6	01	Inspektorat	37.930.182.147,00	4.062.014.714,00	0,00	0,00	41.992.196.861,00
1	01	7	01	Kecamatan	196.801.665.934,00	29.992.885.056,00	0,00	0,00	226.794.550.990,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	45.579.901.626,00	0,00	0,00	0,00	45.579.901.626,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.020.157.699,00	6.504.622.928,00	0,00	0,00	39.524.780.627,00
2	03	1	06	Sosial	211.431.489,00	0,00	0,00	0,00	211.431.489,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	901.132.144.850,00	880.177.201.500,00	0,00	0,00	1.781.309.346.350,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	14.528.640.912,00	0,00	0,00	0,00	14.528.640.912,00
3	04	2	09	Pangan	9.669.846.235,00	0,00	0,00	0,00	9.669.846.235,00
3	04	2	15	Perhubungan	33.303.823.108,00	20.262.390.280,00	0,00	0,00	53.566.213.388,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	53.486.484.695,00	0,00	0,00	0,00	53.486.484.695,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.330.480.795,00	0,00	0,00	0,00	3.330.480.795,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	18	Penanaman Modal	6.497.435.152,00	0,00	0,00	0,00	6.497.435.152,00
3	04	2	21	Persandian	196.985.225,00	0,00	0,00	0,00	196.985.225,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	4.323.105.454,00	0,00	0,00	0,00	4.323.105.454,00
3	04	3	27	Pertanian	35.684.421.453,00	10.302.448.847,00	0,00	0,00	45.986.870.300,00
3	04	3	30	Perdagangan	2.068.820.778,00	150.798.000.000,00	0,00	0,00	152.866.820.778,00
3	04	3	31	Perindustrian	7.214.677.264,00	0,00	0,00	0,00	7.214.677.264,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.551.203.168,00	2.542.275.000,00	0,00	0,00	22.093.478.168,00
4	05	2	10	Pertanahan	245.057.391,00	0,00	0,00	0,00	245.057.391,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	129.709.907.461,00	34.157.878.730,00	0,00	0,00	163.867.786.191,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	0,00	0,00	0,00	9.844.395.882,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.806.504.589,00	265.805.819.513,00	0,00	0,00	292.612.324.102,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	444.776.069.951,00	132.703.214.651,00	0,00	0,00	577.479.284.602,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.664.294.173,00	480.988.000,00	0,00	0,00	7.145.282.173,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	35.253.290.669,00	7.130.487.588,00	0,00	0,00	42.383.778.257,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	292.264.821.992,00	475.892.598.555,00	0,00	0,00	768.157.420.547,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	44.953.022.027,00	5.280.627.800,00	0,00	0,00	50.233.649.827,00
8	10	2	22	Kebudayaan	227.961.038.889,00	858.415.500,00	0,00	0,00	228.819.454.389,00
8	10	2	23	Perpustakaan	693.000.172,00	0,00	0,00	0,00	693.000.172,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	11	1	06	Sosial	10.651.978.511,00	0,00	0,00	0,00	10.651.978.511,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.761.775.210,00	8.588.200,00	0,00	0,00	2.770.363.410,00
				TOTAL	5.869.717.700.125,00	2.108.154.868.789,00	72.086.033.246,00	1.593.049.701.627,00	9.643.008.303.787,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung



 I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.794.230,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.773.340.832,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	118.047.950,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.024.498.058,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	412.970.846,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.092.177.566,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	879.577.398,00
Total			10.451.406.880,00
2.	Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	305.871.671,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	347.814.680,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.754.165.300,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.032.636.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	584.528.400,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	67.459.796.584,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.474.540.634,00
Total			91.059.353.269,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	586.161.200,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	143.136.686,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	199.886.292.352,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	166.130.684,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	156.925.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.565.984.464,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.115.526.100,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	485.753.200,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.106.402.460,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.928.178.700,00
Total			245.140.490.846,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			346.651.250.995,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.553.900,00
Total			113.553.900,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	584.352.400,00
Total			584.352.400,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	954.665.816,00
Total			954.665.816,00
4.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.105.243.800,00
Total			1.105.243.800,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	82.518.520,00
Total			82.518.520,00
6.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	772.305.220,00
Total			772.305.220,00
7.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	94.217.160,00
Total			94.217.160,00
8.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.622.531.116,00
Total			1.622.531.116,00
9.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.293.605.711,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Total			2.293.605.711,00
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	709.795.360,00
Total			709.795.360,00
11.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	324.969.620,00
Total			324.969.620,00
12.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	515.068.960,00
Total			515.068.960,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			9.172.827.583,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	8.029.468.015,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.814.927.867,00
Total			9.844.395.882,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.299.993.035,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	700.495.334,00
Total			13.000.488.369,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			22.844.884.251,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Relokasi	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.591.806.370,00
Total			3.591.806.370,00
2.	Bencana	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	286.977.564,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	7.960.700,00
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.296.576,00
Total			302.234.840,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			3.894.041.210,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	192.239.609,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	121.150.300,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Total			313.389.909,00
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.692.262,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	249.857.262,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi	22.122.408,00
Total			275.671.932,00
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.862.124,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	670.583.745,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	137.611.029,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.381.502.475,00
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12.550.659,00
Total			4.216.110.032,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	0,00
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	583.397.700,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	63.135.600,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.838.056.435,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.674.239.600,00
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.269.200,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.750.000,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	64.314.600,00
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2.277.966.500,00
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	2.833.500,00
Total			17.710.963.135,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			22.516.135.008,00
F SPM Bidang Sosial			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	691.172.447,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.940.515,00
		Penyediaan Alat Bantu	324.819.034,00
		Penyediaan Permakanan	246.307.834,00
Total			1.407.294.927,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	80.455.241,00
		Penyediaan Makanan	130.976.248,00
Total			211.431.489,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			1.618.726.416,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung

NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	812.176.551.392,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	489.958.175.102,00	768.157.420.547,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	630.545.073.206,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	512.657.133.479,00	555.673.087.854,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	565.164.339,00	18.896.346.864,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	675.441.253,00	626.302.712,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.602.090.672,00	2.283.547.172,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	34.269.152.464,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.396.560.365,00	161.584.132.094,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.744.257.250,00	9.844.395.882,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	800.000.000,00	7.316.469.300,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.000.000.000,00	13.000.488.369,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8.745.174.856,00	0,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	226.853.333.725,00	92.384.075.215,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	41.466.354.234,00	889.987.213.251,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.150.282.980,00	635.578.397.075,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.198.637.674,00	1.775.528.715,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.418.373.403,00	1.776.520.499,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	17.201.104.002,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.344.771,00	4.106.381.747,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	241.974.413,00	11.773.119.644,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	268.190.380,00	2.450.953.831,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.867.344.524,00	274.281.868.880,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	99.490.662.465,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.038.408.195,00	6.935.831.046,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.563.156.048,00	5.040.700.046,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	13.217.995.148,00	27.548.249.535,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	13.012.943.281,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.159.378.734,00	2.668.524.274,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.006.687.559,00	6.272.038.058,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	64.747.482.080,00	1.711.416.179,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	30.005.679,00	211.431.489,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	432.251.200,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	315.009.494,00	0,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	86.018.388,00	5.565.931.540,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	336.802.376,00	1.316.190.740,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	374.511.043,00	7.646.518.632,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	17.869.335.878,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	164.573.211,00	1.514.881.500,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	481.037.769,00	703.821.280,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	249.567.807,00	266.652.680,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	62.151.947,00	53.901.330,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	311.332.197,00	140.786.720,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	198.124.200,00	90.319.900,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	562.166.550,00	0,00
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.375.145.575,00	9.568.785.551,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000,00	2.248.200,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	46.506.000,00	98.812.484,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	229.272.437,00	1.458.165,00
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	420.961.238,00	84.801.364,00
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	27.648.416,00	158.797.862,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	49.140.252.388,00
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	186.772.600,00	0,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.354.371.670,00	1.224.909.282,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	13.442.726.000,00	18.732.679.453,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.207.800,00	327.053.719,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	550.628.540,00	985.843.146,00
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	209.448.900,00	742.923,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	232.066.584,00	29.238.191,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	101.728.110,00	0,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	543.396.890,00	507.553.811,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	68.608.471.300,00	142.059.765.666,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	15.368.994.492,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.649.107.570,00	2.716.635.948,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.767.700.039,00	1.675.432.280,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	36.859.625,00	333.467.519,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	13.741.186.657,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	12.906.847,00	18.616.900,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.952.438.390,00	2.972.830.494,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.667.320.000,00	3.591.946.191,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	127.671.792,00	288.084.360,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.326.917.256,00	3.742.139.913,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	242.109.773,00	3.115.057.900,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	76.818.053.618,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19.784.257.986,00	53.566.213.388,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	18.177.175.743,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.950.844.046,00	6.441.961.766,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	59.255.937.531,00	47.044.522.929,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	21.164.141.927,00
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	14.553.706,00	14.450.100,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.363.029,00	238.823.700,00
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	160.422.691,00	209.851.720,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	190.294.749,00	418.327.700,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	357.057.920,00	97.966.800,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	376.960.716,00	698.911.390,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	236.327.644,00	1.652.149.385,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	30.003.341.585,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	243.442.100,00	384.807.600,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	232.889.249,00	1.812.769.050,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.155.847.945,00	2.527.046.852,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	112.938.868,00	469.410.800,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.598.576.510,00	1.303.400.850,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	780.647.190,00	983.131.256,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	32.812.301.825,00	47.060.785.961,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	651.842.244,00	2.189.732.610,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	388.715.719,00	79.759.415,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	497.442.397,00	196.985.225,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	20.323.705.084,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	104.641.360.311,00	149.695.592.367,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	11.254.283.018,00	36.132.045.260,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	3.636.102.767,00	7.900.970.040,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	26.850.514.251,00	32.329.860.010,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	908.027.287,00	2.760.986.712,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	24.850.597.551,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	794.268.098,00	558.999.232,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	161.000.000,00	134.000.940,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.017.440.992,00	650.017.232,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	143.000.000,00	42.796.420,00
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	123.000.000,00	47.283.533,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	15.273.389.408,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	918.860.662,00	2.203.303.223,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	16.132.733.891,00	1.250.468.483,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	161.497.000,00	207.644.763,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	299.339.174,00	661.688.985,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	38.057.516.935,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	65.604.143.036,00	29.877.795.416,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.969.711.445,00	11.520.385.440,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	224.713.142,00	132.397.360,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.216.533.565,00	853.200.041,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	57.727.467.282,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28.500.992.252,00	15.811.184.135,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.901.126.347,00	22.154.042.439,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.429.550.000,00	3.904.690.396,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	804.281.037,00	2.231.364.160,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.232.431.326,00	1.885.589.170,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.305.888.821,00	150.852.996.200,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	66.082.311,00	493.759.474,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	64.826.167,00	689.662.300,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	476.658.109,00	579.396.704,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	577.601.200,00	251.006.100,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	16.512.591.674,00
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	595.629.017,00	7.127.750.544,00
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	38.203.848,00	85.750.820,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	103.357.166,00	1.175.900,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	271.542.893.953,00
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.714.748.320,00	440.426.275.339,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.852.794.573,00	3.247.392.470,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	104.352.443.297,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55.816.218.088,00	70.821.869.251,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	21.723.471.736,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.657.119.612,00	1.426.927.031,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.961.475.659,00	1.964.999.349,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	270.604.654.173,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	592.112.892.335,00	1.670.690.596.583,0 0
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.870.614.354,00	7.411.687.340,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.899.991.731,00	11.764.740.433,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	23.805.823.004,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.198.030.665,00	3.166.703.185,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.259.874.450,00	15.818.065.276,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	16.389.822.262,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.604.802.283,00	9.488.643.178,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	38.260.256.289,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	441.603.873,00	1.029.393.390,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	119.466.975,00	2.702.547.182,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,0 0	149.410.081.329,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.809.830.411,00	24.653.849.639,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.049.932.282,00	47.490.550.386,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	545.261.872,00	763.379.222,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.155.655.619,00	2.532.555.017,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	936.341.369,00	1.944.135.397,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.000.244.352.014,00	13.486.464.544,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	15.230.313,00	4.312.717.850,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.619.313.509,00	21.428.197.700,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	32.566.083,00	2.474.532.200,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	207.827.579,00	2.909.055.932,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	390.618.451,00	968.933.400,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung



I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.402.033.973.844,00	1.402.033.969.844,00	1.630.567.621.766,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.356.983.451.512,00	1.357.618.795.521,00	1.580.333.971.939,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.356.983.451.512,00	1.357.618.795.521,00	1.580.333.971.939,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	583.831.752.095,00	584.716.556.000,00	768.157.420.547,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	282.584.655.710,00	282.908.970.033,00	368.927.423.933,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	159.614.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	932.023.400,00	932.022.400,00	932.022.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.985.768.279,00	117.937.056.679,00	175.198.258.253,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	6.580.695.900,00	6.580.460.300,00	6.580.460.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.958.094.884,00	7.957.862.284,00	7.957.862.284,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.801.728.200,00	2.054.062.158,00	9.453.429.158,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	554.767.400,00	554.767.400,00	584.528.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.781.849.000,00	1.757.803.400,00	2.589.909.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	52.045.991.336,00	52.959.896.792,00	67.459.796.584,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.553.118.800,00	960.463.800,00	1.032.636.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	331.416.280,00	331.263.480,00	347.814.680,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	67.186.615.000,00	67.186.615.000,00	70.963.830.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	0,00	269.823.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	295.859.471,00	305.871.671,00	305.871.671,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	14.624.977.291,00	15.851.376.900,00	16.754.165.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.172.160.769,00	3.761.367.069,00	3.761.367.069,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	120.000,00	120.000,00	1.495.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.779.469.700,00	3.777.960.700,00	4.474.540.634,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	268.345.170.706,00	268.283.841.864,00	338.715.123.706,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	155.718.241.506,00	155.718.241.506,00	199.886.292.352,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.675.261.700,00	15.675.261.700,00	25.805.539.150,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.199.658.700,00	3.199.658.700,00	3.928.178.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	2.996.461.600,00	2.996.461.600,00	2.996.461.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.211.857.600,00	3.211.857.600,00	9.619.836.910,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	469.807.900,00	468.783.700,00	485.753.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	156.925.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	411.739.100,00	410.110.300,00	951.073.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.495.106.088,00	19.273.977.496,00	22.106.402.460,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	199.597.900,00	535.293.900,00	1.115.526.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.160.712,00	183.160.712,00	166.130.684,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.589.025.000,00	49.589.025.000,00	54.068.955.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	143.136.686,00	143.136.686,00	143.136.686,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	112.576.000,00	111.716.800,00	132.766.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	213.496.100,00	212.740.100,00	586.161.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.726.044.114,00	16.554.416.064,00	16.565.984.464,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.822.647.279,00	33.443.345.703,00	59.069.623.684,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5.498.640.400,00	9.320.340.400,00	28.197.352.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.360.407.400,00	1.360.407.400,00	3.856.163.070,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	313.211.000,00	309.889.000,00	1.092.177.566,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	278.224.500,00	791.664.500,00	2.629.567.415,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	859.768.280,00	832.868.904,00	879.577.398,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	113.754.500,00	113.770.100,00	412.970.846,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	38.398.400,00	38.398.400,00	118.047.950,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.553.628.267,00	12.691.360.767,00	13.829.672.036,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	95.278.300,00	95.278.300,00	105.461.583,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	132.861.720,00	132.593.420,00	150.794.230,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.683.760.832,00	6.869.060.832,00	6.773.340.832,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	894.713.680,00	887.713.680,00	1.024.498.058,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.278.400,00	80.398.400,00	1.445.249.224,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.663.000,00	24.663.000,00	1.375.442.930,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	54.615.400,00	55.735.400,00	69.806.294,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	773.151.699.417,00	772.902.239.521,00	812.176.551.392,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.563.936,00	63.563.936,00	63.563.936,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.406.812,00	7.406.812,00	7.406.812,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.040.612,00	11.040.612,00	11.040.612,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.129.112,00	15.129.112,00	15.129.112,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.987.400,00	29.987.400,00	29.987.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	766.465.038.365,00	766.410.861.250,00	805.317.306.795,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	766.307.913.775,00	766.304.635.821,00	805.211.081.366,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157.124.590,00	106.225.429,00	106.225.429,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	811.494.560,00	810.489.046,00	851.283.022,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	811.494.560,00	810.489.046,00	851.283.022,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.987.189.938,00	1.679.526.138,00	2.156.844.058,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	294.150.000,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	758.258.912,00	758.320.912,00	883.756.512,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.981.401,00	37.283.901,00	37.283.901,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	509.555.280,00	509.555.280,00	509.959.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	388.244.345,00	374.366.045,00	379.466.045,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	346.378.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.631.719,00	400.631.719,00	389.028.693,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	191.872.132,00	191.872.132,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.759.587,00	208.759.587,00	389.028.693,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.782.676,00	1.735.322.132,00	1.752.383.588,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.121.600,00	151.121.600,00	151.121.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.726.661.076,00	1.584.200.532,00	1.601.261.988,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.545.998.223,00	1.801.845.300,00	1.646.141.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.994.000,00	71.994.000,00	71.994.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	842.707.700,00	842.707.700,00	842.707.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.404.900,00	206.410.000,00	206.410.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.891.623,00	680.733.600,00	525.029.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	45.050.522.332,00	44.415.174.323,00	50.233.649.827,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	45.050.522.332,00	44.415.174.323,00	50.233.649.827,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	635.947.000,00	635.746.100,00	983.131.256,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	427.511.600,00	427.363.800,00	713.298.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	78.582.400,00	78.577.000,00	155.420.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	274.324.100,00	274.307.700,00	346.342.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	35.570.100,00	35.568.100,00	153.712.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	39.035.000,00	38.911.000,00	57.823.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	208.435.400,00	208.382.300,00	269.832.656,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	208.435.400,00	208.382.300,00	269.832.656,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	42.798.496.494,00	42.359.984.313,00	47.060.785.961,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.211.413.800,00	7.772.529.800,00	8.854.758.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	8.211.413.800,00	7.772.529.800,00	8.854.758.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.177.843.000,00	20.178.216.000,00	23.292.849.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.577.830.600,00	1.577.823.600,00	1.860.851.832,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	17.486.374.400,00	17.486.758.400,00	19.380.621.728,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.113.638.000,00	1.113.634.000,00	2.051.376.040,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.627.668.336,00	2.627.667.155,00	3.131.606.203,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.627.668.336,00	2.627.667.155,00	3.131.606.203,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.616.078.838,00	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.616.078.838,00	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	131.757.800,00	131.412.800,00	350.045.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	480.135.350,00	480.124.150,00	959.660.050,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	447.349.400,00	251.081.100,00	251.081.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	556.836.288,00	556.825.860,00	628.945.860,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	541.902.121.170,00	541.859.527.709,00	717.794.891.469,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	541.902.121.170,00	541.859.527.709,00	717.794.891.469,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	541.902.121.170,00	541.859.527.709,00	717.794.891.469,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	315.953.117.695,00	316.627.375.506,00	323.282.151.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	134.556.420.222,00	131.345.102.713,00	133.664.001.230,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	3.601.500,00	3.601.500,00	3.601.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	10.730.089.214,00	10.727.549.214,00	8.802.997.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.538.537.000,00	1.522.779.350,00	3.116.114.739,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.721.556.860,00	8.456.022.660,00	8.456.022.660,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.415.005.500,00	3.370.401.000,00	3.326.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	72.840.530.105,00	69.970.544.850,00	73.690.821.412,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	37.039.863.487,00	37.043.018.987,00	35.925.170.567,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	6.425.500,00	3.622.000,00	3.622.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	260.811.056,00	247.563.152,00	339.086.352,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.290.946.805,00	184.181.127.117,00	187.818.552.532,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	549.571.160,00	550.245.360,00	591.845.360,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	170.116.720,00	177.609.020,00	166.769.620,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	284.711.560,00	365.307.260,00	515.068.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	159.934.200,00	187.956.700,00	113.553.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98.452.400,00	98.452.400,00	98.452.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	892.463.188,00	899.465.816,00	954.665.816,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.105.303.800,00	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87.198.520,00	87.198.520,00	82.518.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	86.999.220,00	86.999.220,00	772.305.220,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	94.217.160,00	94.217.160,00	94.217.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	906.299.348,00	948.429.716,00	1.531.431.116,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.892.670.628,00	1.966.428.836,00	2.200.655.711,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	850.800,00	850.800,00	850.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	374.241.436,00	377.264.312,00	198.398.912,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.781.000,00	14.742.800,00	14.742.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	222.988.700,00	222.893.200,00	809.043.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	309.231.800,00	309.231.800,00	517.481.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	204.561.736,00	206.013.312,00	206.013.312,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	431.669.300,00	431.784.400,00	474.224.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.584.900,00	4.584.900,00	4.584.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	120.033.100,00	120.000.000,00	157.408.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	18.517.024.629,00	18.759.076.817,00	18.759.076.817,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.302.891.920,00	28.812.551.440,00	29.554.106.964,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.818.225.688,00	105.273.772.876,00	124.564.272.076,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	458.500,00	430.000,00	430.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.149.100,00	5.149.100,00	23.089.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	56.076.320,00	56.057.220,00	56.057.220,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.229.158.748,00	19.527.675.684,00	289.345.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	15.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	36.227.900,00	35.211.900,00	339.573.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.058.400,00	10.058.400,00	12.458.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	442.440.000,00	411.840.000,00	411.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.813.863.424,00	2.986.172.048,00	2.986.172.048,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	48.491.500,00	48.212.300,00	93.657.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	103.797.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	856.593.992,00	812.349.464,00	1.510.801.136,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	856.593.992,00	812.349.464,00	1.510.801.136,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	249.156.676,00	288.796.212,00	288.796.212,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2.547.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	246.608.976,00	287.038.512,00	287.038.512,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.253.268.876,00	1.988.285.152,00	18.896.346.864,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	285.941.436,00	288.440.712,00	287.465.304,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	285.941.436,00	288.440.712,00	287.465.304,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.040.711.940,00	1.040.711.740,00	17.218.753.760,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.040.711.940,00	1.040.711.740,00	17.041.783.760,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	0,00	176.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	926.615.500,00	659.132.700,00	1.390.127.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	926.615.500,00	659.132.700,00	1.390.127.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	449.156.646,00	451.403.022,00	626.302.712,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	237.905.746,00	240.246.322,00	162.263.012,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	237.905.746,00	240.246.322,00	162.263.012,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	29.779.800,00	29.760.700,00	207.671.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	29.779.800,00	29.760.700,00	207.671.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	103.046.400,00	103.027.300,00	177.999.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	103.046.400,00	103.027.300,00	177.999.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.656.096.820,00	2.649.823.320,00	2.234.647.172,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.845.418.920,00	1.846.739.420,00	1.815.936.172,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.845.418.920,00	1.846.739.420,00	1.815.936.172,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	396.285.300,00	388.691.300,00	388.691.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	396.285.300,00	388.691.300,00	388.691.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	414.392.600,00	414.392.600,00	30.019.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	414.392.600,00	414.392.600,00	30.019.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.590.481.133,00	220.142.640.709,00	372.755.443.611,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.788.200,00	27.612.600,00	627.068.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.598.600,00	18.082.100,00	617.537.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.189.600,00	9.530.500,00	9.530.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	175.058.423.820,00	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.058.423.820,00	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.866.000,00	27.866.000,00	27.866.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.542.500,00	24.542.500,00	24.542.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.323.500,00	3.323.500,00	3.323.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.684.509.100,00	4.565.420.500,00	4.491.365.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.180.300,00	74.054.700,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.636.636.200,00	3.594.636.200,00	3.594.636.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	706.195.000,00	706.026.000,00	706.026.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	221.497.600,00	190.703.600,00	190.703.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.116.604.277,00	2.092.514.277,00	2.092.514.277,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	987.696.000,00	963.606.000,00	963.606.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.114.089.777,00	1.114.089.777,00	1.114.089.777,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.818.500,00	14.818.500,00	14.818.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.576.979.536,00	30.942.034.512,00	39.014.138.016,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	605.220.200,00	605.220.200,00	605.220.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.638.912.736,00	15.003.967.712,00	23.076.071.216,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.095.310.200,00	7.428.769.000,00	10.856.070.352,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.219.500,00	151.219.500,00	151.219.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.150.087.500,00	6.023.907.500,00	6.023.907.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	974.103.200,00	915.242.000,00	915.242.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	819.900.000,00	338.400.000,00	3.765.701.352,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0100						Rumah Sakit Daerah Mangusada	394.651.055.547,00	394.651.055.547,00	464.025.952.085,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	223.842.930.100,00	223.842.930.100,00	223.768.945.744,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.042.930.100,00	39.042.930.100,00	38.968.945.744,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.065.669.700,00	22.065.669.700,00	22.065.669.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.977.260.400,00	16.977.260.400,00	16.903.276.044,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.808.125.447,00	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133.915.339.165,00	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.915.339.165,00	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	6.998.750.990,00	6.998.750.990,00	6.998.750.990,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	586.400.000,00	586.400.000,00	586.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.307.635.292,00	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00
1.02.0.00.0.00.01.0100	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.163.068.876,00	12.163.068.876,00	12.237.022.128,00
1.02.0.00.0.00.01.0200						UPTD. Puskesmas Abiansemai I	1.944.199.500,00	1.944.199.500,00	2.261.588.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	299.699.500,00	299.699.500,00	617.088.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299.699.500,00	299.699.500,00	616.235.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	117.200.000,00	117.200.000,00	2.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	7.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.550.000,00	14.550.000,00	24.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.850.000,00	9.850.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.750.000,00	20.750.000,00	169.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.000.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	600.000,00	600.000,00	9.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.100.000,00	35.100.000,00	117.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	95.649.500,00	95.649.500,00	133.815.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	13.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	106.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	853.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	853.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0200	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300						UPTD. Puskesmas Abiansemai II	1.276.301.800,00	1.276.301.800,00	1.527.154.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	376.301.800,00	376.301.800,00	627.154.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	376.301.800,00	376.301.800,00	626.429.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.700.000,00	51.700.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	35.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.100.000,00	17.100.000,00	33.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.200.000,00	15.200.000,00	171.882.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29.640.000,00	29.640.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	600.000,00	600.000,00	16.660.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	750.000,00	750.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.600.000,00	46.600.000,00	107.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	95.261.800,00	95.261.800,00	134.887.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	400.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	74.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	725.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	725.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0300	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400						UPTD. Puskesmas Abiansemai III	1.357.359.089,00	1.357.359.089,00	1.655.511.489,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	247.773.600,00	247.773.600,00	545.926.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	247.773.600,00	247.773.600,00	545.637.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.200.000,00	32.200.000,00	2.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	5.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.800.000,00	29.800.000,00	62.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.550.000,00	11.550.000,00	13.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.700.000,00	5.700.000,00	6.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.450.000,00	36.450.000,00	152.052.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.400.000,00	4.400.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	750.000,00	750.000,00	13.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.850.000,00	32.850.000,00	91.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	86.673.600,00	86.673.600,00	117.735.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.400.000,00	4.400.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	56.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	289.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	289.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00
1.02.0.00.0.00.01.0400	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00
1.02.0.00.0.00.01.0500						UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.262.312.521,00	1.262.312.521,00	1.747.843.921,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.109.600,00	132.109.600,00	617.641.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.109.600,00	132.109.600,00	617.598.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	39.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.600.000,00	11.600.000,00	28.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	8.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	12.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.410.000,00	21.410.000,00	179.969.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.100.000,00	12.100.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	800.000,00	800.000,00	9.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.950.000,00	23.950.000,00	107.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	56.249.600,00	56.249.600,00	133.449.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	8.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	41.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	43.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	43.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00
1.02.0.00.0.00.01.0500	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00
1.02.0.00.0.00.01.0600						UPTD. Puskesmas Kuta I	2.179.531.793,00	2.179.531.793,00	2.247.723.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	539.531.793,00	539.531.793,00	595.173.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.531.793,00	539.531.793,00	595.049.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.100.000,00	57.100.000,00	10.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.000.000,00	26.000.000,00	22.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	56.650.000,00	56.650.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.100.000,00	8.100.000,00	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000,00	6.600.000,00	7.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38.350.000,00	38.350.000,00	166.528.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.300.000,00	14.300.000,00	12.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.686.000,00	49.686.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	900.000,00	900.000,00	17.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.700.000,00	81.700.000,00	110.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.545.793,00	132.545.793,00	131.571.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	1.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	85.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	124.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	124.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	12.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0600	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700						UPTD. Puskesmas Kuta II	848.374.000,00	848.374.000,00	1.165.216.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	151.374.000,00	151.374.000,00	457.416.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.374.000,00	151.374.000,00	457.336.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.200.000,00	12.200.000,00	34.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.000.000,00	6.000.000,00	21.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.500.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.150.000,00	10.150.000,00	5.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.950.000,00	19.950.000,00	126.318.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	6.600.000,00	12.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	17.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.550.000,00	28.550.000,00	60.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	51.424.000,00	51.424.000,00	101.043.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	9.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	35.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	80.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	80.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	697.000.000,00	697.000.000,00	697.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	697.000.000,00	697.000.000,00	697.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0700	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	697.000.000,00	697.000.000,00	697.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800						UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.882.938.859,00	2.882.938.859,00	3.344.886.359,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	455.625.500,00	455.625.500,00	909.473.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.625.500,00	455.625.500,00	909.409.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.250.000,00	37.250.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.300.000,00	36.300.000,00	87.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	10.800.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	19.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68.000.000,00	68.000.000,00	260.489.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00	19.200.000,00	20.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.600.000,00	1.600.000,00	24.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.350.000,00	104.350.000,00	141.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.525.500,00	144.525.500,00	198.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	13.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.600.000,00	6.600.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	24.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	15.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	69.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	64.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	64.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	8.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00
1.02.0.00.0.00.01.0800	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00
1.02.0.00.0.00.01.0900						UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.713.038.500,00	2.713.038.500,00	3.136.153.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	413.364.500,00	413.364.500,00	836.479.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	413.364.500,00	413.364.500,00	836.327.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	173.550.000,00	173.550.000,00	18.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.800.000,00	22.800.000,00	37.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.200.000,00	5.200.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.750.000,00	27.750.000,00	231.710.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00	6.000.000,00	16.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.400.000,00	3.400.000,00	16.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.650.000,00	35.650.000,00	166.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.814.500,00	131.814.500,00	180.067.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	13.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	50.000,00	50.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.400.000,00	4.400.000,00	7.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	32.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	101.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	152.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	152.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0900	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000						UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.772.586.499,00	1.772.586.499,00	2.272.645.199,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	332.375.300,00	332.375.300,00	832.434.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332.375.300,00	332.375.300,00	832.137.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.650.000,00	35.650.000,00	9.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	18.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.600.000,00	35.600.000,00	37.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.900.000,00	9.900.000,00	7.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.900.000,00	30.900.000,00	229.835.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.350.000,00	8.350.000,00	18.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.850.000,00	60.850.000,00	149.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.725.300,00	132.725.300,00	179.752.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	5.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	137.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	297.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	297.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00
1.02.0.00.0.00.01.1000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00
1.02.0.00.0.00.01.1100						UPTD. Puskesmas Mengwi III	1.226.800.289,00	1.226.800.289,00	1.612.381.197,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	228.394.092,00	228.394.092,00	613.975.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.394.092,00	228.394.092,00	613.955.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.600.000,00	9.600.000,00	11.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	13.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.850.000,00	31.850.000,00	42.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.600.000,00	1.600.000,00	185.722.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.600.000,00	7.600.000,00	9.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	28.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69.380.000,00	69.380.000,00	111.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	92.214.092,00	92.214.092,00	132.653.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	9.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	1.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	16.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12.150.000,00	12.150.000,00	41.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	998.406.197,00	998.406.197,00	998.406.197,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	998.406.197,00	998.406.197,00	998.406.197,00
1.02.0.00.0.00.01.1100	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	998.406.197,00	998.406.197,00	998.406.197,00
1.02.0.00.0.00.01.1200						UPTD. Puskesmas Petang I	921.365.300,00	921.365.300,00	1.393.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.365.300,00	141.365.300,00	601.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.365.300,00	141.365.300,00	601.010.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.527.200,00	22.527.200,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	2.850.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	13.200.000,00	17.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.500.000,00	2.500.000,00	7.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	1.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	171.782.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	9.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.700.000,00	20.700.000,00	92.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	55.888.100,00	55.888.100,00	132.478.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	750.000,00	750.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	44.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	79.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	50.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	50.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	12.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	12.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	12.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1200	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300						UPTD. Puskesmas Petang II	907.681.899,00	907.681.899,00	1.304.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	147.441.899,00	147.441.899,00	544.462.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147.441.899,00	147.441.899,00	544.410.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	3.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.100.000,00	14.100.000,00	11.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	900.000,00	900.000,00	5.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.200.000,00	12.200.000,00	152.856.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.000.000,00	27.000.000,00	6.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	600.000,00	600.000,00	6.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.050.000,00	35.050.000,00	99.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	55.591.899,00	55.591.899,00	117.604.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	800.000,00	800.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	117.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	52.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	52.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	760.240.000,00	760.240.000,00	760.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	760.240.000,00	760.240.000,00	760.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1300	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	760.240.000,00	760.240.000,00	760.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400						UPTD. Puskesmas Kuta Utara	2.212.138.089,00	2.212.138.089,00	2.534.450.089,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	506.648.000,00	506.648.000,00	823.710.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	506.648.000,00	506.648.000,00	823.613.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.250.000,00	68.250.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	6.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.650.000,00	51.650.000,00	60.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.250.000,00	8.250.000,00	2.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.050.000,00	119.050.000,00	230.888.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	15.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	77.250.000,00	77.250.000,00	164.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	145.848.000,00	145.848.000,00	178.975.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	13.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.250.000,00	8.250.000,00	3.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	98.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	5.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	5.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	5.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.1400	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.718.425.603.890,00	1.649.325.143.647,00	1.847.516.372.864,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.718.425.603.890,00	1.649.325.143.647,00	1.847.516.372.864,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	68.793.513.508,00	68.766.129.293,00	161.584.132.094,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.423.923.878,00	21.435.685.538,00	110.020.665.117,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	2.437.994.630,00	3.802.409.958,00	3.927.231.363,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	620.721.228,00	620.721.228,00	837.756.210,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.390.226.294,00	1.421.042.294,00	1.262.166.502,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	753.403.000,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	101.333.635,00	192.181.635,00	476.077.635,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	13.218.709.350,00	13.511.457.309,00	98.379.560.293,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.897.644.452,00	605.854.140,00	605.854.140,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.003.891.289,00	1.282.018.974,00	4.532.018.974,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.369.589.630,00	47.330.443.755,00	51.563.466.977,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	510.325.250,00	590.088.443,00	590.088.443,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	31.748.028.400,00	33.883.199.453,00	35.666.000.453,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.507.285.900,00	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.384.112.143,00	8.053.958.543,00	10.546.725.297,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.506.229.849,00	1.547.317.849,00	1.504.774.873,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1.871.329.100,00	1.099.530.874,00	1.099.529.318,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.842.278.988,00	448.241.745,00	448.241.745,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.814.927.867,00	1.814.927.867,00	1.814.927.867,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	267.316.469.300,00	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	267.316.469.300,00	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	265.605.906.912,00	265.605.906.912,00	5.605.906.912,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.710.562.388,00	1.710.562.388,00	1.710.562.388,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	700.495.334,00	700.495.334,00	700.495.334,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	78.442.981.118,00	78.442.274.215,00	92.384.075.215,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	78.442.981.118,00	78.442.274.215,00	92.384.075.215,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	109.770.766,00	104.485.166,00	104.485.166,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1.362.309.208,00	1.367.381.392,00	1.367.381.392,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	74.926.516.395,00	74.926.215.943,00	88.006.416.943,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2.044.384.749,00	2.044.191.714,00	2.905.791.714,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	734.399.527.634,00	680.842.772.491,00	889.987.213.251,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	734.399.527.634,00	680.842.772.491,00	889.987.213.251,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	733.133.680.578,00	680.107.308.418,00	889.251.749.178,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	817.194.907,00	691.664.073,00	691.664.073,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	448.652.149,00	43.800.000,00	43.800.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	506.391.025.783,00	491.732.707.221,00	635.578.397.075,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	506.391.025.783,00	491.732.707.221,00	635.578.397.075,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	594.040.641,00	593.339.341,00	593.339.341,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.001.623.967,00	2.650.784.180,00	2.650.784.180,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	4.869.075.780,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	32.965.981.128,00	29.661.401.417,00	29.661.401.417,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	110.456.673.964,00	97.248.958.204,00	238.528.991.724,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	21.752.125.939,00	22.144.441.272,00	24.711.324.272,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	14.004.594.938,00	14.103.049.312,00	11.103.049.312,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.248.169.128,00	799.509.244,00	792.769.324,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	17.006.603.964,00	17.104.159.571,00	17.104.159.571,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	703.772.993,00	703.724.195,00	703.724.195,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	277.838.417.384,00	286.773.910.666,00	289.779.830.666,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.949.945.957,00	19.949.429.819,00	19.949.023.073,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.376.590.967,00	1.359.908.715,00	1.775.528.715,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	426.084.522,00	421.064.552,00	421.064.552,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	183.142.483,00	181.600.743,00	181.600.743,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	9.750.341,00	8.941.851,00	8.941.851,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	233.191.698,00	230.521.958,00	230.521.958,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	126.390.409,00	114.846.791,00	114.846.791,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	23.804.514,00	23.702.836,00	23.702.836,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	102.585.895,00	91.143.955,00	91.143.955,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	824.116.036,00	823.997.372,00	1.239.617.372,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	824.116.036,00	823.997.372,00	1.239.617.372,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.975.629.747,00	1.825.151.747,00	1.776.520.499,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	262.677.373,00	258.857.507,00	258.857.507,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	258.404.770,00	256.533.870,00	256.533.870,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	4.272.603,00	2.323.637,00	2.323.637,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	356.228.220,00	312.773.052,00	312.773.052,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	179.951.525,00	136.934.125,00	136.934.125,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	176.276.695,00	175.838.927,00	175.838.927,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.356.724.154,00	1.253.521.188,00	1.204.889.940,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.356.724.154,00	1.253.521.188,00	1.204.889.940,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.884.981.582,00	36.194.846.414,00	34.269.152.464,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.221.662,00	188.706.177,00	188.706.177,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.107.140,00	140.354.337,00	140.354.337,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.114.522,00	48.351.840,00	48.351.840,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.076.513.932,00	28.522.270.134,00	26.622.270.134,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.802.948.570,00	28.244.949.764,00	26.344.949.764,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.218.373,00	96.640.381,00	96.640.381,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.580.699,00	89.636.199,00	89.636.199,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.297.590,00	1.464.090,00	1.464.090,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	89.468.700,00	89.579.700,00	89.579.700,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	130.448.128,00	131.837.716,00	131.837.716,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	130.448.128,00	131.837.716,00	131.837.716,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	712.380.444,00	679.304.808,00	679.304.808,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.933.574,00	47.933.574,00	47.933.574,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.229.759,00	10.865.346,00	10.865.346,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	466.271.205,00	436.055.505,00	436.055.505,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.278.039,00	11.512.809,00	11.512.809,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.700.576,00	56.700.576,00	56.700.576,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.504.160,00	2.504.160,00	2.504.160,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	111.463.131,00	113.732.838,00	113.732.838,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.641.608,00	395.477.398,00	369.783.448,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.153.916,00	356.486.206,00	330.792.256,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	3.496.500,00	0,00	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.991.192,00	38.991.192,00	38.991.192,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.676.824,00	760.959.738,00	760.959.738,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.156.000,00	162.156.000,00	162.156.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588.520.824,00	598.803.738,00	598.803.738,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.619.098.984,00	5.516.290.443,00	5.516.290.443,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.864.400,00	125.460.000,00	125.460.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.290.052.855,00	2.483.453.671,00	2.483.453.671,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.009.328.429,00	2.775.930.372,00	2.775.930.372,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.875.600,00	42.790.000,00	42.790.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.426.400,00	62.426.400,00	62.426.400,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.551.300,00	26.230.000,00	26.230.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	309.280.496.489,00	309.014.680.545,00	309.813.428.104,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	309.280.496.489,00	309.014.680.545,00	309.813.428.104,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.371.162.370,00	4.106.382.127,00	4.106.381.747,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.151.525.257,00	3.886.745.014,00	3.886.744.634,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	264.780.243,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	7.960.700,00	7.960.700,00	7.960.700,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	286.977.564,00	286.977.564,00	286.977.564,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.591.806.750,00	3.591.806.750,00	3.591.806.370,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	212.340.537,00	212.340.537,00	212.340.537,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25.256.200,00	25.256.200,00	25.256.200,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	187.084.337,00	187.084.337,00	187.084.337,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.800.507.344,00	11.800.507.344,00	11.773.119.644,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	24.924.588,00	24.924.588,00	24.924.588,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	9.107.884,00	9.107.884,00	9.107.884,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15.816.704,00	15.816.704,00	15.816.704,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5.298.885,00	5.298.885,00	5.298.885,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	102.190.844,00	102.190.844,00	102.190.844,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6.960.562,00	6.960.562,00	6.960.562,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	24.003.095,00	24.003.095,00	24.003.095,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.635.517.372,00	10.635.517.372,00	10.608.129.672,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	27.387.700,00	27.387.700,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	305.489.508,00	305.489.508,00	305.489.508,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	201.285.282,00	201.285.282,00	201.285.282,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.423.968.570,00	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.423.968.570,00	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.423.968.570,00	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.642.363.395,00	3.642.363.395,00	3.642.363.395,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	266.382.644.032,00	266.382.644.032,00	266.382.644.032,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4.212.350.641,00	4.212.350.641,00	4.212.350.641,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	44.510.812,00	44.510.812,00	44.510.812,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.402.989.325,00	16.401.953.624,00	17.201.104.002,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	366.362.823,00	355.003.533,00	355.003.533,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	336.717.020,00	335.612.144,00	335.612.144,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.985.788,00	3.815.036,00	3.815.036,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.657.078,00	2.470.200,00	2.470.200,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.878.341,00	2.694.868,00	2.694.868,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.798.643,00	2.673.662,00	2.673.662,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.325.953,00	7.737.623,00	7.737.623,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.819.509.199,00	12.818.526.384,00	13.418.083.662,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.814.656.228,00	12.814.656.228,00	13.414.213.506,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.852.971,00	3.870.156,00	3.870.156,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.678.314,00	484.159.172,00	683.752.272,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.734.042,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.327.423,00	27.327.423,00	27.327.423,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.996.969,00	3.996.969,00	3.996.969,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.537.479,00	125.752.379,00	325.345.479,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.536.989,00	29.536.989,00	29.536.989,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.495.600,00	54.495.600,00	54.495.600,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.539.672,00	4.539.672,00	4.539.672,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	238.510.140,00	238.510.140,00	238.510.140,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.471.963.988,00	1.511.031.993,00	1.511.031.993,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.445.000,00	320.445.000,00	320.445.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	234.406.248,00	234.406.248,00	234.406.248,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	917.112.740,00	956.180.745,00	956.180.745,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.846.165,00	45.837.006,00	45.837.006,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.635.912,00	353.635.912,00	353.635.912,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.618.600,00	120.618.600,00	120.618.600,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	629.655.500,00	626.609.000,00	626.609.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.318.824,00	43.132.024,00	43.132.024,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.04.0.00.0.00.01.0000	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	45.139.679.100,00	45.139.679.100,00	45.201.690.105,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	45.139.679.100,00	45.139.679.100,00	45.201.690.105,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.522.375.925,00	5.612.721.561,00	6.935.831.046,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.027.264.077,00	3.146.234.225,00	4.235.763.710,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	199.035.125,00	199.035.125,00	1.288.564.610,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.564.100,00	5.564.100,00	5.564.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	121.150.300,00	121.150.300,00	121.150.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.133.200,00	9.133.200,00	9.133.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.655.819.952,00	2.774.790.100,00	2.774.790.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	36.561.400,00	36.561.400,00	36.561.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.495.111.848,00	2.466.487.336,00	2.700.067.336,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.590.700,00	8.590.700,00	8.590.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	11.205.400,00	11.205.400,00	11.205.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.475.315.748,00	2.446.691.236,00	2.680.271.236,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.617.303.175,00	39.526.957.539,00	38.265.859.059,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.793.700,00	7.793.700,00	7.793.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.509.500,00	4.509.500,00	4.509.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.284.200,00	3.284.200,00	3.284.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.999.848.961,00	37.908.207.049,00	36.647.108.569,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.999.848.961,00	37.908.207.049,00	36.647.108.569,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.374.900,00	448.257.700,00	448.257.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.795.150,00	24.025.950,00	24.025.950,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.687.500,00	376.339.500,00	376.339.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.649.450,00	15.649.450,00	15.649.450,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.242.800,00	32.242.800,00	32.242.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.037.933,00	28.451.409,00	28.451.409,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.037.933,00	28.451.409,00	28.451.409,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.360.127,00	33.360.127,00	33.360.127,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.760.127,00	23.760.127,00	23.760.127,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.195.500,00	82.195.500,00	82.195.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	929.568.654,00	929.568.654,00	929.568.654,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.123.400,00	89.123.400,00	89.123.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000						Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	84.478.131.818,00	81.273.100.357,00	74.696.957.503,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	28.543.580.838,00	27.561.923.935,00	27.548.249.535,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.986.622.038,00	24.299.186.635,00	24.298.472.235,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.712.900,00	204.750.000,00	204.750.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.814.995.938,00	12.838.768.735,00	12.838.056.435,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	63.504.600,00	64.314.600,00	64.314.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.356.300,00	2.269.200,00	2.269.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.578.537.800,00	1.674.241.700,00	1.674.239.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	118.874.800,00	114.874.800,00	114.874.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	9.999.820.000,00	9.167.945.000,00	9.167.945.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.309.400,00	1.188.400,00	1.188.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	334.510.300,00	230.834.200,00	230.834.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	361.272.500,00	311.848.200,00	311.848.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.814.200,00	5.642.100,00	5.642.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	355.458.300,00	306.206.100,00	306.206.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	23.555.800,00	23.555.800,00	10.595.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	23.555.800,00	23.555.800,00	10.595.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	935.455.500,00	646.533.300,00	646.533.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	63.335.700,00	63.135.600,00	63.135.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	872.119.800,00	583.397.700,00	583.397.700,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2.236.675.000,00	2.280.800.000,00	2.280.800.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2.233.841.500,00	2.277.966.500,00	2.277.966.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.934.550.980,00	53.711.176.422,00	47.148.707.968,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.533.000,00	8.533.000,00	8.533.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.476.300,00	4.476.300,00	4.476.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.056.700,00	4.056.700,00	4.056.700,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.433.920.022,00	48.433.920.022,00	41.338.771.568,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.433.920.022,00	48.433.920.022,00	41.338.771.568,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.737.500,00	972.737.500,00	972.737.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.025.600,00	74.025.600,00	74.025.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	825.447.900,00	825.447.900,00	825.447.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.954.800,00	14.954.800,00	14.954.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.309.200,00	43.309.200,00	43.309.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.576.800,00	305.309.800,00	305.309.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371.576.800,00	305.309.800,00	305.309.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.482.408,00	1.122.343.800,00	1.122.343.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.642.200,00	21.642.200,00	21.642.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.423.400,00	315.423.400,00	315.423.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.416.808,00	785.278.200,00	785.278.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.897.449.350,00	2.696.547.600,00	3.229.227.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.995.600,00	126.995.600,00	126.995.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.385.142.000,00	2.385.142.000,00	2.917.822.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.440.800,00	74.410.000,00	74.410.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.296.870.950,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.542.251.254,00	19.483.009.243,00	19.116.795.484,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.225.342.866,00	5.045.103.971,00	5.040.700.046,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	197.757.475,00	192.368.480,00	192.239.609,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	197.757.475,00	192.368.480,00	192.239.609,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420.087.973,00	439.491.622,00	439.062.496,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	163.561.948,00	163.561.948,00	163.390.564,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	22.251.279,00	22.251.279,00	22.122.408,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.821.133,00	3.821.133,00	3.692.262,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	230.453.613,00	249.857.262,00	249.857.262,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.414.209.509,00	4.219.955.960,00	4.216.110.032,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12.990.330,00	12.550.659,00	12.550.659,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.417.082.412,00	3.381.502.475,00	3.381.502.475,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	832.472.916,00	674.429.673,00	670.583.745,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	137.611.029,00	137.611.029,00	137.611.029,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.052.822,00	13.862.124,00	13.862.124,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	193.287.909,00	193.287.909,00	193.287.909,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.989.231,00	1.989.231,00	1.989.231,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	29.239.731,00	29.239.731,00	29.239.731,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	46.556.619,00	46.556.619,00	46.556.619,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	115.502.328,00	115.502.328,00	115.502.328,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.316.908.388,00	14.437.905.272,00	14.076.095.438,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.543.064,00	10.784.982,00	10.784.982,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.658.367,00	5.298.252,00	5.298.252,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.884.697,00	5.486.730,00	5.486.730,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.232.718.919,00	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.232.718.919,00	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.573.413,00	210.400.885,00	210.400.885,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.124.872,00	1.878.120,00	1.878.120,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.469.742,00	8.580.966,00	8.580.966,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.979.454,00	150.279.454,00	150.279.454,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.035.345,00	13.698.345,00	13.698.345,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.964.000,00	35.964.000,00	35.964.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.811.795.945,00	2.798.544.654,00	2.787.444.654,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.775.271.951,00	1.775.271.951,00	1.775.271.951,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.022.123.631,00	1.014.464.076,00	1.003.364.076,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.363,00	8.808.627,00	8.808.627,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.387.740,00	1.043.198.270,00	1.042.488.436,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.508.455,00	22.508.455,00	22.508.455,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.100.000,00	279.100.000,00	279.100.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	697.779.285,00	741.589.815,00	740.879.981,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.053.889.307,00	1.142.257.562,00	1.142.257.562,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	882.317.512,00	882.317.512,00	882.317.512,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.593.900,00	113.893.900,00	113.893.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.977.895,00	146.046.150,00	146.046.150,00
1.06.0.00.0.00.01.0000						Dinas Sosial	18.117.179.935,00	18.106.410.096,00	23.876.353.281,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.117.179.935,00	18.106.410.096,00	23.876.353.281,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.117.787.355,00	2.116.512.274,00	2.668.524.274,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.117.787.355,00	2.116.512.274,00	2.668.524.274,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	229.707.624,00	229.707.624,00	252.207.624,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.888.079.731,00	1.886.804.650,00	2.416.316.650,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	961.158.428,00	961.163.516,00	6.272.038.058,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	924.379.705,00	924.384.793,00	1.407.294.927,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	246.305.314,00	246.307.834,00	246.307.834,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	324.818.146,00	324.819.034,00	324.819.034,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.938.835,00	141.940.515,00	141.940.515,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	208.262.313,00	208.262.313,00	691.172.447,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.055.097,00	3.055.097,00	3.055.097,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	36.778.723,00	36.778.723,00	4.864.743.131,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	23.955.829,00	23.955.829,00	23.955.829,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.497.777,00	10.497.777,00	4.838.462.185,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.325.117,00	2.325.117,00	2.325.117,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.803.903.928,00	1.804.349.536,00	1.711.416.179,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.803.903.928,00	1.804.349.536,00	1.711.416.179,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.619.087,00	34.619.087,00	34.619.087,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.302.133,00	9.302.133,00	77.418.006,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.759.982.708,00	1.760.428.316,00	1.599.379.086,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	211.441.489,00	211.441.489,00	211.431.489,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	211.441.489,00	211.441.489,00	211.431.489,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	130.986.248,00	130.986.248,00	130.976.248,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	80.455.241,00	80.455.241,00	80.455.241,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.022.888.735,00	13.012.943.281,00	13.012.943.281,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.381.563,00	12.381.563,00	12.381.563,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.051.675,00	8.051.675,00	8.051.675,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.329.888,00	4.329.888,00	4.329.888,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.185.403,00	218.070.400,00	218.070.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.671.767,00	172.556.764,00	172.556.764,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.718.036,00	23.718.036,00	23.718.036,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.795.600,00	21.795.600,00	21.795.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.227.415,00	9.529.572,00	9.529.572,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.227.415,00	9.529.572,00	9.529.572,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.286.476,00	150.153.868,00	150.153.868,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.370.155,00	40.370.155,00	40.370.155,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.316.182,00	30.316.182,00	30.316.182,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.600.139,00	79.467.531,00	79.467.531,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.506.789,00	652.506.789,00	652.506.789,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	568.102.500,00	568.102.500,00	568.102.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.788.500,00	44.788.500,00	44.788.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.615.789,00	39.615.789,00	39.615.789,00
2.11.0.00.0.00.12.0000						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	204.843.196.508,00	204.803.531.264,00	213.008.038.579,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	204.843.196.508,00	204.803.531.264,00	213.008.038.579,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	204.843.196.508,00	204.803.531.264,00	213.008.038.579,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.185.951.918,00	1.185.952.302,00	1.224.909.282,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	899.326.247,00	899.326.439,00	898.591.499,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	781.923.342,00	781.923.342,00	781.188.402,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	117.402.905,00	117.403.097,00	117.403.097,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	95.319.269,00	95.319.461,00	135.011.381,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	95.319.269,00	95.319.461,00	135.011.381,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	191.306.402,00	191.306.402,00	191.306.402,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	95.653.201,00	95.653.201,00	95.653.201,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	95.653.201,00	95.653.201,00	95.653.201,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	17.178.436.560,00	17.176.261.032,00	18.732.679.453,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	17.178.436.560,00	17.176.261.032,00	18.732.679.453,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	399.345.996,00	399.345.996,00	156.995.557,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	16.779.090.564,00	16.776.915.036,00	18.575.683.896,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	264.616.219,00	264.616.219,00	327.053.719,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	238.847.913,00	238.847.913,00	238.847.913,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	238.847.913,00	238.847.913,00	238.847.913,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.768.306,00	25.768.306,00	88.205.806,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.768.306,00	25.768.306,00	88.205.806,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	863.949.374,00	863.842.566,00	985.843.146,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	863.949.374,00	863.842.566,00	985.843.146,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	2.777.486,00	2.675.486,00	2.675.486,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	861.171.888,00	861.167.080,00	983.167.660,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	9.884.816,00	13.684.816,00	742.923,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	9.884.816,00	13.684.816,00	742.923,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	9.884.816,00	13.684.816,00	742.923,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	259.322.326,00	259.322.518,00	29.238.191,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	259.322.326,00	259.322.518,00	29.238.191,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	259.322.326,00	259.322.518,00	29.238.191,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	364.570.451,00	386.528.171,00	507.553.811,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	364.570.451,00	386.528.171,00	507.553.811,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	359.672.173,00	381.629.893,00	502.655.533,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4.898.278,00	4.898.278,00	4.898.278,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	134.318.414.800,00	134.255.257.296,00	142.059.765.666,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	134.318.414.800,00	134.255.257.296,00	142.059.765.666,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	162.766.354,00	162.766.354,00	162.766.354,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	34.067.332.347,00	34.067.332.347,00	34.159.659.847,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	99.823.462.858,00	99.760.304.970,00	105.622.611.786,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	264.853.241,00	264.853.625,00	2.114.727.679,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.398.050.044,00	50.398.066.344,00	49.140.252.388,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.993.062,00	299.991.446,00	260.299.526,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.445.769,00	130.444.361,00	90.752.441,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.547.293,00	169.547.085,00	169.547.085,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.395.901.027,00	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.395.901.027,00	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.219.050,00	1.859.223.022,00	1.869.134.323,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.494.256,00	27.494.256,00	27.494.256,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.310.742,00	58.310.742,00	68.222.043,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.345.978,00	9.345.978,00	9.345.978,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.679.888.312,00	1.679.892.284,00	1.679.892.284,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.993.612,00	18.993.612,00	18.993.612,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.428.800,00	61.428.800,00	61.428.800,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.757.350,00	3.757.350,00	3.757.350,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.301.301.505,00	3.301.301.505,00	3.532.601.307,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.107.050.395,00	3.107.050.395,00	3.107.050.395,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	63.198.960,00	63.198.960,00	63.198.960,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.162.150,00	21.162.150,00	252.461.952,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.890.000,00	109.890.000,00	109.890.000,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.849.212,00	1.307.851.924,00	1.307.851.924,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.671.200,00	5.671.200,00	5.671.200,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.302.178.012,00	1.302.180.724,00	1.302.180.724,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.233.786.188,00	2.233.797.420,00	2.274.464.280,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.478.720,00	127.478.720,00	127.478.720,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.520.561.784,00	1.520.568.660,00	1.520.568.660,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7.545.700,00	7.545.700,00	7.545.700,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287.569.056,00	287.570.700,00	287.570.700,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.630.928,00	290.633.640,00	331.300.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.894.849.508,00	20.894.849.508,00	20.094.530.239,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.894.849.508,00	20.894.849.508,00	20.094.530.239,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.607.925.569,00	2.632.442.448,00	2.716.635.948,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.095.625.682,00	2.107.990.569,00	2.192.184.069,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	553.090.590,00	565.458.477,00	565.458.477,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.542.535.092,00	1.542.532.092,00	1.626.725.592,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.675.432.280,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.675.432.280,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	243.886.758,00	243.886.758,00	243.886.758,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.422.436.050,00	1.431.545.522,00	1.431.545.522,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	333.466.410,00	333.467.519,00	333.467.519,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	210.201.306,00	210.202.415,00	210.202.415,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	124.354.614,00	124.355.723,00	124.355.723,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	85.846.692,00	85.846.692,00	85.846.692,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.287.134.721,00	16.253.507.261,00	15.368.994.492,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.585.295,00	8.585.295,00	8.585.295,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.359.857,00	5.359.857,00	5.359.857,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.225.438,00	3.225.438,00	3.225.438,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.374.658.225,00	13.374.660.173,00	13.351.115.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.374.658.225,00	13.374.660.173,00	13.351.115.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.370.747,00	778.404.547,00	1.028.361.547,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.309.910,00	2.309.910,00	2.309.910,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.623.927,00	4.623.927,00	4.623.927,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.700.719,00	135.700.719,00	135.700.719,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.073.116,00	144.073.116,00	144.073.116,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.732.220,00	47.932.020,00	47.932.020,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	477.930.855,00	443.764.855,00	693.721.855,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.221.127.797,00	1.221.159.321,00	110.234.025,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.879.325,00	17.910.849,00	17.910.849,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.120.249.296,00	1.120.249.296,00	9.324.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.999.176,00	82.999.176,00	82.999.176,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.402.657,00	860.707.925,00	860.707.925,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.769.220,00	95.769.220,00	95.769.220,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.359.412,00	502.664.680,00	502.664.680,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.274.025,00	262.274.025,00	262.274.025,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.376.335.048,00	19.267.653.702,00	20.324.580.242,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.376.335.048,00	19.267.653.702,00	20.324.580.242,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.471.711.176,00	2.422.450.104,00	2.972.830.494,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.471.711.176,00	2.422.450.104,00	2.972.830.494,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.168.415.880,00	1.158.606.852,00	1.359.206.142,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	88.136.900,00	88.136.900,00	175.517.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	508.799.300,00	506.639.300,00	506.639.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	146.309.996,00	141.058.952,00	141.058.052,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	113.987.200,00	102.467.200,00	15.086.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	85.954.100,00	85.954.100,00	85.954.100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	360.107.800,00	339.586.800,00	689.368.800,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.299.206.247,00	3.085.400.041,00	3.591.946.191,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.299.206.247,00	3.085.400.041,00	3.591.946.191,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	268.398.750,00	261.194.750,00	370.685.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	64.015.800,00	56.815.800,00	56.815.800,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18.666.875,00	18.666.875,00	18.666.875,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.948.124.822,00	2.748.722.616,00	3.145.778.116,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.581.040.725,00	13.741.186.657,00	13.741.186.657,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.986.300,00	12.986.300,00	12.986.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.351.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.042.300,00	4.042.300,00	4.042.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.592.400,00	4.592.400,00	4.592.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.759.925.337,00	12.868.071.137,00	12.868.071.137,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.755.057.737,00	12.863.357.737,00	12.863.357.737,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.867.600,00	4.713.400,00	4.713.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.568.500,00	176.968.500,00	176.968.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.484.300,00	3.484.300,00	3.484.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.400.700,00	136.800.700,00	136.800.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.442.700,00	9.842.700,00	9.842.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.240.800,00	26.840.800,00	26.840.800,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.997.532,00	25.997.532,00	25.997.532,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.997.532,00	25.997.532,00	25.997.532,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.094.716,00	110.054.716,00	110.054.716,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.097.116,00	104.057.116,00	104.057.116,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.997.600,00	5.997.600,00	5.997.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.468.340,00	547.108.472,00	547.108.472,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.264.220,00	117.264.220,00	117.264.220,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.234.120,00	393.874.252,00	393.874.252,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.570.000,00	28.570.000,00	28.570.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.342.263.256,00	25.714.702.626,00	27.784.981.461,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.702.686.503,00	23.130.102.853,00	20.639.699.288,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.025.619.450,00	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	23.352.400,00	513.066.700,00	513.066.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	9.354.600,00	500.180.500,00	500.180.500,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	13.997.800,00	12.886.200,00	12.886.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	366.962.180,00	366.841.280,00	703.821.280,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	366.962.180,00	366.841.280,00	468.341.280,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	101.500.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	366.962.180,00	366.841.280,00	366.841.280,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	235.480.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	235.480.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	266.667.280,00	266.652.680,00	266.652.680,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.888.600,00	14.888.600,00	14.888.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.888.600,00	14.888.600,00	14.888.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.778.680,00	251.764.080,00	251.764.080,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.778.680,00	251.764.080,00	251.764.080,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	147.105.920,00	140.786.720,00	140.786.720,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.055.620,00	55.051.020,00	55.051.020,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.048.400,00	9.043.800,00	9.043.800,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.007.220,00	46.007.220,00	46.007.220,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.050.300,00	85.735.700,00	85.735.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.529.000,00	54.528.400,00	54.528.400,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.370.000,00	15.056.300,00	15.056.300,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.151.300,00	16.151.000,00	16.151.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	21.302.200,00	21.299.900,00	90.319.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.597.200,00	19.594.900,00	88.614.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	0,00	69.020.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	19.597.200,00	19.594.900,00	19.594.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.821.127.343,00	20.765.739.443,00	17.869.335.878,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.350.168,00	98.623.068,00	98.623.068,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.879.508,00	52.475.508,00	52.475.508,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.465.560,00	42.260.560,00	42.260.560,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.005.100,00	3.887.000,00	3.887.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.310.911.855,00	19.303.722.655,00	16.407.319.090,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.282.990.955,00	19.282.990.955,00	16.386.587.390,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.350.600,00	11.169.600,00	11.169.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.985.300,00	2.787.100,00	2.787.100,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.585.000,00	6.775.000,00	6.775.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.737.600,00	237.759.100,00	237.759.100,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.381.200,00	17.381.200,00	17.381.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.017.000,00	186.017.000,00	186.017.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.774.000,00	7.762.400,00	7.762.400,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.565.400,00	26.598.500,00	26.598.500,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.508.200,00	34.508.200,00	34.508.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	11.087.000,00	11.087.000,00	11.087.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.421.200,00	23.421.200,00	23.421.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.878.300,00	62.955.200,00	62.955.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.268.300,00	54.345.200,00	54.345.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.741.220,00	1.028.171.220,00	1.028.171.220,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	911.141.920,00	911.141.920,00	911.141.920,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.509.300,00	46.509.300,00	46.509.300,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.790.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.639.576.753,00	2.584.599.773,00	7.145.282.173,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	105.332.960,00	103.884.360,00	288.084.360,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	50.467.100,00	49.254.900,00	49.254.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	39.068.700,00	37.896.700,00	37.896.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	11.398.400,00	11.358.200,00	11.358.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.865.860,00	54.629.460,00	238.829.460,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	0,00	175.200.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	54.865.860,00	54.629.460,00	63.629.460,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.384.081.093,00	2.330.554.713,00	3.742.139.913,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.055.720,00	526.860.620,00	996.991.120,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	251.744.200,00	251.744.200,00	384.158.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0,00	0,00	28.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0,00	0,00	90.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	0,00	149.999.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	275.987.820,00	204.832.720,00	204.832.720,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	75.323.700,00	70.283.700,00	140.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	936.156.680,00	942.150.400,00	1.328.035.100,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	0,00	186.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	145.783.600,00	148.781.600,00	148.781.600,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	790.373.080,00	793.368.800,00	993.253.500,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	772.963.733,00	789.645.533,00	1.247.265.533,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	0,00	68.080.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	0,00	339.140.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.046.300,00	21.086.100,00	71.486.100,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	769.917.433,00	768.559.433,00	768.559.433,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	71.904.960,00	71.898.160,00	169.848.160,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	0,00	3.750.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	71.904.960,00	71.898.160,00	71.898.160,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	0,00	94.200.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	150.162.700,00	150.160.700,00	3.115.057.900,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	91.211.200,00	91.209.200,00	391.209.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	91.211.200,00	91.209.200,00	91.209.200,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	0,00	300.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	58.951.500,00	58.951.500,00	2.723.848.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	58.951.500,00	58.951.500,00	58.948.700,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	0,00	1.269.000.000,00
2.14.2.08.0.00.02.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	0,00	1.395.900.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	129.430.679.204,00	129.380.679.204,00	130.384.267.006,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	129.430.679.204,00	129.380.679.204,00	130.384.267.006,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	53.671.841.721,00	53.566.213.694,00	53.566.213.388,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6.683.553.139,00	6.586.026.361,00	6.586.026.361,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	451.198.000,00	451.259.800,00	451.259.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.857.431.725,00	1.809.095.359,00	1.809.095.359,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.374.923.414,00	4.325.671.202,00	4.325.671.202,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	42.322.971.951,00	42.320.951.321,00	42.320.951.015,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.552.945.800,00	19.552.208.177,00	19.552.208.177,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	22.770.026.151,00	22.768.743.144,00	22.768.742.838,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	22.268.368,00	19.265.845,00	19.265.845,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	22.268.368,00	19.265.845,00	19.265.845,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.108.624.364,00	1.116.087.360,00	1.116.087.360,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	358.953.576,00	359.059.576,00	359.059.576,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	749.670.788,00	757.027.784,00	757.027.784,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.966.735.234,00	2.959.189.442,00	2.959.189.442,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.083.691.600,00	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	608.800,00	646.800,00	646.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.790.017.534,00	1.782.491.542,00	1.782.491.542,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	92.417.300,00	92.329.100,00	92.329.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.968.400,00	3.014.400,00	3.014.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1.438.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	1.530.300,00	1.558.300,00	1.558.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	371.240.900,00	368.430.700,00	368.430.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5.446.400,00	3.564.000,00	3.564.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	57.409.900,00	63.643.400,00	63.643.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	308.384.600,00	301.223.300,00	301.223.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.479.365,00	193.248.265,00	193.248.265,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	193.479.365,00	193.248.265,00	193.248.265,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.758.837.483,00	75.814.465.510,00	76.818.053.618,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.572.600,00	19.369.800,00	19.369.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.341.200,00	13.878.600,00	13.878.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.231.400,00	5.491.200,00	5.491.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.992.522.638,00	33.009.871.958,00	34.013.461.626,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.972.649.938,00	32.993.509.958,00	33.997.099.626,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.369.400,00	8.953.900,00	8.953.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.364.300,00	2.289.900,00	2.289.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.139.000,00	5.118.200,00	5.118.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.675.748,00	165.738.248,00	165.738.248,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	283.675.748,00	165.738.248,00	165.738.248,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	566.773.972,00	481.660.016,00	481.660.016,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	546.233.672,00	460.620.316,00	460.620.316,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.246.300,00	8.745.700,00	8.745.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.294.000,00	12.294.000,00	12.294.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.254.110.389,00	16.133.729.240,00	16.162.873.936,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.073.356,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.543.799.530,00	13.858.373.340,00	13.858.373.340,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	162.012.600,00	162.012.600,00	162.012.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.218.224.903,00	2.113.343.300,00	2.142.487.996,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.420.310.136,00	24.419.258.136,00	23.727.058.536,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.289.100,00	12.227.500,00	12.227.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.058.800.232,00	24.058.800.232,00	23.366.600.632,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.220.804,00	348.230.404,00	348.230.404,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.217.872.000,00	1.584.838.112,00	2.247.891.456,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	212.430.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843.227.000,00	1.329.103.112,00	1.329.103.112,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.205.000,00	173.675.000,00	302.075.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.010.000,00	40.010.000,00	574.663.344,00
2.16.2.20.2.21.04.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	71.565.469.008,00	71.565.469.008,00	71.940.405.078,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71.146.518.943,00	71.146.518.943,00	71.663.660.438,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.537.102.762,00	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.537.102.762,00	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	170.225.121,00	170.225.121,00	170.225.121,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	203.143.164,00	203.143.164,00	203.143.164,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.833.320.983,00	5.833.320.983,00	5.785.222.987,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	19.119.142,00	19.119.142,00	19.119.142,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	200.930.748,00	200.930.748,00	153.887.748,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	57.887.726,00	57.887.726,00	57.887.726,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	7.555.534,00	7.555.534,00	7.555.534,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	44.920.344,00	44.920.344,00	44.920.344,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	47.045.203.740,00	47.045.203.740,00	47.044.522.929,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.136.938.090,00	44.136.938.090,00	44.136.257.279,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	63.630.008,00	63.630.008,00	63.470.745,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.370.887.102,00	4.370.887.102,00	4.370.674.291,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	39.702.420.980,00	39.702.420.980,00	39.702.112.243,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	970.322.600,00	970.322.600,00	970.322.600,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.757.004.950,00	1.757.004.950,00	1.757.004.950,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	177.883.900,00	177.883.900,00	177.883.900,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.054.200,00	3.054.200,00	3.054.200,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.564.212.441,00	17.564.212.441,00	18.177.175.743,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.488.290,00	96.488.290,00	96.488.290,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.405.915,00	49.405.915,00	49.405.915,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.082.375,00	47.082.375,00	47.082.375,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.496.577.009,00	15.496.577.009,00	16.109.540.311,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.464.336.829,00	15.464.336.829,00	16.077.348.311,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.264.400,00	20.264.400,00	20.264.400,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.896.180,00	2.896.180,00	2.848.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.079.600,00	9.079.600,00	9.079.600,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.949.603,00	83.949.603,00	83.949.603,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	83.949.603,00	83.949.603,00	83.949.603,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.295.199,00	253.295.199,00	253.295.199,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.268.820,00	22.268.820,00	22.268.820,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.230.700,00	176.230.700,00	176.230.700,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.788.300,00	11.788.300,00	11.788.300,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.296.000,00	40.296.000,00	40.296.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.711.379,00	2.711.379,00	2.711.379,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	408.377.156,00	408.377.156,00	408.377.156,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.628.749,00	49.628.749,00	49.628.749,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.748.407,00	358.748.407,00	358.748.407,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.156.480,00	299.156.480,00	299.156.480,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.704.480,00	129.704.480,00	129.704.480,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.452.000,00	167.452.000,00	167.452.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.368.704,00	926.368.704,00	926.368.704,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.769.220,00	139.769.220,00	139.769.220,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	663.902.660,00	663.902.660,00	663.902.660,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.696.824,00	122.696.824,00	122.696.824,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	221.964.840,00	221.964.840,00	79.759.415,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	221.964.840,00	221.964.840,00	79.759.415,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	221.964.840,00	221.964.840,00	79.759.415,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7.096.800,00	7.096.800,00	7.083.700,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	204.941.615,00	204.941.615,00	62.750.890,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	9.926.425,00	9.926.425,00	9.924.825,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	196.985.225,00	196.985.225,00	196.985.225,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	196.985.225,00	196.985.225,00	196.985.225,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	192.890.425,00	192.890.425,00	192.890.425,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.112.380,00	2.112.380,00	2.112.380,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.872.580,00	3.872.580,00	3.872.580,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	184.936.865,00	184.936.865,00	184.936.865,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	125.169.064.501,00	124.914.445.682,00	177.361.443.500,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	22.773.177.683,00	22.608.212.964,00	24.494.622.722,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	20.524.500,00	14.450.100,00	14.450.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	238.823.700,00	238.823.700,00	238.823.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	238.823.700,00	238.823.700,00	238.823.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	160.766.500,00	160.766.500,00	160.766.500,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	78.057.200,00	78.057.200,00	78.057.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	217.969.520,00	209.851.720,00	209.851.720,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	217.969.520,00	209.851.720,00	209.851.720,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	186.285.220,00	178.257.420,00	178.257.420,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	31.684.300,00	31.594.300,00	31.594.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	418.327.700,00	418.327.700,00	418.327.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	418.327.700,00	418.327.700,00	418.327.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	418.327.700,00	418.327.700,00	418.327.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.262.505.770,00	1.244.282.990,00	698.911.390,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.262.505.770,00	1.244.282.990,00	698.911.390,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	15.115.700,00	12.811.900,00	12.811.900,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	54.619.900,00	54.620.560,00	54.620.560,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	99.145.500,00	96.205.200,00	96.205.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	686.398.800,00	686.378.800,00	141.007.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	42.137.500,00	42.138.160,00	42.138.160,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	365.088.370,00	352.128.370,00	352.128.370,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.107.062.385,00	1.107.007.785,00	1.652.149.385,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.107.062.385,00	1.107.007.785,00	1.652.149.385,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	874.275.265,00	874.275.265,00	1.419.646.865,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	232.787.120,00	232.732.520,00	232.502.520,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.408.723.408,00	19.277.502.169,00	21.164.141.927,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.190.900,00	11.882.100,00	11.882.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.491.700,00	7.182.900,00	7.182.900,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.699.200,00	4.699.200,00	4.699.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.881.112.524,00	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.881.112.524,00	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.876.005,00	582.852.786,00	582.852.786,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.361.500,00	8.619.000,00	8.619.000,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.487.574,00	271.487.574,00	271.487.574,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.254.100,00	6.254.100,00	6.254.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.297.300,00	213.297.300,00	213.297.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.642.415,00	32.361.696,00	32.361.696,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.833.116,00	50.833.116,00	50.833.116,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.923.547,00	144.394.327,00	144.394.327,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	228.347.547,00	106.206.327,00	106.206.327,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.396.000,00	28.396.000,00	28.396.000,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.180.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.620.432,00	657.260.432,00	657.260.432,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.129.220,00	102.769.220,00	102.769.220,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525.121.500,00	525.121.500,00	525.121.500,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.369.712,00	29.369.712,00	29.369.712,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	102.395.886.818,00	102.306.232.718,00	152.866.820.778,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	102.395.886.818,00	102.306.232.718,00	152.866.820.778,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100.264.860.800,00	100.255.053.400,00	150.852.996.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.250.000.000,00	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.250.000.000,00	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	518.895.674,00	493.759.474,00	493.759.474,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	484.111.674,00	479.407.074,00	479.407.074,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	35.277.100,00	32.056.100,00	32.056.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	448.834.574,00	447.350.974,00	447.350.974,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	628.789.300,00	626.689.100,00	626.689.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0,00	0,00	0,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	71.987.400,00	62.973.200,00	62.973.200,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	647.831.544,00	616.751.444,00	579.396.704,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	647.831.544,00	616.751.444,00	579.396.704,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	606.015.844,00	605.115.844,00	567.761.104,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	41.815.700,00	11.635.600,00	11.635.600,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00
2.17.3.30.0.00.03.0000	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.143.243.201,00	35.587.854.237,00	36.500.776.737,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36.143.243.201,00	35.587.854.237,00	36.500.776.737,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	36.143.243.201,00	35.587.854.237,00	36.500.776.737,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	520.631.500,00	384.807.600,00	384.807.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.508.300,00	79.441.600,00	79.441.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	8.219.600,00	1.810.300,00	1.810.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	92.288.700,00	77.631.300,00	77.631.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	420.123.200,00	305.366.000,00	305.366.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.893.200,00	19.222.200,00	19.222.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	400.230.000,00	286.143.800,00	286.143.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	712.460.700,00	570.910.750,00	1.812.769.050,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	712.460.700,00	570.910.750,00	1.812.769.050,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	627.584.300,00	497.251.150,00	1.303.363.450,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	84.876.400,00	73.659.600,00	509.405.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.285.411.652,00	2.223.400.852,00	2.527.046.852,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.285.411.652,00	2.223.400.852,00	2.527.046.852,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	56.244.400,00	18.131.600,00	18.131.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.810.213.152,00	1.794.966.152,00	2.098.612.152,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	22.887.700,00	14.236.700,00	14.236.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	396.066.400,00	396.066.400,00	396.066.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	147.462.000,00	146.624.600,00	469.410.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	147.462.000,00	146.624.600,00	469.410.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	48.646.600,00	48.467.300,00	134.819.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	49.869.300,00	49.869.300,00	293.713.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	48.946.100,00	48.288.000,00	40.877.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.075.229.599,00	30.958.709.585,00	30.003.341.585,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.049.900,00	10.513.100,00	10.513.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.782.400,00	5.245.600,00	5.245.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.267.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.449.605.285,00	26.493.396.785,00	26.493.396.785,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.438.079.685,00	26.483.079.685,00	26.483.079.685,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.525.600,00	10.317.100,00	10.317.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	994.713.500,00	986.751.500,00	986.751.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.042.200,00	3.042.200,00	3.042.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	991.671.300,00	983.709.300,00	983.709.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	770.618.380,00	734.623.380,00	734.623.380,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.640.600,00	16.640.600,00	16.640.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.531.700,00	11.536.700,00	11.536.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	563.781.280,00	530.781.280,00	530.781.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.008.800,00	90.008.800,00	90.008.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.656.000,00	85.656.000,00	85.656.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.021.714,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.021.714,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.647.179.000,00	1.647.033.000,00	691.665.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.446.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.639.733.000,00	1.639.733.000,00	684.365.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.160.041.820,00	1.086.391.820,00	1.086.391.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.544.220,00	122.544.220,00	122.544.220,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	832.442.600,00	773.292.600,00	773.292.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.055.000,00	190.555.000,00	190.555.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	217.435.729.905,00	215.169.180.555,00	249.143.159.473,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	217.435.729.905,00	215.169.180.555,00	249.143.159.473,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	125.888.676.751,00	125.747.211.051,00	149.695.592.367,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.764.532.340,00	18.730.012.140,00	20.268.762.140,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	18.606.854.840,00	18.632.288.740,00	18.632.288.740,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	157.677.500,00	97.723.400,00	1.636.473.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.366.020.127,00	70.272.724.627,00	82.795.459.627,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	70.366.020.127,00	70.272.724.627,00	82.795.459.627,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.758.124.284,00	36.744.474.284,00	46.631.370.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	827.649.100,00	827.649.100,00	827.649.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	35.930.475.184,00	35.916.825.184,00	45.803.721.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	27.228.964.660,00	26.697.470.360,00	36.132.045.260,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.228.964.660,00	26.697.470.360,00	36.132.045.260,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	4.840.549.720,00	3.729.944.620,00	3.909.658.620,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	3.664.998.100,00	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	18.723.416.840,00	21.402.527.640,00	30.657.388.540,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	6.818.378.190,00	6.792.448.990,00	7.900.970.040,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.818.378.190,00	6.792.448.990,00	7.900.970.040,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	5.974.160.240,00	5.794.492.040,00	5.630.326.340,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	581.374.200,00	729.113.200,00	1.843.218.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	262.843.750,00	268.843.750,00	427.425.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	34.085.294.348,00	32.444.660.098,00	32.329.860.010,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.206.860.560,00	2.524.096.410,00	2.409.296.410,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2.137.314.060,00	2.025.027.860,00	1.910.227.860,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	1.069.546.500,00	499.068.550,00	499.068.550,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30.878.433.788,00	29.920.563.688,00	29.920.563.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	30.878.433.788,00	29.920.563.688,00	29.920.563.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.136.575.712,00	2.060.986.712,00	2.760.986.712,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.136.575.712,00	2.060.986.712,00	2.760.986.712,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	403.959.920,00	356.689.920,00	572.143.920,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	194.976.700,00	207.851.900,00	681.413.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	686.482.592,00	645.288.392,00	656.272.692,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	851.156.500,00	851.156.500,00	851.156.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.277.840.244,00	21.426.403.344,00	20.323.705.084,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.050.800,00	16.304.200,00	16.304.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.320.400,00	4.320.400,00	4.320.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.295.700,00	7.295.700,00	7.295.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.468.700,00	1.722.100,00	1.722.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.941.407.323,00	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.941.407.323,00	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	823.644.489,00	863.961.289,00	863.961.289,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	7.054.800,00	7.054.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	782.656.289,00	830.918.289,00	830.918.289,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.988.200,00	25.988.200,00	25.988.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.149.900,00	74.149.900,00	160.441.838,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	28.364.900,00	28.364.900,00	28.364.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.785.000,00	45.785.000,00	132.076.938,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.891.200,00	122.622.200,00	122.622.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.211.200,00	32.211.200,00	32.211.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	44.991.000,00	44.991.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.680.000,00	45.420.000,00	45.420.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.331.802.232,00	1.377.802.232,00	1.340.544.176,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.024.220,00	135.024.220,00	135.024.220,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	906.542.012,00	936.542.012,00	899.283.956,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.752.000,00	69.752.000,00	69.752.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.484.000,00	236.484.000,00	236.484.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.772.293.252,00	21.699.973.710,00	26.283.694.908,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	20.966.346.389,00	20.959.876.525,00	25.543.597.723,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	556.990.496,00	558.999.232,00	558.999.232,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	385.745.456,00	387.619.192,00	387.619.192,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	82.811.840,00	82.806.940,00	82.806.940,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.769.400,00	32.693.100,00	32.693.100,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	2.179.600,00	2.822.700,00	2.822.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	86.857.436,00	88.171.272,00	88.171.272,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.127.180,00	181.125.180,00	181.125.180,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.245.040,00	171.380.040,00	171.380.040,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	72.764.000,00	72.939.200,00	72.939.200,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	98.481.040,00	98.440.840,00	98.440.840,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	141.810.640,00	134.000.940,00	134.000.940,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	141.810.640,00	134.000.940,00	134.000.940,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	141.810.640,00	134.000.940,00	134.000.940,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.267.545.253,00	20.266.876.353,00	24.850.597.551,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.861.700,00	9.861.700,00	9.861.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.209.700,00	3.209.700,00	3.209.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.161.831.146,00	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.161.831.146,00	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.438.620,00	340.958.220,00	340.958.220,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.935.000,00	46.935.000,00	46.935.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.568.400,00	10.568.400,00	10.568.400,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.935.628,00	206.928.428,00	206.928.428,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.423.900,00	10.950.700,00	10.950.700,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.575.692,00	65.575.692,00	65.575.692,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.093.100,00	29.904.600,00	29.904.600,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.992.900,00	12.804.400,00	12.804.400,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.100.200,00	12.100.200,00	12.100.200,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.453.800,00	700.453.800,00	700.453.800,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.219.500,00	77.219.500,00	77.219.500,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.924.300,00	468.924.300,00	468.924.300,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.310.000,00	121.310.000,00	121.310.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	805.946.863,00	740.097.185,00	740.097.185,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	712.517.110,00	650.017.232,00	650.017.232,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	344.648.082,00	330.491.896,00	330.491.896,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	124.157.152,00	124.156.024,00	124.156.024,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	115.291.390,00	109.211.532,00	109.211.532,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	105.199.540,00	97.124.340,00	97.124.340,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	137.536.256,00	137.470.892,00	137.470.892,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	137.536.256,00	137.470.892,00	137.470.892,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	230.332.772,00	182.054.444,00	182.054.444,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	83.220.436,00	83.165.072,00	83.165.072,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	147.112.336,00	98.889.372,00	98.889.372,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	46.116.320,00	42.796.420,00	42.796.420,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	46.116.320,00	42.796.420,00	42.796.420,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	46.116.320,00	42.796.420,00	42.796.420,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	47.313.433,00	47.283.533,00	47.283.533,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	47.313.433,00	47.283.533,00	47.283.533,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	2	24	04	2.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	47.313.433,00	47.283.533,00	47.283.533,00
3.25.0.00.0.00.02.0000						Dinas Perikanan	22.356.254.840,00	21.580.133.046,00	19.596.494.862,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.356.254.840,00	21.580.133.046,00	19.596.494.862,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.356.254.840,00	21.580.133.046,00	19.596.494.862,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.552.751.033,00	1.777.851.033,00	2.203.303.223,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.321.744.419,00	1.546.844.419,00	1.663.014.460,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	289.572.396,00	289.572.396,00	289.572.396,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.032.172.023,00	1.257.272.023,00	1.373.442.064,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	231.006.614,00	231.006.614,00	540.288.763,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	221.301.033,00	221.301.033,00	530.606.307,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	9.705.581,00	9.705.581,00	9.682.456,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	713.882.630,00	895.558.772,00	1.250.468.483,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	271.759.617,00	273.980.856,00	628.890.567,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	241.244.736,00	242.000.886,00	605.507.674,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.928.068,00	5.393.157,00	5.393.157,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	26.586.813,00	26.586.813,00	17.989.736,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	442.123.013,00	621.577.916,00	621.577.916,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.388.548,00	100.388.548,00	100.388.548,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	268.678.264,00	458.519.380,00	458.519.380,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.669.988,00	62.669.988,00	62.669.988,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10.386.213,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	186.837.147,00	186.837.147,00	186.837.147,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.807.616,00	20.807.616,00	20.807.616,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	425.689.070,00	425.689.070,00	661.688.985,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	325.763.318,00	325.763.318,00	561.763.233,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.763.318,00	325.763.318,00	325.763.318,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	235.999.915,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.456.287.344,00	18.273.389.408,00	15.273.389.408,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.982.675,00	20.386.815,00	20.386.815,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.201.405,00	13.513.695,00	13.513.695,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.781.270,00	6.873.120,00	6.873.120,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.851.309.189,00	16.851.309.189,00	13.851.309.189,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.851.309.189,00	16.851.309.189,00	13.851.309.189,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.088.500,00	400.510.645,00	400.510.645,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.744.400,00	30.796.284,00	30.796.284,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.214.437,00	50.723.448,00	50.723.448,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.285.500,00	4.625.037,00	4.625.037,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	459.944.287,00	263.603.800,00	263.603.800,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.420.176,00	10.779.876,00	10.779.876,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.511.200,00	36.511.200,00	36.511.200,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.968.500,00	3.471.000,00	3.471.000,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.405.708,00	108.405.708,00	108.405.708,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.405.708,00	108.405.708,00	108.405.708,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.245.772,00	334.081.084,00	334.081.084,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.631.324,00	32.631.324,00	32.631.324,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.064.448,00	298.949.760,00	298.949.760,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.255.500,00	558.695.967,00	558.695.967,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.889.700,00	130.889.700,00	130.889.700,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.353.200,00	359.241.267,00	359.241.267,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.012.600,00	46.542.600,00	46.542.600,00
3.25.0.00.0.00.02.0000	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	22.022.400,00	22.022.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	66.173.811.121,00	80.548.563.351,00	80.441.295.192,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	66.173.811.121,00	80.548.563.351,00	80.441.295.192,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14.113.529.104,00	29.277.546.404,00	29.877.795.416,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.073.348,00	137.073.348,00	136.890.948,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.073.348,00	137.073.348,00	136.890.948,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	178.931.000,00	8.854.373.200,00	8.854.373.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14.001.600,00	4.189.600,00	4.189.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	8.697.365.100,00	8.697.365.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	102.075.300,00	94.289.200,00	94.289.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	62.854.100,00	58.529.300,00	58.529.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.518.561.736,00	20.022.665.636,00	20.623.097.048,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	6.504.103.900,00	6.504.103.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.302.860.136,00	13.302.860.136,00	13.903.291.548,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	215.701.600,00	215.701.600,00	215.701.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	278.963.020,00	263.434.220,00	263.434.220,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	136.998.660,00	135.202.860,00	135.202.860,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	141.964.360,00	128.231.360,00	128.231.360,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	11.980.674.040,00	11.288.868.040,00	11.520.385.440,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11.980.674.040,00	11.288.868.040,00	11.520.385.440,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	613.252.400,00	547.213.200,00	547.213.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	887.926.960,00	137.325.460,00	137.325.460,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	8.027.555.780,00	7.918.896.780,00	8.150.414.180,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.451.938.900,00	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	79.481.360,00	132.397.360,00	132.397.360,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	79.481.360,00	132.397.360,00	132.397.360,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	79.481.360,00	76.465.360,00	76.465.360,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	0,00	55.932.000,00	55.932.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	541.060.348,00	539.228.348,00	539.228.348,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	107.768.276,00	106.673.250,00	106.673.250,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	84.139.317,00	84.004.469,00	84.004.469,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	125.786.346,00	123.293.974,00	123.293.974,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.141.372.330,00	38.996.551.506,00	38.057.516.935,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	487.921.900,00	487.489.300,00	487.489.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	483.331.100,00	482.898.500,00	482.898.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.590.800,00	4.590.800,00	4.590.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.312.997.056,00	29.312.997.056,00	28.219.450.205,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.312.997.056,00	29.312.997.056,00	28.219.450.205,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	460.968.356,00	460.136.132,00	460.136.132,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	460.968.356,00	460.136.132,00	460.136.132,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.330.300,00	457.330.300,00	465.330.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.513.400,00	3.513.400,00	3.513.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.955.300,00	116.955.300,00	116.955.300,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.793.600,00	11.793.600,00	11.793.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.532.400,00	228.532.400,00	236.532.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.372.800,00	40.372.800,00	40.372.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.222.800,00	55.222.800,00	55.222.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	940.000,00	940.000,00	940.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.643.635.658,00	5.466.035.658,00	5.519.297.734,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.796.600,00	1.000.796.600,00	1.000.796.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	82.793.790,00	82.793.790,00	82.793.790,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.560.045.268,00	4.382.445.268,00	4.435.707.344,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.169.080,00	143.169.080,00	179.159.284,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.959.080,00	126.959.080,00	162.949.284,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.639.349.980,00	2.669.393.980,00	2.726.653.980,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.494.720,00	126.494.720,00	126.494.720,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.184.525.260,00	2.214.569.260,00	2.237.065.260,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.330.000,00	268.330.000,00	245.830.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	117.264.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000						Dinas Pertanian dan Pangan	105.099.419.230,00	104.574.536.426,00	113.384.183.817,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.782.972.206,00	5.075.662.320,00	9.669.846.235,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.782.972.206,00	5.075.662.320,00	9.669.846.235,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.600.406.122,00	4.933.282.136,00	9.568.785.551,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.719.681.680,00	3.090.231.216,00	8.349.590.415,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.392.459.567,00	1.957.840.567,00	5.651.427.204,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	39.358.000,00	5.215.200,00	5.215.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1.287.864.113,00	1.127.175.449,00	2.692.948.011,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	355.724.442,00	318.050.920,00	1.219.195.136,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	78.384.800,00	78.414.800,00	78.414.800,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	277.339.642,00	239.636.120,00	1.140.780.336,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	46.467.700,00	43.567.700,00	2.248.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.075.500,00	41.319.500,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	43.075.500,00	41.319.500,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	136.098.384,00	98.812.484,00	98.812.484,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	136.098.384,00	98.812.484,00	98.812.484,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.482.000,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	14.763.900,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	103.852.484,00	98.812.484,00	98.812.484,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	99.316.447.024,00	99.498.874.106,00	103.714.337.582,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	99.316.447.024,00	99.498.874.106,00	103.714.337.582,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22.214.571.144,00	21.647.462.758,00	15.811.184.135,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	21.028.909.694,00	20.732.985.760,00	14.853.427.577,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.198.131.714,00	4.851.206.180,00	6.125.248.927,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	15.830.777.980,00	15.881.779.580,00	8.728.178.650,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	455.327.652,00	211.565.800,00	254.845.360,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	406.670.152,00	164.830.800,00	208.110.360,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	48.657.500,00	46.735.000,00	46.735.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.695.600,00	34.070.600,00	34.070.600,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	37.695.600,00	34.070.600,00	34.070.600,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	5.568.700,00	3.221.100,00	3.221.100,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	5.568.700,00	3.221.100,00	3.221.100,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.426.500,00	11.781.500,00	11.781.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	28.426.500,00	11.781.500,00	11.781.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	658.642.998,00	653.837.998,00	653.837.998,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	658.642.998,00	653.837.998,00	653.837.998,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	23.170.117.864,00	22.978.389.475,00	22.154.042.439,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	7.918.400,00	3.614.400,00	57.317.900,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	7.918.400,00	3.614.400,00	57.317.900,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	19.805.336.396,00	19.671.494.107,00	18.744.807.071,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18.584.629.791,00	18.578.709.791,00	17.136.545.791,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.096.523.500,00	1.075.093.623,00	1.590.570.587,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	124.183.105,00	17.690.693,00	17.690.693,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.356.863.068,00	3.303.280.968,00	3.351.917.468,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.356.863.068,00	3.303.280.968,00	3.351.917.468,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.428.209.204,00	3.212.568.312,00	3.904.690.396,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.180.216.251,00	3.049.395.675,00	3.352.938.130,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.180.216.251,00	3.049.395.675,00	3.352.938.130,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.220.087,00	51.107.731,00	414.263.800,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	90.220.087,00	51.107.731,00	414.263.800,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	157.772.866,00	112.064.906,00	137.488.466,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	57.706.106,00	53.314.306,00	53.314.306,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.066.760,00	58.750.600,00	84.174.160,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	759.540.763,00	691.082.781,00	2.231.364.160,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	759.540.763,00	691.082.781,00	2.231.364.160,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	226.714.963,00	216.809.133,00	718.950.812,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	532.825.800,00	474.273.648,00	1.512.413.348,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.555.990.749,00	1.840.818.321,00	1.885.589.170,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.555.990.749,00	1.840.818.321,00	1.885.589.170,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.269.431.413,00	1.769.482.321,00	1.688.703.170,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	266.598.524,00	29.723.500,00	29.723.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.019.960.812,00	41.612.500,00	67.162.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	100.000.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.188.017.300,00	49.128.552.459,00	57.727.467.282,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.523.800,00	13.884.800,00	1.125.793.869,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.566.000,00	7.172.000,00	7.258.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.957.800,00	6.712.800,00	1.118.535.869,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.222.155.560,00	42.222.155.560,00	47.858.013.568,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.155.560,00	42.222.155.560,00	47.858.013.568,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.196.600,00	20.196.600,00	61.822.239,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.448.000,00	5.448.000,00	47.082.870,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.748.600,00	14.748.600,00	14.739.369,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.533.252,00	1.093.898.671,00	3.167.333.166,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.357.858,00	77.506.527,00	1.523.678.086,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.348.949,00	35.348.949,00	315.741.276,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	732.733.768,00	784.950.518,00	1.114.128.718,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.874.305,00	34.874.305,00	52.566.714,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.218.372,00	76.218.372,00	76.218.372,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	867.382.800,00	867.382.800,00	967.853.400,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	594.915.600,00	594.915.600,00	967.853.400,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272.467.200,00	272.467.200,00	0,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.594.044.268,00	3.270.688.008,00	2.840.395.020,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.240.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	709.529.920,00	531.636.000,00	531.636.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.274.348,00	2.727.052.008,00	2.296.759.020,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.360.181.020,00	1.640.346.020,00	1.706.256.020,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.086.566.020,00	1.249.046.020,00	1.221.656.020,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.575.000,00	260.740.000,00	327.400.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.040.000,00	130.560.000,00	157.200.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	34.909.981.388,00	34.890.535.428,00	38.688.161.050,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.538.944.072,00	14.519.500.112,00	14.960.892.112,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.538.944.072,00	14.519.500.112,00	14.960.892.112,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.585.375.500,00	5.565.931.540,00	5.565.931.540,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.402.911.480,00	5.383.467.520,00	5.383.467.520,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.561.204.420,00	4.541.760.460,00	4.541.760.460,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	841.707.060,00	841.707.060,00	841.707.060,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	101.228.760,00	101.228.760,00	101.228.760,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	101.228.760,00	101.228.760,00	101.228.760,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	81.235.260,00	81.235.260,00	81.235.260,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	81.235.260,00	81.235.260,00	81.235.260,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	874.798.740,00	874.798.740,00	1.316.190.740,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	707.543.900,00	707.543.900,00	1.148.935.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	707.543.900,00	707.543.900,00	1.148.935.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	167.254.840,00	167.254.840,00	167.254.840,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	167.254.840,00	167.254.840,00	167.254.840,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.646.518.632,00	7.646.518.632,00	7.646.518.632,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.141.916,00	326.141.916,00	326.141.916,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	87.187.716,00	87.187.716,00	87.187.716,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	238.954.200,00	238.954.200,00	238.954.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.270.816,00	90.270.816,00	90.270.816,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	173.473.200,00	173.473.200,00	173.473.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.056.632.700,00	7.056.632.700,00	7.056.632.700,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	432.251.200,00	432.251.200,00	432.251.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.251.200,00	432.251.200,00	432.251.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	432.251.200,00	432.251.200,00	432.251.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20.371.037.316,00	20.371.035.316,00	23.727.268.938,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	20.371.037.316,00	20.371.035.316,00	23.727.268.938,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.522.469.446,00	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.522.469.446,00	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	120.484.460,00	120.484.460,00	694.222.360,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	364.940.720,00	364.940.720,00	364.940.720,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.034.725.566,00	3.034.725.566,00	6.066.268.764,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.318.700,00	2.318.700,00	2.318.700,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	85.750.820,00	85.750.820,00	85.750.820,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	85.750.820,00	85.750.820,00	85.750.820,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	85.750.820,00	85.750.820,00	85.750.820,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.761.641.150,00	16.761.639.150,00	16.512.591.674,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	563.320.880,00	563.318.880,00	563.318.880,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	427.962.700,00	427.962.700,00	427.962.700,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	640.300,00	640.300,00	640.300,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.821.500,00	3.821.500,00	3.821.500,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.672.700,00	2.672.700,00	2.672.700,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.128.480,00	126.126.480,00	126.126.480,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.518.569.554,00	15.518.569.554,00	14.378.130.478,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.425.781.634,00	15.425.781.634,00	14.285.342.558,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	92.787.920,00	92.787.920,00	92.787.920,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.603.996,00	506.603.996,00	506.603.996,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.716.900,00	26.716.900,00	26.716.900,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223.867.616,00	223.867.616,00	223.867.616,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.553.000,00	14.553.000,00	14.553.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.160.000,00	83.160.000,00	83.160.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	135.081.480,00	135.081.480,00	135.081.480,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.036.720,00	159.036.720,00	1.050.428.320,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.974.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00
3.31.2.07.0.00.05.0000	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.062.000,00	68.062.000,00	959.453.600,00
4.01.2.10.7.01.02.0000						Sekretariat Daerah	503.046.307.811,00	535.702.853.504,00	715.907.132.237,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	287.436.514,00	245.058.761,00	245.057.391,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	287.436.514,00	245.058.761,00	245.057.391,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	85.355.240,00	84.801.364,00	84.801.364,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85.355.240,00	84.801.364,00	84.801.364,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85.355.240,00	84.801.364,00	84.801.364,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	200.623.109,00	158.799.232,00	158.797.862,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	42.836.534,00	7.252.657,00	7.251.287,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.836.534,00	7.252.657,00	7.251.287,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	502.331.257.213,00	535.026.374.659,00	715.216.561.762,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	502.331.257.213,00	535.026.374.659,00	715.216.561.762,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	260.837.708.248,00	260.855.639.593,00	440.426.275.339,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	7.307.425.492,00	7.318.294.221,00	8.895.818.736,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	3.026.479.123,00	3.026.579.761,00	3.278.579.761,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	402.728.608,00	406.357.224,00	439.875.024,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.878.217.761,00	3.885.357.236,00	5.177.363.951,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	249.753.445.165,00	249.757.591.301,00	427.402.702.532,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	246.950.081.315,00	246.954.740.063,00	424.599.851.294,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	114.234.108,00	113.734.606,00	113.734.606,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.689.129.742,00	2.689.116.632,00	2.689.116.632,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.469.901.528,00	3.469.897.298,00	3.817.897.298,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	176.778.591,00	176.774.906,00	344.774.906,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	3.199.876.619,00	3.199.876.500,00	3.379.876.500,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	93.246.318,00	93.245.892,00	93.245.892,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	306.936.063,00	309.856.773,00	309.856.773,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	81.242.004,00	81.193.463,00	81.292.808,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	132.769.431,00	131.253.124,00	131.551.159,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	92.924.628,00	97.410.186,00	97.012.806,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.346.892.900,00	2.291.246.123,00	3.247.392.470,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	285.805.852,00	325.766.268,00	325.683.180,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	53.473.749,00	104.052.219,00	104.010.759,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	179.214.058,00	171.843.265,00	171.843.097,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	53.118.045,00	49.870.784,00	49.829.324,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	967.703.490,00	995.411.718,00	1.171.657.718,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	566.267.424,00	564.161.280,00	564.161.280,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	151.728.288,00	184.234.976,00	184.234.976,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	249.707.778,00	247.015.462,00	423.261.462,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.008.420.771,00	891.952.081,00	981.950.077,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	101.906.444,00	97.381.309,00	97.381.309,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3.858.865.887,00	748.991.208,00	748.991.208,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	47.648.440,00	45.579.564,00	135.577.560,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	84.962.787,00	78.116.056,00	768.101.495,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	9.605.691,00	8.628.552,00	698.613.991,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7.872.675,00	7.131.528,00	7.131.528,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	67.484.421,00	62.355.976,00	62.355.976,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.146.656.065,00	271.879.488.943,00	271.542.893.953,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.491.090,00	61.470.090,00	61.470.090,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.874.842,00	42.854.842,00	42.854.842,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.665.494,00	11.665.494,00	11.665.494,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.950.754,00	6.949.754,00	6.949.754,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.209.035.159,00	88.209.035.159,00	88.576.423.249,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.354.515.432,00	87.354.515.432,00	87.633.292.328,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	809.976.903,00	809.976.903,00	809.976.903,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.356.634,00	9.356.634,00	9.356.634,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.186.190,00	35.186.190,00	123.797.384,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.784.280.840,00	14.012.715.640,00	14.046.782.840,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.204.913,00	104.204.913,00	104.204.913,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.231.280.000,00	1.231.280.000,00	1.231.280.000,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.448.795.927,00	12.677.230.727,00	12.711.297.927,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.703.190,00	16.949.751.727,00	20.529.158.052,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.073.500,00	16.714.122.037,00	15.367.800.409,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	664.890,00	664.890,00	4.848.090.890,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.964.800,00	234.964.800,00	313.266.753,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.307.046.869,00	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	177.564.801,00	177.103.951,00	177.103.951,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.343.440.584,00	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.786.041.484,00	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.852.208.135,00	33.481.626.283,00	35.421.812.693,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.921.297.969,00	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.259.979.084,00	4.205.895.612,00	4.127.775.612,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	166.811.376,00	177.632.976,00	177.632.976,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.952.128.336,00	2.023.170.945,00	2.023.170.945,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.696.087.093,00	9.742.838.613,00	11.761.145.023,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.327.008.453,00	8.715.574.344,00	8.715.574.344,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.528.895.824,00	4.328.895.824,00	4.328.895.824,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.522.763.543,00	10.522.763.543,00	14.672.081.367,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	197.069.868,00	197.069.868,00	1.797.451.542,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.325.693.675,00	10.325.693.675,00	12.874.629.825,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	21.349.466.504,00	34.403.978.584,00	23.928.978.584,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.764.784.630,00	1.976.284.630,00	1.976.284.630,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.311.703.584,00	1.311.703.584,00	1.311.703.584,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	18.272.978.290,00	31.115.990.370,00	20.640.990.370,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	596.821.711,00	597.096.675,00	687.089.236,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	230.143.092,00	230.133.092,00	230.133.092,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	131.497.430,00	130.244.550,00	130.243.506,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	198.611.358,00	200.599.534,00	290.594.915,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36.569.831,00	36.119.499,00	36.117.723,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	16.894.414.842,00	16.894.056.041,00	16.872.102.641,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	3.574.313.117,00	3.574.286.863,00	3.552.333.463,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.133.495.874,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.10.7.01.02.0000	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.186.605.851,00	12.186.573.008,00	12.186.573.008,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	427.614.084,00	431.420.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01				KECAMATAN	427.614.084,00	431.420.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	427.614.084,00	431.420.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	427.614.084,00	431.420.084,00	445.513.084,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	427.614.084,00	431.420.084,00	445.513.084,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	171.240.437.974,00	170.827.645.302,00	175.174.312.548,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	171.240.437.974,00	170.827.645.302,00	175.174.312.548,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	171.240.437.974,00	170.827.645.302,00	175.174.312.548,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	69.405.396.027,00	69.125.554.125,00	70.821.869.251,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	18.234.851.105,00	17.949.764.031,00	17.875.866.055,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.714.283.574,00	2.714.283.574,00	2.682.864.374,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15.346.095.805,00	15.061.008.731,00	15.018.769.031,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	12.264.057,00	12.264.057,00	171.060.492,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	162.207.669,00	162.207.669,00	3.172.158,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	670.373.608,00	670.373.608,00	670.373.608,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	116.198.744,00	116.198.744,00	116.198.744,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	117.422.075,00	117.422.075,00	117.422.075,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	114.357.254,00	114.357.254,00	114.357.254,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	124.601.342,00	124.601.342,00	124.601.342,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	197.794.193,00	197.794.193,00	197.794.193,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.269.674.275,00	4.338.668.067,00	4.233.803.797,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	816.106.085,00	827.339.283,00	825.535.248,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	563.440.982,00	575.080.982,00	574.956.982,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	797.248.792,00	806.560.792,00	790.595.792,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	482.128.925,00	493.768.925,00	479.948.925,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	489.033.554,00	487.672.754,00	416.325.554,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	308.697.952,00	318.472.166,00	318.472.166,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	813.017.985,00	829.773.165,00	827.969.130,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	14.986.091.466,00	14.993.078.706,00	15.128.090.706,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	417.236.000,00	417.236.000,00	417.236.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.441.609.023,00	4.441.609.023,00	4.590.209.823,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	253.474.635,00	253.474.635,00	253.474.635,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.163.717.001,00	3.170.704.241,00	3.170.704.241,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	13.697.127,00	13.697.127,00	13.697.127,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.376.897.699,00	4.376.897.699,00	4.363.308.899,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.721.698.349,00	6.720.962.489,00	6.520.962.489,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10.394.489,00	10.394.489,00	10.394.489,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	6.711.303.860,00	6.710.568.000,00	6.510.568.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.712.292.687,00	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.712.292.687,00	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	22.810.414.537,00	22.740.414.537,00	24.825.745.109,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.952.460.925,00	16.952.460.925,00	18.886.721.039,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.857.953.612,00	5.787.953.612,00	5.939.024.070,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.835.041.947,00	101.702.091.177,00	104.352.443.297,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.336.400,00	10.336.400,00	10.336.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.368.900,00	7.368.900,00	7.368.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.967.500,00	2.967.500,00	2.967.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.136.155.781,00	17.531.875.195,00	17.531.875.195,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.824.550.492,00	17.219.301.992,00	17.219.301.992,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.168.928,00	10.480.842,00	10.480.842,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	295.250.661,00	299.906.661,00	299.906.661,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.185.700,00	2.185.700,00	2.185.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.984.365.887,00	7.046.366.887,00	7.098.222.227,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	657.566.775,00	657.566.775,00	657.566.775,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.626.504,00	91.626.504,00	91.626.504,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.514.959,00	48.547.959,00	48.547.959,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.209.232.791,00	2.206.016.791,00	2.205.954.631,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.278.400,00	143.278.400,00	143.278.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	552.593.439,00	552.593.439,00	552.593.439,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	713.435.000,00	713.435.000,00	767.892.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	923.036.780,00	923.036.780,00	920.552.780,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.645.081.239,00	1.710.265.239,00	1.710.209.739,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.443.012.098,00	23.443.012.098,00	25.463.297.098,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.901.874.000,00	1.901.874.000,00	1.901.874.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	46.528.536,00	46.528.536,00	114.328.536,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.609.562,00	494.609.562,00	1.194.609.562,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	22.252.485.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.282.443,00	100.082.443,00	696.176.323,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.043.620,00	14.843.620,00	44.843.620,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.238.823,00	85.238.823,00	651.332.703,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.768.742.455,00	2.766.493.160,00	2.766.493.160,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.187.003.443,00	2.184.754.148,00	2.184.754.148,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	128.760.000,00	128.760.000,00	128.760.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.979.012,00	452.979.012,00	452.979.012,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	48.665.351.219,00	49.055.714.362,00	49.037.832.262,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.366.206.934,00	45.748.616.934,00	45.748.616.934,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.988.681.405,00	2.996.634.548,00	2.978.752.448,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	310.462.880,00	310.462.880,00	310.462.880,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.726.795.664,00	1.748.210.632,00	1.748.210.632,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0002	Fasilitas Fraksi DPRD	494.537.764,00	501.984.732,00	501.984.732,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.232.257.900,00	1.246.225.900,00	1.246.225.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.501.109.837,00	25.466.629.823,00	25.115.398.116,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	25.501.109.837,00	25.466.629.823,00	25.115.398.116,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	25.501.109.837,00	25.466.629.823,00	25.115.398.116,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.441.555.931,00	1.426.927.031,00	1.426.927.031,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.074.634.085,00	1.064.573.785,00	1.064.573.785,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	214.712.632,00	213.973.532,00	213.973.532,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	7.968.200,00	7.967.000,00	7.967.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	68.600.614,00	68.118.614,00	68.118.614,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	44.790.995,00	36.436.995,00	36.436.995,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	738.561.644,00	738.077.644,00	738.077.644,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.268.776,00	50.100.376,00	50.100.376,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50.268.776,00	50.100.376,00	50.100.376,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	316.653.070,00	312.252.870,00	312.252.870,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	77.391.130,00	77.251.130,00	77.251.130,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	239.261.940,00	235.001.740,00	235.001.740,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.349.940.414,00	2.314.495.349,00	1.964.999.349,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	250.998.562,00	245.955.275,00	245.955.275,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.787.547,00	13.885.547,00	13.885.547,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.757.577,00	6.755.577,00	6.755.577,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.762.559,00	5.760.559,00	5.760.559,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.036.520,00	7.034.520,00	7.034.520,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.093.236,00	12.791.236,00	12.791.236,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.964.742,00	5.962.742,00	5.962.742,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.308.963,00	49.306.963,00	49.306.963,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	144.287.418,00	144.458.131,00	144.458.131,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	310.930.572,00	281.579.520,00	281.579.520,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.683.802,00	21.973.968,00	21.973.968,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.267.518,00	48.267.518,00	48.267.518,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.723.971,00	21.843.971,00	21.843.971,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	48.253.310,00	48.253.310,00	48.253.310,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.395.089,00	23.685.255,00	23.685.255,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48.021.875,00	48.021.875,00	48.021.875,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.553.364,00	21.501.980,00	21.501.980,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	48.031.643,00	48.031.643,00	48.031.643,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.788.011.280,00	1.786.960.554,00	1.437.464.554,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	116.748.142,00	116.576.758,00	116.576.758,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.116.842,00	46.580.268,00	46.580.268,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	961.023.762,00	961.023.762,00	961.023.762,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	45.890.150,00	45.890.150,00	45.890.150,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.547.580,00	88.547.580,00	88.547.580,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	45.773.982,00	45.431.214,00	45.431.214,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	379.661.206,00	379.661.206,00	30.165.206,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	103.249.616,00	103.249.616,00	103.249.616,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.709.613.492,00	21.725.207.443,00	21.723.471.736,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.305.320,00	131.058.684,00	131.058.684,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.737.600,00	17.879.247,00	17.879.247,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.052.900,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.052.900,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.157.300,00	14.720.862,00	14.720.862,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.304.620,00	98.458.575,00	98.458.575,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.294.611.132,00	20.297.514.945,00	20.297.514.945,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.224.448.832,00	20.224.448.832,00	20.224.448.832,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.782.400,00	1.978.464,00	1.978.464,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.379.900,00	71.087.649,00	71.087.649,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.802.080,00	606.171.282,00	606.171.282,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.155.500,00	7.942.605,00	7.942.605,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	356.480.780,00	349.441.947,00	349.441.947,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.237.200,00	4.703.292,00	4.703.292,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.893.400,00	197.041.674,00	197.041.674,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.635.200,00	38.641.764,00	38.641.764,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.650.000,00	16.650.000,00	14.914.293,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	16.650.000,00	16.650.000,00	14.914.293,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.060.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.060.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.691.960,00	638.481.960,00	638.481.960,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.550.700,00	121.550.700,00	121.550.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.931.260,00	444.931.260,00	444.931.260,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.210.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.385.670.357.948,00	1.434.185.052.561,00	1.738.755.750.132,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	1.385.670.357.948,00	1.434.185.052.561,00	1.738.755.750.132,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.322.659.773.785,00	1.331.423.357.368,00	1.670.690.596.583,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.293.327.207,00	4.287.793.470,00	4.287.793.470,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	264.455.075,00	261.325.652,00	261.325.652,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	225.090.726,00	225.090.726,00	225.090.726,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	305.998.362,00	362.872.320,00	362.872.320,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	297.805.008,00	358.979.550,00	358.979.550,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	129.689.958,00	29.937.144,00	29.937.144,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.070.288.078,00	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	801.073.251.661,00	801.070.943.416,00	943.249.114.365,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	115.117.989,00	113.296.701,00	285.531.960,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.454.651,00	5.432.451,00	5.432.451,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	800.769.444.550,00	800.769.305.578,00	942.730.914.528,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	183.234.471,00	182.908.686,00	227.235.426,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	704.962.104,00	676.425.669,00	676.425.669,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	30.926.043,00	30.920.604,00	30.920.604,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	159.937.674,00	159.757.854,00	159.757.854,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28.390.581,00	28.190.781,00	28.190.781,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	419.008.017,00	411.323.931,00	411.323.931,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	13.869.561,00	12.537.561,00	12.537.561,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	52.830.228,00	33.694.938,00	33.694.938,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	516.588.232.813,00	525.388.194.813,00	722.477.263.079,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	444.502.199.567,00	453.302.161.567,00	650.391.229.833,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.954.362.908,00	6.011.589.840,00	7.411.687.340,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.954.362.908,00	6.011.589.840,00	7.411.687.340,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	276.548.175,00	276.548.175,00	276.548.175,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.071.571,00	24.071.571,00	24.071.571,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	25.669.749,00	25.079.673,00	125.079.673,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.774.195,00	30.381.699,00	30.381.699,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	48.539.487,00	48.539.487,00	148.539.487,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.167.550.440,00	1.144.910.440,00	1.144.910.440,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.539.275.195,00	3.539.275.194,00	3.729.575.194,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	333.230.068,00	333.230.068,00	483.170.068,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.321.542,00	27.150.158,00	27.150.158,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	312.386.293,00	507.386.293,00	1.367.243.793,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76.012.231,00	16.012.231,00	16.012.231,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60.505.893,00	26.437.893,00	26.437.893,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	14.478.069,00	12.566.958,00	12.566.958,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.056.221.255,00	96.750.105.353,00	60.653.466.209,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.333.756,00	21.333.756,00	21.333.756,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.593.835,00	15.593.835,00	15.593.835,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.015.539,00	1.015.539,00	1.015.539,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.724.382,00	4.724.382,00	4.724.382,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.602.177.216,00	94.354.986.134,00	56.896.271.869,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.538.349.552,00	94.292.662.853,00	56.833.948.588,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.004.502,00	48.181.770,00	48.181.770,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.522.687,00	11.879.220,00	11.879.220,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.300.475,00	2.262.291,00	2.262.291,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.796.400,00	761.328.300,00	2.081.663.421,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.919.850,00	7.919.850,00	7.919.850,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.435.800,00	13.435.800,00	1.333.770.921,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.293.029,00	11.293.029,00	11.293.029,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	392.003.191,00	391.866.691,00	391.866.691,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	291.336.602,00	292.005.002,00	292.005.002,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.696.928,00	41.696.928,00	41.696.928,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.111.000,00	3.111.000,00	3.111.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.445.000,00	320.445.000,00	320.445.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.445.000,00	320.445.000,00	320.445.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.059.843,00	641.540.843,00	641.540.843,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.639.843,00	23.620.843,00	23.620.843,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.930.000,00	402.930.000,00	402.930.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.490.000,00	214.990.000,00	214.990.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.409.040,00	650.471.320,00	692.211.320,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.623.820,00	120.623.820,00	120.623.820,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.420.420,00	219.497.700,00	261.237.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	291.154.800,00	298.139.800,00	298.139.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	192.231.875.080,00	192.231.875.080,00	221.715.928.397,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.932.864.263,00	10.587.294.561,00	11.764.740.433,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.932.864.263,00	10.587.294.561,00	11.764.740.433,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	7.663.884,00	7.663.884,00	9.859.184,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	231.107.313,00	232.077.009,00	233.908.509,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4.663.322.010,00	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	877.351.176,00	881.091.960,00	881.091.960,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.781.501.286,00	1.800.970.854,00	1.808.539.662,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.135.505.658,00	2.137.846.234,00	3.312.487.698,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	123.763.446,00	102.119.001,00	102.119.001,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.135.084,00	3.135.084,00	3.135.084,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	820.738.563,00	822.914.517,00	822.914.517,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	823.255.080,00	827.873.517,00	810.291.117,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11.751.496,00	9.457.496,00	9.457.496,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.963.026.168,00	1.970.047.896,00	1.978.839.096,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	456.747.795,00	456.747.795,00	456.747.795,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	33.995.304,00	2.027.304,00	2.027.304,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	178.299.010.817,00	181.644.580.519,00	209.951.187.964,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.941.020,00	19.121.304,00	23.508.404,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.944.376,00	10.299.468,00	12.861.568,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.152.507,00	4.271.835,00	4.271.835,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.844.137,00	4.550.001,00	6.375.001,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	174.363.738.990,00	178.077.153.795,00	206.399.885.973,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	174.363.738.990,00	178.077.153.795,00	206.399.885.973,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	821.248.269,00	773.290.530,00	775.854.630,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.397.810,00	14.397.810,00	14.397.810,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.005.626,00	33.845.787,00	36.409.887,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	548.335.473,00	550.255.473,00	550.255.473,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.660.960,00	107.943.060,00	107.943.060,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.848.400,00	66.848.400,00	66.848.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.572.478,00	393.572.478,00	894.777.105,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	170.372.568,00	170.372.568,00	170.372.568,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.199.910,00	223.199.910,00	724.404.537,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.230.470.160,00	699.002.160,00	183.046.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.652.000,00	14.652.000,00	14.620.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.215.818.160,00	684.350.160,00	168.426.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.463.039.900,00	1.682.440.252,00	1.674.115.252,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.444.500,00	46.444.500,00	46.444.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.262.300,00	820.662.300,00	820.662.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	566.333.100,00	815.333.452,00	807.008.452,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.374.869.065,00	38.372.119.600,00	42.790.591.465,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	24.921.678.181,00	24.868.405.252,00	26.972.526.189,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.683.822.186,00	3.633.528.398,00	3.166.703.185,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	985.219.719,00	960.944.179,00	494.118.966,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.155.975,00	11.722.908,00	11.722.908,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	844.273.123,00	817.625.461,00	350.800.248,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.717.398,00	13.246.202,00	13.246.202,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	33.537.023,00	33.558.308,00	33.558.308,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	85.536.200,00	84.791.300,00	84.791.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	261.430.301,00	258.689.965,00	258.689.965,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	4.353.636,00	4.403.636,00	4.403.636,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	182.306.016,00	180.181.680,00	180.181.680,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	74.770.649,00	74.104.649,00	74.104.649,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.143.695.700,00	1.122.907.400,00	1.122.907.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	647.380.200,00	646.937.700,00	646.937.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	17.676.800,00	17.485.100,00	17.485.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	415.568.800,00	395.994.500,00	395.994.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	17.323.400,00	17.131.700,00	17.131.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	15.774.900,00	15.824.900,00	15.824.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	29.971.600,00	29.533.500,00	29.533.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.293.476.466,00	1.290.986.854,00	1.290.986.854,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.187.451,00	14.569.361,00	14.569.361,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9.204.435,00	8.569.361,00	8.569.361,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.823.704,00	3.200.936,00	3.200.936,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.259.287.976,00	1.259.654.296,00	1.259.654.296,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	3.356.500,00	3.376.500,00	3.376.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.616.400,00	1.616.400,00	1.616.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.237.855.995,00	21.234.876.854,00	23.805.823.004,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.801.204,00	26.506.822,00	26.506.822,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.345.321,00	13.044.130,00	13.044.130,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.455.883,00	13.462.692,00	13.462.692,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.429.674.982,00	20.429.609.182,00	23.010.221.932,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.426.319.182,00	20.426.319.182,00	23.000.221.932,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.355.800,00	3.290.000,00	10.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.772.209,00	262.573.750,00	272.337.150,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.328.350,00	15.328.350,00	25.091.750,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.169.433,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.254.000,00	152.254.000,00	152.254.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.565.626,00	37.536.600,00	37.536.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.454.800,00	57.454.800,00	57.454.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.400.000,00	67.779.500,00	67.779.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	47.379.500,00	47.379.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.395.200,00	438.595.200,00	419.165.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.975.200,00	90.975.200,00	90.975.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.060.000,00	231.060.000,00	231.060.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.360.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.970.000,00	61.970.000,00	61.970.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.030.000,00	52.030.000,00	32.600.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	13.453.190.884,00	13.503.714.348,00	15.818.065.276,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.453.190.884,00	13.503.714.348,00	15.818.065.276,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	8.143.478.948,00	8.151.788.948,00	8.296.268.876,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	60.921.460,00	56.021.460,00	56.021.460,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	8.082.557.488,00	8.095.767.488,00	8.240.247.416,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.309.711.936,00	5.351.925.400,00	7.521.796.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.003.896.536,00	1.002.595.000,00	1.002.595.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	15.529.100,00	15.529.100,00	15.529.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.290.286.300,00	4.333.801.300,00	6.503.672.300,00
5.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.946.853.927,00	21.946.615.442,00	25.878.465.440,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	21.946.853.927,00	21.946.615.442,00	25.878.465.440,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.092.785.558,00	9.193.132.678,00	9.488.643.178,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.175.075.232,00	2.215.795.672,00	2.215.795.672,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	24.538.512,00	24.538.512,00	24.538.512,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.662.402.100,00	1.746.402.100,00	1.746.402.100,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	488.134.620,00	444.855.060,00	444.855.060,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	524.731.100,00	524.731.100,00	524.731.100,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.080.697,00	82.080.697,00	82.080.697,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	213.688.800,00	213.688.800,00	213.688.800,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	230.950.242,00	230.950.242,00	230.950.242,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	251.715.737,00	251.715.737,00	251.715.737,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	233.024.832,00	233.024.832,00	233.024.832,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.559.984.676,00	1.576.342.306,00	1.576.330.781,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	299.585.825,00	315.943.455,00	315.943.455,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	240.220.425,00	240.220.425,00	240.208.900,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	207.851.355,00	207.851.355,00	207.851.355,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	237.818.165,00	237.818.165,00	237.818.165,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	335.078.106,00	335.078.106,00	335.078.106,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	239.430.800,00	239.430.800,00	239.430.800,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.821.534.242,00	3.864.803.292,00	4.160.325.317,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	627.737.540,00	627.737.540,00	627.726.240,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1.195.648.772,00	1.195.638.262,00	1.195.481.187,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.708.196.805,00	1.708.196.805,00	2.003.887.205,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	134.213.825,00	134.213.825,00	134.213.825,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	155.737.300,00	199.016.860,00	199.016.860,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.854.068.369,00	12.753.482.764,00	16.389.822.262,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.212.437.988,00	11.212.437.988,00	14.848.777.486,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.198.805.095,00	11.198.805.095,00	14.835.144.593,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.632.893,00	13.632.893,00	13.632.893,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.046.562,00	335.303.782,00	335.303.782,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.377.700,00	7.377.700,00	7.377.700,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.938.635,00	285.195.855,00	285.195.855,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.730.227,00	42.730.227,00	42.730.227,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	573.921.917,00	417.053.456,00	417.053.456,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	387.750.000,00	387.750.000,00	387.750.000,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.171.917,00	29.303.456,00	29.303.456,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.789.984,00	144.735.620,00	144.735.620,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.369.168,00	42.314.804,00	42.314.804,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.519.400,00	14.519.400,00	14.519.400,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.901.416,00	87.901.416,00	87.901.416,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.457.351,00	625.537.351,00	625.537.351,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.494.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.049.064,00	459.649.064,00	459.649.064,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.844.375,00	2.844.375,00	2.844.375,00
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	72.069.192,00	72.069.192,00	72.069.192,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	41.992.196.861,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	41.992.196.861,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	41.992.196.861,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	849.605.670,00	991.403.595,00	1.029.393.390,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	240.303.712,00	381.181.137,00	439.170.932,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	77.017.163,00	208.610.968,00	208.610.968,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66.608.543,00	75.376.563,00	75.376.563,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	23.763.794,00	23.763.794,00	81.753.589,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	15.250.432,00	15.250.432,00	15.250.432,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	51.680.058,00	52.195.658,00	52.195.658,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5.983.722,00	5.983.722,00	5.983.722,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	609.301.958,00	610.222.458,00	590.222.458,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	609.301.958,00	610.222.458,00	590.222.458,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	817.437.482,00	2.159.747.182,00	2.702.547.182,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	817.437.482,00	2.159.747.182,00	2.702.547.182,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56.750.721,00	339.298.421,00	882.098.421,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.207.553,00	2.207.553,00	2.207.553,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	752.529.549,00	1.812.291.549,00	1.812.291.549,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5.949.659,00	5.949.659,00	5.949.659,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.325.153.709,00	38.841.046.084,00	38.260.256.289,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.183.719,00	14.172.518,00	14.172.518,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.699.042,00	9.039.042,00	9.039.042,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.484.677,00	5.133.476,00	5.133.476,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.932.529.060,00	34.037.096.550,00	33.456.306.755,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.932.529.060,00	34.037.096.550,00	33.456.306.755,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.902.550,00	265.449.960,00	265.449.960,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.803.300,00	5.309.460,00	5.309.460,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.672.800,00	189.878.780,00	189.878.780,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.683.250,00	28.518.520,00	28.518.520,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.743.200,00	41.743.200,00	41.743.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.653.444.472,00	4.062.014.714,00	4.062.014.714,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	398.605.662,00	714.143.142,00	714.143.142,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.254.838.810,00	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.053.908,00	80.272.342,00	80.272.342,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.033.908,00	15.942.708,00	15.942.708,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.000,00	37.329.634,00	37.329.634,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.040.000,00	382.040.000,00	382.040.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.970.000,00	73.970.000,00	73.970.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.200.000,00	271.200.000,00	271.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.870.000,00	36.870.000,00	36.870.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Petang	14.614.957.174,00	14.468.068.881,00	13.555.229.874,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	14.614.957.174,00	14.468.068.881,00	13.555.229.874,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	14.614.957.174,00	14.468.068.881,00	13.555.229.874,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	671.276.596,00	694.251.816,00	694.251.816,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	662.237.396,00	685.394.316,00	685.394.316,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.775.600,00	1.835.600,00	1.835.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	660.461.796,00	683.558.716,00	683.558.716,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.169.571.343,00	2.181.587.583,00	2.191.587.583,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.163.166.843,00	2.170.939.083,00	2.180.939.083,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.625.943,00	31.141.133,00	31.141.133,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	46.188.200,00	50.638.200,00	50.638.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.092.352.700,00	2.089.159.750,00	2.099.159.750,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	303.219.468,00	301.862.468,00	301.862.468,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	79.800.800,00	37.312.800,00	37.312.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.516.100,00	29.116.100,00	29.116.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.826.500,00	26.707.400,00	26.707.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.273.026.067,00	11.119.105.414,00	10.196.266.407,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.276.900,00	20.476.900,00	20.476.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.055.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.221.200,00	8.921.200,00	8.921.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.092.321.699,00	9.135.881.699,00	8.213.042.692,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.092.321.699,00	9.135.881.699,00	8.213.042.692,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.618.600,00	411.797.900,00	411.797.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.390.700,00	2.110.000,00	2.110.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318.274.200,00	347.734.200,00	347.734.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.316.900,00	21.316.900,00	21.316.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.636.800,00	40.636.800,00	40.636.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.750.108,00	16.406.355,00	16.406.355,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	24.920.388,00	10.576.635,00	10.576.635,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.829.720,00	5.829.720,00	5.829.720,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.075.373.960,00	1.101.844.260,00	1.101.844.260,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.157.760,00	21.057.760,00	21.057.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.342.000,00	79.270.000,00	79.270.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	943.874.200,00	1.001.516.500,00	1.001.516.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.684.800,00	432.698.300,00	432.698.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	541.272.800,00	354.836.300,00	354.836.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.420.000,00	23.870.000,00	23.870.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.992.000,00	53.992.000,00	53.992.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Abiansemal	19.301.027.774,00	19.301.027.774,00	18.810.966.474,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	590.396.932,00	595.445.316,00	590.948.016,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.836.000,00	16.836.000,00	12.338.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.836.000,00	16.836.000,00	12.338.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	573.560.932,00	578.609.316,00	578.609.316,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.624.900,00	1.624.900,00	1.624.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	571.936.032,00	576.984.416,00	576.984.416,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.660.123.515,00	2.681.578.600,00	2.696.043.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.638.662.915,00	2.664.338.000,00	2.678.803.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.921.900,00	32.951.900,00	32.951.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	51.086.700,00	51.086.700,00	55.582.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.554.654.315,00	2.580.299.400,00	2.590.268.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	414.514.377,00	375.624.377,00	375.624.377,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	107.354.600,00	67.490.600,00	67.490.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	139.340.680,00	109.756.700,00	109.729.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.340.680,00	109.756.700,00	109.729.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.394.700,00	26.656.700,00	26.656.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	90.945.980,00	83.100.000,00	83.072.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.355.435.170,00	15.443.569.681,00	14.943.568.181,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.505.200,00	13.505.200,00	13.505.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.930.900,00	7.930.900,00	7.930.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.574.300,00	5.574.300,00	5.574.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.327.881.393,00	13.519.359.567,00	13.019.359.567,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.327.881.393,00	13.519.359.567,00	13.019.359.567,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.180.028,00	445.587.128,00	445.585.628,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.833.100,00	768.000,00	768.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	365.071.828,00	389.544.028,00	389.544.028,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.615.100,00	21.615.100,00	21.613.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.660.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.151.504,00	284.362.881,00	284.362.881,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	305.677.239,00	272.888.616,00	272.888.616,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.474.265,00	11.474.265,00	11.474.265,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.033.925,00	575.201.385,00	575.201.385,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.628.869,00	27.240.073,00	27.240.073,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.272.040,00	90.272.040,00	90.272.040,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.133.016,00	457.689.272,00	457.689.272,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714.683.120,00	605.553.520,00	605.553.520,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	457.805.620,00	348.676.020,00	348.676.020,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.677.500,00	35.677.500,00	35.677.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.200.000,00	221.200.000,00	221.200.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Mengwi	51.338.158.994,00	52.942.122.670,00	52.381.478.876,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.126.772.638,00	6.675.261.614,00	6.675.261.614,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.058.178,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.058.178,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.308.106.240,00	2.327.826.915,00	2.327.043.625,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.298.336.840,00	2.318.057.515,00	2.317.274.225,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.007.032,00	37.273.132,00	37.273.132,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	69.979.383,00	54.059.383,00	54.049.183,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.191.350.425,00	2.226.725.000,00	2.225.951.910,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	850.217.184,00	742.288.684,00	67.156.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	850.217.184,00	742.288.684,00	67.156.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	850.217.184,00	742.288.684,00	67.156.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	523.626.081,00	476.448.081,00	476.448.081,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	106.513.500,00	67.537.500,00	67.537.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	131.532.556,00	87.385.872,00	87.355.672,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	131.532.556,00	87.385.872,00	87.355.672,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.949.536,00	20.949.536,00	20.949.536,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.302.120,00	11.804.236,00	11.794.036,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	98.280.900,00	54.632.100,00	54.612.100,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.291.390.795,00	42.565.374.004,00	42.680.675.784,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.406.638,00	14.813.788,00	14.813.788,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.980.684,00	9.070.484,00	9.070.484,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.425.954,00	5.743.304,00	5.743.304,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.759.392.078,00	24.994.148.873,00	25.076.525.363,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.759.392.078,00	24.994.148.873,00	25.076.525.363,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.197.081.856,00	1.411.700.306,00	1.411.627.046,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.726.244,00	29.726.244,00	29.652.984,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.059.062.837,00	1.273.681.287,00	1.273.681.287,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.006.135,00	35.006.135,00	35.006.135,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73.286.640,00	73.286.640,00	73.286.640,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.663.314.336,00	10.691.906.009,00	10.623.413.459,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.414.187.950,00	3.414.187.950,00	3.414.187.950,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1.761.381.411,00	1.761.381.411,00	1.761.381.411,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.751.610.745,00	4.751.610.745,00	4.683.118.195,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.894.490.928,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	841.643.302,00	764.725.903,00	764.725.903,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.312.637,00	2.813.844.493,00	2.912.886.593,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.177.949,00	62.117.949,00	62.117.949,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.130.000,00	396.130.000,00	492.470.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.227.004.688,00	2.355.596.544,00	2.358.298.044,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.883.250,00	2.638.960.535,00	2.641.409.535,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	683.661.972,00	606.960.524,00	609.884.524,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.420.000,00	50.420.000,00	49.945.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.801.278,00	1.981.580.011,00	1.981.580.011,00
7.01.0.00.0.00.03.1001						Kelurahan Kapal	0,00	0,00	5.979.205.297,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	5.979.205.297,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	0,00	5.979.205.297,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	13.366.700,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	4.741.483.222,00
7.01.0.00.0.00.03.1001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.224.355.375,00
7.01.0.00.0.00.03.1002						Kelurahan Sempidi	0,00	0,00	3.005.017.292,00
7.01.0.00.0.00.03.1002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	13.196.500,00
7.01.0.00.0.00.03.1002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	652.454.485,00
7.01.0.00.0.00.03.1002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	2.339.366.307,00
7.01.0.00.0.00.03.1003						Kelurahan Abianbase	0,00	0,00	2.439.867.309,00
7.01.0.00.0.00.03.1003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	10.566.700,00
7.01.0.00.0.00.03.1003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	2.429.300.609,00
7.01.0.00.0.00.03.1004						Kelurahan Sading	0,00	0,00	1.374.973.634,00
7.01.0.00.0.00.03.1004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	11.116.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.1004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	255.658.500,00
7.01.0.00.0.00.03.1004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.108.198.434,00
7.01.0.00.0.00.03.1005						Kelurahan Lukluk	0,00	0,00	669.108.172,00
7.01.0.00.0.00.03.1005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	10.116.700,00
7.01.0.00.0.00.03.1005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	658.991.472,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Kuta Utara	34.044.345.328,00	34.483.625.826,00	34.493.630.300,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.870.154.759,00	6.135.744.733,00	6.135.744.733,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	698.995.674,00	734.104.314,00	734.104.314,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	698.995.674,00	734.104.314,00	734.104.314,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.379.512.919,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.379.512.919,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.613.186.535,00	2.609.800.288,00	2.619.800.288,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.602.589.968,00	2.599.334.457,00	2.609.334.457,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	46.247.413,00	47.473.818,00	47.473.818,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	47.637.511,00	47.080.958,00	47.080.958,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.508.705.044,00	2.504.779.681,00	2.514.779.681,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	563.107.753,00	526.871.581,00	526.871.581,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	563.107.753,00	526.871.581,00	526.871.581,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	456.759.238,00	420.523.066,00	420.523.066,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	106.348.515,00	106.348.515,00	106.348.515,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	773.202.036,00	801.928.050,00	801.928.050,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.305.428,00	13.160.800,00	13.160.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.913.296,00	23.558.300,00	23.558.300,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.118.920.929,00	24.300.690.132,00	24.300.694.606,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.031.905,00	140.966.015,00	140.966.015,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.979.899,00	9.902.998,00	9.902.998,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.469.206.161,00	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.469.206.161,00	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.668.090,00	3.972.690,00	3.972.690,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	521.895.500,00	725.895.500,00	725.895.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.295.886,00	40.295.886,00	40.295.886,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.185.600,00	58.185.600,00	58.185.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.607.301.864,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.590.303.770,00	2.116.422.570,00	2.116.422.570,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	163.007.829,00	151.890.846,00	151.890.846,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.853.990.265,00	1.523.765.376,00	1.523.765.376,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.053.597.338,00	1.100.627.706,00	1.100.627.706,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.480.955,00	61.480.955,00	61.480.955,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.740.316,00	279.740.316,00	279.740.316,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	712.376.067,00	759.406.435,00	759.406.435,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.945.720,00	124.425.320,00	124.425.320,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	622.315.576,00	424.267.852,00	424.267.852,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.871.437,00	87.700.212,00	87.700.212,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	309.625.953,00	323.165.400,00	323.165.400,00
7.01.0.00.0.00.04.1001						Kelurahan Kerobokan Kelod	0,00	0,00	1.498.612.061,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	1.498.612.061,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	0,00	1.498.612.061,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.919.744,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	303.113.250,00
7.01.0.00.0.00.04.1001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.188.579.067,00
7.01.0.00.0.00.04.1002						Kelurahan Kerobokan Kaja	0,00	0,00	1.084.003.418,00
7.01.0.00.0.00.04.1002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.722.139,00
7.01.0.00.0.00.04.1002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	498.479.915,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.1002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	578.801.364,00
7.01.0.00.0.00.04.1003						Kelurahan Kerobokan	0,00	0,00	1.568.095.243,00
7.01.0.00.0.00.04.1003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.434.768,00
7.01.0.00.0.00.04.1003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	423.161.415,00
7.01.0.00.0.00.04.1003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.138.499.060,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Kuta	57.194.798.790,00	52.840.618.569,00	44.852.214.238,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.827.097.780,00	4.690.141.136,00	4.690.141.136,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.032.716.100,00	1.136.441.652,00	1.136.441.652,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.005.617.400,00	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.098.700,00	70.466.352,00	70.466.352,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.553.699.484,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.553.699.484,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.515.892.449,00	10.343.015.849,00	3.757.679.860,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.838.932.660,00	2.523.873.360,00	2.523.868.260,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.212.700,00	23.456.700,00	23.456.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	23.636.000,00	23.636.000,00	23.636.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.792.083.960,00	2.476.780.660,00	2.476.775.560,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11.654.779.389,00	7.798.834.389,00	1.213.503.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.221.000,00	34.329.000,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.020.527.300,00	2.294.841.100,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.598.031.089,00	5.469.664.289,00	1.213.503.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	848.846.500,00	833.899.400,00	98.906.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	848.846.500,00	833.899.400,00	98.906.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	848.846.500,00	833.899.400,00	98.906.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	219.961.400,00	219.961.400,00	219.961.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	95.711.200,00	54.311.200,00	54.311.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.687.289.461,00	36.699.289.584,00	36.031.214.242,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.678.400,00	11.269.600,00	13.384.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.873.900,00	6.445.100,00	7.403.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.804.500,00	4.824.500,00	5.980.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.319.658.741,00	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.319.658.741,00	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.612.189.000,00	1.626.594.000,00	1.635.834.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	348.070.900,00	347.765.900,00	347.765.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.066.193.200,00	1.077.828.200,00	1.087.068.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.859.700,00	54.934.700,00	54.934.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.031.200,00	108.031.200,00	108.031.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.034.000,00	38.034.000,00	38.034.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.091.393.196,00	8.332.160.611,00	8.250.918.843,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.244.095.250,00	4.395.854.450,00	4.314.612.682,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1.011.207.600,00	867.265.200,00	867.265.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.336.590.346,00	2.569.540.961,00	2.569.540.961,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.500.000,00	499.500.000,00	499.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.708.508.824,00	2.830.702.332,00	2.830.702.332,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.004.400,00	124.662.400,00	124.662.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	465.378.900,00	465.378.900,00	465.378.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.111.125.524,00	2.240.661.032,00	2.240.661.032,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.942.861.300,00	4.578.904.300,00	4.603.657.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.827.600,00	120.677.200,00	120.677.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	705.858.300,00	620.640.700,00	620.640.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288.434.400,00	262.764.400,00	262.764.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.858.741.000,00	3.574.822.000,00	3.599.575.000,00
7.01.0.00.0.00.05.1001						Kelurahan Tuban	0,00	0,00	1.331.087.030,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	1.331.087.030,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	0,00	1.331.087.030,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	285.874.000,00
7.01.0.00.0.00.05.1001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.038.347.230,00
7.01.0.00.0.00.05.1002						Kelurahan Kuta	0,00	0,00	2.302.865.700,00
7.01.0.00.0.00.05.1002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	637.852.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.1002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.658.147.400,00
7.01.0.00.0.00.05.1003						Kelurahan Kedonganan	0,00	0,00	3.037.102.064,00
7.01.0.00.0.00.05.1003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	640.348.200,00
7.01.0.00.0.00.05.1003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	2.389.888.064,00
7.01.0.00.0.00.05.1004						Kelurahan Legian	0,00	0,00	1.933.834.930,00
7.01.0.00.0.00.05.1004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	743.794.100,00
7.01.0.00.0.00.05.1004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.183.175.030,00
7.01.0.00.0.00.05.1005						Kelurahan Seminyak	0,00	0,00	246.615.700,00
7.01.0.00.0.00.05.1005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	6.865.800,00
7.01.0.00.0.00.05.1005	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	48.532.700,00
7.01.0.00.0.00.05.1005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	191.217.200,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Kuta Selatan	33.276.512.752,00	33.228.030.971,00	31.297.325.875,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.833.602.928,00	5.867.502.324,00	5.867.502.324,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	566.380.640,00	625.688.480,00	625.688.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	566.380.640,00	625.688.480,00	625.688.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.230.681.744,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.230.681.744,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.528.696.119,00	2.930.202.961,00	2.940.202.961,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.389.920.219,00	2.791.377.061,00	2.801.377.061,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.661.775,00	35.438.775,00	35.438.775,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.509.700,00	999.400,00	999.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.353.748.744,00	2.754.938.886,00	2.764.938.886,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	138.775.900,00	138.825.900,00	138.825.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	138.775.900,00	138.825.900,00	138.825.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.168.862.990,00	1.172.674.630,00	419.756.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.168.862.990,00	1.172.674.630,00	419.756.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.168.862.990,00	1.172.674.630,00	419.756.480,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	410.766.610,00	405.135.010,00	405.135.010,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	410.766.610,00	405.135.010,00	405.135.010,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	308.785.210,00	308.761.010,00	308.761.010,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	101.981.400,00	96.374.000,00	96.374.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	318.816.291,00	310.784.991,00	407.066.991,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	318.816.291,00	310.784.991,00	407.066.991,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	282.258.391,00	280.040.691,00	376.322.691,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8.068.400,00	7.014.700,00	7.014.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	28.489.500,00	23.729.600,00	23.729.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.015.767.814,00	22.541.731.055,00	21.257.662.109,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.667.300,00	15.667.300,00	665.004.300,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.393.800,00	10.393.800,00	10.393.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.273.500,00	5.273.500,00	654.610.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.394.231.450,00	15.394.231.450,00	13.253.943.149,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.394.231.450,00	15.394.231.450,00	13.253.943.149,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	793.005.355,00	866.265.755,00	866.265.755,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.896.000,00	14.906.400,00	14.906.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	632.282.355,00	710.532.355,00	710.532.355,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.019.000,00	69.019.000,00	69.019.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.808.000,00	71.808.000,00	71.808.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.421.409.221,00	2.989.793.769,00	3.196.676.124,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.132.539.770,00	1.871.689.770,00	1.871.689.770,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	842.819.559,00	449.963.364,00	449.963.364,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.392.269.892,00	668.140.635,00	875.022.990,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.053.780.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.314.245.568,00	1.367.504.616,00	1.367.504.616,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.454.024,00	82.018.424,00	82.018.424,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.843.196,00	351.843.196,00	351.843.196,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	879.948.348,00	933.642.996,00	933.642.996,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.208.920,00	1.908.268.165,00	1.908.268.165,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.894.720,00	121.374.320,00	121.374.320,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	629.914.200,00	625.728.700,00	625.728.700,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.890.000,00	83.250.000,00	83.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.510.000,00	1.077.915.145,00	1.077.915.145,00
7.01.0.00.0.00.06.1004						Kelurahan Benoa	0,00	0,00	1.221.124.108,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	1.221.124.108,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	0,00	1.221.124.108,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	4.596.050,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	306.523.000,00
7.01.0.00.0.00.06.1004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	910.005.058,00
7.01.0.00.0.00.06.1005						Kelurahan Tanjung Benoa	0,00	0,00	1.985.340.101,00
7.01.0.00.0.00.06.1005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	4.596.050,00
7.01.0.00.0.00.06.1005	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	367.965.000,00
7.01.0.00.0.00.06.1005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.612.779.051,00
7.01.0.00.0.00.06.1006						Kelurahan Jimbaran	0,00	0,00	1.281.340.210,00
7.01.0.00.0.00.06.1006	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	4.596.050,00
7.01.0.00.0.00.06.1006	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	191.489.400,00
7.01.0.00.0.00.06.1006	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	1.085.254.760,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45.845.916.468,00	45.835.842.368,00	45.579.901.626,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	45.845.916.468,00	45.835.842.368,00	45.579.901.626,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.845.916.468,00	45.835.842.368,00	45.579.901.626,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.462.757.150,00	3.773.658.450,00	4.312.717.850,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.462.757.150,00	3.773.658.450,00	4.312.717.850,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	140.105.450,00	139.815.050,00	139.815.050,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	837.895.400,00	910.869.400,00	910.869.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.152.700,00	2.998.300,00	2.998.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	2.481.603.600,00	2.719.975.700,00	3.259.035.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.476.419.000,00	21.428.197.700,00	21.428.197.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.476.419.000,00	21.428.197.700,00	21.428.197.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.660.510.700,00	20.660.225.700,00	20.660.225.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	692.028.800,00	663.292.500,00	663.292.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	123.879.500,00	104.679.500,00	104.679.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	469.532.200,00	469.532.200,00	2.474.532.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	469.532.200,00	469.532.200,00	2.474.532.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	456.985.600,00	456.985.600,00	2.461.985.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.546.600,00	12.546.600,00	12.546.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.909.055.932,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.909.055.932,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.425.570.732,00	2.508.070.732,00	2.508.070.732,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	401.915.100,00	400.985.200,00	400.985.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	993.481.700,00	968.933.400,00	968.933.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	993.481.700,00	968.933.400,00	968.933.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	902.600.500,00	878.400.500,00	878.400.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	90.881.200,00	90.532.900,00	90.532.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.616.240.586,00	16.286.464.686,00	13.486.464.544,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.942.400,00	9.710.200,00	9.710.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.759.900,00	5.643.800,00	5.643.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.182.500,00	4.066.400,00	4.066.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.653.095.886,00	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.653.095.886,00	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.170.600,00	211.019.100,00	211.019.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000,00	33.688.500,00	33.688.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	544.200,00	544.200,00	544.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284.709.600,00	127.869.600,00	127.869.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.791.800,00	24.791.800,00	24.791.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.561.700,00	43.154.900,00	43.154.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.991.700,00	39.584.900,00	39.584.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.470.000,00	369.484.600,00	369.484.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	497.585.000,00	349.974.600,00	349.974.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.885.000,00	19.510.000,00	19.510.000,00
TOTAL							8.291.207.436.938,00	8.306.807.637.205,00	9.643.008.303.787,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung



 I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.390.564,00	0,00	0,00	0,00	163.390.564,00
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.873.463.554,00	3.845.928,00	0,00	0,00	4.877.309.482,00
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	1.539.087.361,00	166.402.728,00	0,00	0,00	1.705.490.089,00
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.112.001.916,00	891.391.600,00	0,00	0,00	2.003.393.516,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	46.866.639.029,00	0,00	0,00	0,00	46.866.639.029,00
6	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	842.310.077.178,00	46.985.472.000,00	0,00	0,00	889.295.549.178,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
7	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.546.130.215,00	81.837.945.000,00	0,00	0,00	92.384.075.215,00
8	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00	0,00	0,00	0,00	13.000.488.369,00
9	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	0,00	0,00	0,00	9.844.395.882,00
10	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.775.528.715,00	0,00	0,00	0,00	1.775.528.715,00
11	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.066.469.300,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	7.316.469.300,00
12	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.078.829.422,00	190.323.042,00	0,00	0,00	34.269.152.464,00
13	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.201.483.603,00	587.665.589.200,00	0,00	0,00	610.867.072.803,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
14	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.466.095.974,00	173.490.400,00	0,00	0,00	1.639.586.374,00
15	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	36.055.644.197,00	14.386.725.289,00	0,00	0,00	50.442.369.486,00
16	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	33.303.823.108,00	20.262.390.280,00	0,00	0,00	53.566.213.388,00
17	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.752.004.055,00	0,00	0,00	0,00	11.752.004.055,00
18	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.478.836.799,00	265.803.032.081,00	0,00	0,00	274.281.868.880,00
19	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	21.302.772.535,00	6.245.477.000,00	0,00	0,00	27.548.249.535,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
21	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	46.843.823.468,00	304.884.500,00	0,00	0,00	47.148.707.968,00
22	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.441.961.766,00	0,00	0,00	0,00	6.441.961.766,00
23	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.438.155.077,00	408.377.156,00	0,00	0,00	1.846.532.233,00
24	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	196.985.225,00	0,00	0,00	0,00	196.985.225,00
25	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.759.415,00	0,00	0,00	0,00	79.759.415,00
26	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.582.255.359,00	1.485.516.123,00	0,00	0,00	3.067.771.482,00
27	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.950.060,00	0,00	0,00	0,00	54.950.060,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
28	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00	0,00	0,00	0,00	238.823.700,00
29	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	62.973.200,00	0,00	0,00	0,00	62.973.200,00
30	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	232.502.520,00	0,00	0,00	0,00	232.502.520,00
31	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00	0,00	0,00	0,00	251.006.100,00
32	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00	0,00	0,00	0,00	209.851.720,00
33	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.996.200,00	150.798.000.000,00	0,00	0,00	150.852.996.200,00
34	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	359.048.223,00	0,00	0,00	0,00	359.048.223,00
35	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.352.400,00	0,00	0,00	0,00	14.352.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
36	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	567.761.104,00	0,00	0,00	0,00	567.761.104,00
37	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata	11.520.385.440,00	0,00	0,00	0,00	11.520.385.440,00
38	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata	76.465.360,00	0,00	0,00	0,00	76.465.360,00
39	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	7.145.513.660,00	7.130.487.588,00	0,00	0,00	14.276.001.248,00
40	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	1.175.900,00
41	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00	0,00	0,00	0,00	85.750.820,00
42	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.127.750.544,00	0,00	0,00	0,00	7.127.750.544,00
43	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.620.560,00	0,00	0,00	0,00	54.620.560,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
44	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	8.439.011.700,00	2.092.514.277,00	0,00	0,00	10.531.525.977,00
45	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	1.525.481.706,00	119.018.294,00	0,00	0,00	1.644.500.000,00
46	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	812.909.411,00	87.090.589,00	0,00	0,00	900.000.000,00
47	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	991.545.929,00	118.039.560,00	0,00	0,00	1.109.585.489,00
48	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	996.128.375,00	134.074.546,00	0,00	0,00	1.130.202.921,00
49	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta I	1.303.125.070,00	336.874.930,00	0,00	0,00	1.640.000.000,00
50	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta II	634.103.000,00	62.897.000,00	0,00	0,00	697.000.000,00
51	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.174.636.097,00	252.677.262,00	0,00	0,00	2.427.313.359,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
52	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Mengwi I	1.956.645.670,00	343.028.330,00	0,00	0,00	2.299.674.000,00
53	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.328.778.220,00	111.432.979,00	0,00	0,00	1.440.211.199,00
54	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Petang I	667.746.272,00	112.253.728,00	0,00	0,00	780.000.000,00
55	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPTD. Puskesmas Petang II	653.148.969,00	107.091.031,00	0,00	0,00	760.240.000,00
56	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00	0,00	0,00	0,00	7.646.518.632,00
57	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	167.254.840,00	0,00	0,00	0,00	167.254.840,00
58	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.172.902.800,00	0,00	0,00	0,00	4.172.902.800,00
59	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	28.239.200,00	0,00	0,00	0,00	28.239.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
60	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	11.872.946.006,00	0,00	0,00	0,00	11.872.946.006,00
61	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah	208.554.096.611,00	1.036.567.173,00	0,00	0,00	209.590.663.784,00
62	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.758.083.085,00	73.615.200,00	0,00	0,00	1.831.698.285,00
63	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	906.948.846,00	0,00	72.086.033.246,00	0,00	72.992.982.092,00
64	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	58.730.092.738,00	320.445.000,00	0,00	0,00	59.050.537.738,00
65	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.960.024.873,00	0,00	0,00	0,00	6.960.024.873,00
66	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.137.624.213,00	417.053.456,00	0,00	0,00	1.554.677.669,00
67	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	428.434.700,00	0,00	0,00	0,00	428.434.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
68	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.853.500,00	0,00	0,00	0,00	96.853.500,00
69	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	469.410.800,00	0,00	0,00	0,00	469.410.800,00
70	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.003.341.585,00	0,00	0,00	0,00	30.003.341.585,00
71	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	509.405.600,00	0,00	0,00	0,00	509.405.600,00
72	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00	0,00	0,00	0,00	27.562.500,00
73	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Abiansemal	2.696.043.800,00	0,00	0,00	0,00	2.696.043.800,00
74	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Abiansemal	109.729.000,00	0,00	0,00	0,00	109.729.000,00
75	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Abiansemal	14.659.205.300,00	284.362.881,00	0,00	0,00	14.943.568.181,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
76	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Abiansemal	590.948.016,00	0,00	0,00	0,00	590.948.016,00
77	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00	0,00	0,00	0,00	443.114.977,00
78	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	419.756.480,00	0,00	0,00	0,00	419.756.480,00
79	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta Selatan	2.940.202.961,00	0,00	0,00	0,00	2.940.202.961,00
80	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kuta Selatan	407.066.991,00	0,00	0,00	0,00	407.066.991,00
81	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kuta Selatan	17.309.980.840,00	3.947.681.269,00	0,00	0,00	21.257.662.109,00
82	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	0,00	0,00	0,00	5.867.502.324,00
83	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00	0,00	0,00	0,00	405.135.010,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
84	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kuta Utara	424.267.852,00	0,00	0,00	0,00	424.267.852,00
85	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mengwi	67.156.600,00	0,00	0,00	0,00	67.156.600,00
86	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mengwi	2.327.043.625,00	0,00	0,00	0,00	2.327.043.625,00
87	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Mengwi	87.355.672,00	0,00	0,00	0,00	87.355.672,00
88	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mengwi	30.345.697.789,00	12.334.977.995,00	0,00	0,00	42.680.675.784,00
89	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00	0,00	0,00	0,00	6.675.261.614,00
90	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	0,00	0,00	0,00	543.985.581,00
91	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Petang	78.125.300,00	0,00	0,00	0,00	78.125.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
92	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Petang	2.191.587.583,00	0,00	0,00	0,00	2.191.587.583,00
93	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Petang	29.116.100,00	0,00	0,00	0,00	29.116.100,00
94	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Petang	9.176.233.552,00	16.406.355,00	0,00	0,00	9.192.639.907,00
95	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	694.251.816,00	0,00	0,00	0,00	694.251.816,00
96	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Petang	339.175.268,00	0,00	0,00	0,00	339.175.268,00
97	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Benoa	1.221.124.108,00	0,00	0,00	0,00	1.221.124.108,00
98	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Jimbaran	1.281.340.210,00	0,00	0,00	0,00	1.281.340.210,00
99	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Benoa	1.985.340.101,00	0,00	0,00	0,00	1.985.340.101,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	6.680.531.046,00	255.300.000,00	0,00	0,00	6.935.831.046,00
101	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	38.237.407.650,00	28.451.409,00	0,00	0,00	38.265.859.059,00
102	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	9.303.400,00	73.688.741.512,00	0,00	0,00	73.698.044.912,00
103	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	2.204.627.472,00	0,00	0,00	0,00	2.204.627.472,00
104	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	22.640.221.377,00	0,00	0,00	0,00	22.640.221.377,00
105	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	287.465.304,00	0,00	0,00	0,00	287.465.304,00
106	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	249.936.948.466,00	49.610.861.200,00	0,00	0,00	299.547.809.666,00
107	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.031.239.261,00	5.029.546.700,00	0,00	0,00	47.060.785.961,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
108	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	983.131.256,00	0,00	0,00	0,00	983.131.256,00
109	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.938.651.510,00	251.081.100,00	0,00	0,00	2.189.732.610,00
110	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	6.412.732.488,00	552.737.538,00	0,00	0,00	6.965.470.026,00
111	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91.209.200,00	0,00	0,00	0,00	91.209.200,00
112	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	989.239.193,00	0,00	0,00	0,00	989.239.193,00
113	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00	0,00	0,00	0,00	140.786.720,00
114	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	513.066.700,00	0,00	0,00	0,00	513.066.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
115	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00	0,00	0,00	0,00	53.901.330,00
116	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.254.900,00	0,00	0,00	0,00	49.254.900,00
117	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.888.600,00	0,00	0,00	0,00	14.888.600,00
118	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.648.810.678,00	34.508.200,00	0,00	0,00	17.683.318.878,00
119	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00	0,00	0,00	0,00	21.299.900,00
120	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00	0,00	0,00	0,00	366.841.280,00
121	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Daerah Mangusada	167.800.000.000,00	39.065.669.700,00	0,00	0,00	206.865.669.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
122	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
123	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD. Puskesmas Kuta I	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00
124	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.001.814.800,00	0,00	0,00	0,00	1.001.814.800,00
125	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00	0,00	0,00	0,00	5.565.931.540,00
126	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.148.935.900,00	0,00	0,00	0,00	1.148.935.900,00
127	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.941.449.358,00	0,00	0,00	0,00	14.941.449.358,00
128	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	211.431.489,00	0,00	0,00	0,00	211.431.489,00
129	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	34.619.087,00	0,00	0,00	0,00	34.619.087,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
130	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	5.256.046.577,00	0,00	0,00	0,00	5.256.046.577,00
131	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	520.779.218,00	0,00	0,00	0,00	520.779.218,00
132	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.234.848.832,00	14.914.293,00	0,00	0,00	20.249.763.125,00
133	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00	0,00	0,00	0,00	1.426.927.031,00
134	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00	0,00	0,00	0,00	134.000.940,00
135	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00	0,00	0,00	0,00	558.999.232,00
136	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00	0,00	0,00	0,00	650.017.232,00
137	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.826.730.664,00	23.866.887,00	0,00	0,00	24.850.597.551,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
138	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00	0,00	0,00	0,00	47.283.533,00
139	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00	0,00	0,00	0,00	42.796.420,00
140	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.972.830.494,00	0,00	0,00	0,00	2.972.830.494,00
141	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.591.946.191,00	0,00	0,00	0,00	3.591.946.191,00
142	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00	0,00	0,00	0,00	18.616.900,00
143	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.715.189.125,00	25.997.532,00	0,00	0,00	13.741.186.657,00
144	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	798.833.426,00	0,00	0,00	0,00	798.833.426,00
145	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan	1.156.500,00	850.000.000,00	0,00	0,00	851.156.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
147	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	827.649.100,00	0,00	0,00	0,00	827.649.100,00
148	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	5.474.656.720,00	0,00	0,00	0,00	5.474.656.720,00
149	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kebudayaan	1.092.722.109,00	311.830.000,00	0,00	0,00	1.404.552.109,00
150	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.758.985.777,00	0,00	0,00	0,00	2.758.985.777,00
151	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.577.817.860,00	0,00	0,00	0,00	7.577.817.860,00
152	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	698.658.672,00	0,00	0,00	0,00	698.658.672,00
TOTAL					2.324.842.886.473,00	1.379.040.957.841,00	72.086.033.246,00	0,00	3.775.969.877.560,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung




I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN X : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PER DESEMBER 2023

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
						TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	2	4	-	-	7
Golongan IV/c	-	26	1	-	-	59	23	4	-	113
Golongan IV/b	-	9	47	1	-	585	72	40	1	755
Golongan IV/a	-		93	37	2	249	73	113	29	596
JUMLAH GOLONGAN IV	-	36	141	38	2	895	172	157	30	1.471
Golongan III/e	-	-	-	-	-			-	-	-
Golongan III/d	-	-	25	114	4	298	314	185	300	1.240
Golongan III/c	-	-	5	82	-	198	164	74	348	871
Golongan III/b	-	-	-	23	-	204	196	15	890	1.328
Golongan III/a	-	-	-	2	-	56	75	10	160	303
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	30	221	4	756	749	284	1.698	3.742
Golongan II/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/d	-	-	-	-	-	2	76	5	693	776
Golongan II/c	-	-	-	-	-	3	-	1	198	202
Golongan II/b	-	-	-	-	-	2	-	-	172	174
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	7	76	6	1.093	1.182
Golongan I/e		-	-	-	-			-	-	-
Golongan I/d	-	-	-	-	-			-	18	18
Golongan I/c	-	-	-	-	-			-	5	5
Golongan I/b	-	-	-	-	-			-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-			-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-			-	24	24
PPPK										
Golongan III										2.070
Golongan II										3
JUMLAH PPPK										2.073
TOTAL	-	36	171	259	6	1.658	997	447	2.845	8.492

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung


I NYOMAN GIRI PRASTA

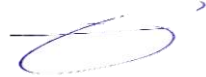
LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

**KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun 31 Desember 2022	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir per 30 Nopember 2023 tahun N 1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Hotel	2023	211.600.592.216,33	2.543.537.173.869,17	2.634.398.698.538,70	120.739.067.546,81
2	Piutang Pajak Restoran	2023	178.078.101.194,81	852.806.292.998,24	871.524.605.172,13	159.359.789.020,91
3	Piutang Pajak Hiburan	2023	20.040.884.818,63	142.582.626.729,50	137.152.390.396,91	25.471.121.151,23
4	Piutang Pajak Reklame	2023	254.615.368,30	1.947.583.417,27	2.098.901.284,61	103.297.500,96
5	Piutang Pajak Parkir	2023	1.296.060.908,51	43.204.626.235,07	34.610.750.252,47	9.889.936.891,11
6	Piutang Pajak Air Tanah	2023	25.885.514.083,21	52.664.024.766,60	55.328.546.649,30	23.220.992.200,51
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	2023	100.844.250,00	42.215.000,00	44.965.000,00	98.094.250,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2023	450.295.371.932,00	244.816.064.565,00	151.670.430.234,44	543.441.006.262,56
9	Piutang BPHTB	2023				-
10	Piutang PPJ	2023			-	-
11	Piutang Sewa Hasil Tanah	2023	70.362.505,60		-	70.362.505,60
Jumlah			887.622.347.277,39	3.881.600.607.580,86	3.886.829.287.528,56	882.393.667.329,69

Kab. Badung, 29 Desember 2023

Bupati Badung


 I Nyoman Giri Prasta

LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2012	PT JASA MARGA BALI	SK BUPATI NO 2050/01/HK/2015	SAHAM	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	-	-	100.000.000.000,00
2	2014	PT PENJAMINAN KREDIT BALI MANDARA	KEPUTUSAN BUPATI NO. 2569/01/HK/2014	SAHAM	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	51.378.678,00	-	5.000.000.000,00
3	2014	PDAM TIRTA MANGUPURA	PERDA NO 1 TAHUN 2014	MODAL PENYERTAAN	193.207.843.274,00	193.207.843.274,00	50.000.000.000	243.207.843.274,00	-	-	-	243.207.843.274,00
4	2014-2023	PD PASAR BADUNG	PERDA NO 2 TAHUN 2014 SK BUPATI NO 756/01/HK/2023	MODAL PENYERTAAN	27.314.641.616,00	31.087.104.000,00	-	58.401.745.616,00	-	334.809.600,00	-	58.401.745.616,00
5	2015- 2022	BPD BALI	SK BUPATI NO 2196/01/HK/2015 SK BUPATI NO 1056/01/HK/2022	SAHAM	800.617.000.000,00	50.000.000.000,00	-	850.617.000.000,00	-	194.236.458.813,00	-	850.617.000.000,00
Jumlah					1.126.139.484.890,00	379.294.947.274,00	50.000.000.000,00	1.257.226.588.890,00	-	194.622.647.091,00	-	1.257.226.588.890,00

Kab. Badung, 29 Desember 2023
Bupati Badung


 I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN XIII (I) : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun 2023	Perkiraan penambahan tahun 2024	perkiraan pengurangan tahun 2024	Perkiraan saldo pada akhir tahun 2024
1	Aset Tetap Lainnya	118.913.450.115,32	13.691.237.806	233.212.500	132.371.475.421
2	Gedung dan Bangunan	3.338.808.155.589,13	884.959.596.037	62.153.661.256	4.161.614.090.370
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.812.372.185.388,71	727.041.910.712	31.596.655.000	4.507.817.441.101
4	Peralatan dan Mesin	2.235.666.301.675,47	213.011.708.165	30.692.291.197	2.417.985.718.644
5	Tanah - Pengadaan Tanah	6.222.562.995.438,89	424.955.000.000	-	6.647.517.995.439
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	32.296.074.276,67	-	-	32.296.074.277
7	Aset Lainnya	558.673.176.090,78	387.735.000	-	559.060.911.091
JUMLAH		16.319.292.338.575,00	2.264.047.187.720,00	124.675.819.952,68	18.458.663.706.342

Kab. Badung, 29 Desember 2023
Bupati Badung


I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-
3								
			Jumlah	-	-	-	-	-

Kab. Badung, 29 Desember 2023
Bupati Badung

I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

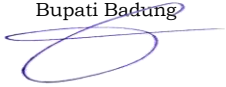
Kab. Badung, 29 Desember 2023
Bupati Badung


I NYOMAN GIRI PRASTA

KABUPATEN BADUNG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

Kab. Badung, 29 Desember 2023
Bupati Badung



I NYOMAN GIRI PRASTA